

SUSUNAN PENGELOLA

Ketua Pengarah

Agus Dwiyanto

Ketua Penyunting

Tukiran

Penyunting

Sofian Effendi

Ida Bagoes Mantra

Djamaluddin Ancok

Irwani Abdullah

Kasto

Muhadjir Darwin

Penyunting Pelaksana

Sukamdi

Faturochman

Anna Marie Wattie

Wini Tamtari

Mitra Bestari

Chris Manning (Canberra)

Hans-Dieter Evers (Bielefeld)

Benjamin White (Den Haag)

Penyunting Bahasa

Sugihastuti

Diterbitkan oleh

Pusat Penelitian Kependudukan

Universitas Gadjah Mada

Alamat Redaksi

Bulaksumur Blok G-7

Yogyakarta - 55281

Telp. (0274) 563079 - 901152

Fax (0274) 582230

E-mail.

psc-gmu@yogya.wasantara.net.id

Homepage.

http://www.ugm.ac.id/pscgm/

Surat Tanda Terdaftar

Deppen RI No.: 2000/SK/Ditjen -

PPG/STT/94

Tanggal 9 Maret 1994

ISSN 0853-0262

DAFTAR ISI

Daftar Isi	1
Pengantar Redaksi	2
Menuju Pembangunan Berwawasan Kependudukan <i>Prijono Tjiptoherijanto</i>	3
Sensus Penduduk di Indonesia <i>Tukiran</i>	17
Kondisi Sosial Ekonomi dan Perawatan yang Diinginkan Penduduk Lanjut Usia <i>Umi Listyaningsih, Sukamdi, Faturochman</i>	35
Strategi Bertahan Hidup di Tiga Wilayah <i>Dyah Ratih Sulistyastuti dan Faturochman</i>	59
Resistensi Penduduk Perdesaan dalam Cerita Keseharian di Kali Loro <i>Gutomo Bayu Aji</i>	83

POPULASI merupakan majalah berkala, terbit dua kali setahun, setiap bulan Juli dan Desember. Redaksi menerima karangan yang menitikberatkan pada bidang kependudukan. Naskah harus belum pernah dan tidak akan dipublikasikan dalam media cetak lain, berupa ketikan asli dengan renggang ganda, tidak lebih dari 25 halaman termasuk daftar pustaka. Redaksi berhak membuat perubahan dalam karangan tanpa mengubah isi atau maksud karangan.

PENGANTAR REDAKSI

Laporan dari UNDP tentang pembangunan manusia tahun 2000 meletakkan posisi Indonesia pada urutan tengah dari kelompok medium atau nomor 105 dari 175 negara. Pada sisi lain, laporan dari Bank Dunia pada tahun 1999/2000 menunjukkan bahwa posisi Indonesia dilihat dari pendapatan per kapita berada pada kelompok berpendapatan rendah, yaitu urutan ke-141 dari 210 negara. Dengan demikian, diperlukan orientasi baru dalam pembangunan agar sumber daya manusia menjadi titik sentral dalam proses pembangunan. *Populasi* terbitan nomor ini menampilkan lima tulisan tentang pembangunan berwawasan kependudukan.

Tulisan pertama memaparkan bahwa model pembangunan yang menitikberatkan pada pertumbuhan ternyata gagal untuk mencapai sasaran. Penduduk tidak merasa ikut menikmati hasil pembangunan dan ketika terjadi berbagai gejolak sosial, mereka kurang berpartisipasi dalam menanggulangi permasalahan yang ada di sekitarnya. Tulisan kedua mengingatkan kita pentingnya data kependudukan yang

tersedia pada Sensus Penduduk, Sensus Bangunan Tempat Tinggal dan Potensi Desa (Podes) dalam penyusunan perencanaan pembangunan.

Tulisan ketiga merupakan hasil penelitian tentang perawatan penduduk usia lanjut. Dalam hal perawatan kesehatan ditemukan perbedaan yang cukup berarti antara orang tua yang merawat anak dengan anak yang merawat orang tua. Tulisan keempat berisi uraian mengenai strategi bertahan hidup penduduk untuk daerah *urban* dan daerah transisi, serta daerah perdesaan lahan kering, yang ternyata mempunyai kesamaan karena masyarakat di tiga wilayah tersebut adalah pekerja keras.

Resistensi penduduk perdesaan terjadi pada kelas rendah yang disubordinasi oleh kelas atas yang mendominasi karena ketidakadilan dalam hubungan mereka. Topik ini merupakan tulisan terakhir dari edisi *Populasi* ini. Berbagai topik seputar pembangunan berwawasan kependudukan yang tersaji dalam *Populasi* edisi ini diharapkan dapat menjadi sumber informasi yang bermanfaat.

MENUJU PEMBANGUNAN BERWAWASAN KEPENDUDUKAN

Prijono Tjiptoherijanto*

Abstract

The economic crisis in Indonesia, may be interpreted as effects of a strategy of economic development which has been unsuited to the Indonesian condition and potency. The strategy, so far has been oriented to the static development, top-down, and too formal. Therefore, it should be readapted to be more populist in order to promote the interest and needs of ordinary people. The bottom-up strategy development with a basic populist concept has a primary goal to equalize the interest and welfare of ordinary people, instead of emphasizing the levels of economic development. This strategy, is an effort to optimizing the distribution of its own natural resources, thus the development will correspond with the potency and specific issues of each region.

Pendahuluan

Pada saat Indonesia masih menikmati pertumbuhan ekonomi tinggi pada awal dasawarsa 1990-an, tidak sedikit ekonom yang meragukan kemampuan Indonesia untuk mempertahankan tingkat pertumbuhan ekonomi tersebut. Terlepas dari persoalan *moral hazard* dan *rent seeking behavior* yang terdapat pada sebagian besar pelaku ekonomi di Indonesia, para ekonom yang masuk dalam aliran pesimistis tersebut berpandangan bahwa Indonesia telah salah dalam

mengambil strategi pembangunan ekonomi. Hill (1996) mengemukakan bahwa dalam kurun waktu 1966 sampai dengan akhir tahun 1970-an, para ekonom di Indonesia telah berhasil mengembangkan sektor industri dengan penuh kehati-hatian dan disesuaikan dengan kondisi makro ekonomi yang ada. Namun, sejak awal tahun 1990-an perkembangan industri tersebut berubah dengan lebih menekankan pada industri berteknologi tinggi. Dampaknya adalah terjadi

* Prof. Dr. Prijono Tjiptoherijanto, Guru Besar Tetap pada Fakultas Ekonomi, Universitas Indonesia dan Kepala Badan Kepegawaian Nasional.

tekanan yang sangat berlebihan pada pembiayaan yang harus ditanggung oleh pemerintah.*

Apa yang dapat dipelajari dari krisis ekonomi yang berlangsung saat ini adalah bahwa Indonesia telah mengambil strategi pembangunan ekonomi yang tidak sesuai dengan potensi serta kondisi yang dimiliki. Walaupun pada saat ini indikator makro ekonomi seperti tingkat inflasi serta pertumbuhan ekonomi telah menunjukkan ke arah perbaikan, terlalu dini untuk mengatakan telah terjadi perkembangan ekonomi secara fundamental. Lagi pula, tidak ada suatu jaminan bahwa Indonesia tidak akan kembali mengalami krisis pada masa mendatang jika faktor-faktor mendasar belum tersentuh sama sekali. Ketergantungan terhadap pinjaman luar negeri, yang dipandang sebagai pangkal permasalahan krisis ekonomi saat ini, masih belum dapat diselesaikan. Bahkan, ada kecenderungan bahwa ketergantungan Indonesia terhadap pinjaman luar negeri ini menjadi semakin mendalam.

Ketergantungan terhadap pinjaman luar negeri tersebut tidak akan berkurang jika pemerintah tidak melakukan perubahan mendasar terhadap strategi pembangunan ekonomi yang ada pada saat ini. Diperlukan suatu strategi baru dalam pembangunan ekonomi dengan mengedepankan pembangunan ekonomi berwawasan kependudukan.

Pengertian Pembangunan Berwawasan Kependudukan

Apa yang dimaksud dengan pembangunan berwawasan kependudukan? Secara sederhana pembangunan berwawasan kependudukan mengandung dua makna sekaligus yaitu, pertama, pembangunan berwawasan kependudukan adalah pembangunan yang disesuaikan dengan potensi dan kondisi penduduk yang ada. Penduduk harus dijadikan titik sentral dalam proses pembangunan. Penduduk harus dijadikan subjek dan objek dalam pembangunan. Pembangunan adalah oleh penduduk

* Demikian pula ekonom Amerika Serikat, Paul Krugman (1997), mengatakan bahwa krisis ekonomi di Asia, termasuk di Indonesia, sebenarnya sudah dapat diduga sebelumnya. Krisis mata uang yang terjadi pada pertengahan tahun 1997 hanyalah pencetus dan bukan penyebab. Penyebab sesungguhnya adalah pada kesalahan strategi pembangunan ekonomi di samping adanya masalah *moral hazard*.

dan untuk penduduk. Makna kedua dari pembangunan berwawasan kependudukan adalah pembangunan sumber daya manusia. Pembangunan lebih menekankan pada peningkatan kualitas sumber daya manusia dibandingkan dengan pembangunan infrastruktur semata-mata.

Jargon pembangunan berwawasan kependudukan sudah lama didengar dalam bentuk atau format lain, tetapi masih mengalami banyak hambatan dalam pelaksanaannya. Sudah lama didengung-dengungkan mengenai penduduk sebagai subjek dan objek pembangunan, atau jargon mengenai pembangunan manusia Indonesia seutuhnya, atau pembangunan bagi segenap rakyat. Sudah saatnya jargon tersebut diimplementasikan dengan sungguh-sungguh jika tidak ingin mengalami krisis ekonomi yang lebih hebat lagi pada masa mendatang. Dengan demikian, indikator keberhasilan ekonomi harus diubah dari sekedar GNP atau GNP per kapita menjadi aspek kesejahteraan atau memakai terminologi UNDP adalah Indeks Pembangunan Manusia (HDI), Indeks Kemiskinan Sosial (HPI), dan Indeks Pemberdayaan Gender (GEM),

dan sejenisnya. Memang, mempergunakan strategi pembangunan berwawasan kependudukan untuk suatu pembangunan ekonomi akan memperlambat tingkat pertumbuhan ekonomi. Namun, ada suatu jaminan bahwa perkembangan ekonomi yang dicapai akan lebih berkesinambungan (*sustainable*). Sebaliknya, pertumbuhan ekonomi yang tinggi hanya akan membawanya pada peningkatan ketimpangan pendapatan. Industrialisasi dan liberalisasi yang terlalu cepat akan meningkatkan efisiensi dan produktivitas, tetapi sekaligus juga meningkatkan jumlah pengangguran dan setengah menganggur.

Mengapa selama ini Indonesia mengabaikan pembangunan berwawasan kependudukan? Hal ini tidak lain karena keinginan pemerintah untuk mempertahankan laju pertumbuhan ekonomi yang harus senantiasa tinggi. Pertumbuhan ekonomi menjadi satu-satunya ukuran keberhasilan pembangunan nasional. Walaupun Indonesia memiliki wawasan trilogi pembangunan yaitu pertumbuhan, pemerataan, dan stabilitas, pada kenyataannya pertumbuhan senantiasa mendominasi strategi pembangunan nasional. Karena mengabaikan aspek pemerataan pembangunan

akhirnya muncul keadaan instabilitas dan kesenjangan antara golongan dan wilayah.

Strategi pembangunan yang bertumpu pada pertumbuhan tanpa melihat potensi penduduk yang ada nyatanya tidaklah berlangsung secara berkesinambungan. Jika dikaitkan dengan krisis ekonomi dewasa ini, terjadinya krisis tersebut tidak lepas dari kebijakan ekonomi yang kurang memperhatikan dimensi kependudukan. Strategi ekonomi makro yang tidak dilandasi pada situasi/kondisi ataupun potensi kependudukan yang ada menyebabkan pembangunan ekonomi tersebut menjadi sangat rentan terhadap perubahan. Belum terjadi strategi pembangunan yang berorientasi serius pada aspek kependudukan selama ini.

Dimensi Penduduk dalam Pembangunan Nasional

Ada beberapa alasan yang melandasi pemikiran bahwa penduduk merupakan isu yang sangat strategis dalam kerangka pembangunan nasional. Berbagai pertimbangan tersebut adalah sebagai berikut.

Pertama, penduduk merupakan pusat dari seluruh kebijakan dan program pembangunan yang

dilakukan. Dalam GBHN dengan jelas dikemukakan bahwa penduduk adalah *subjek* dan *objek* pembangunan. Sebagai subjek pembangunan maka penduduk harus dibina dan dikembangkan agar mampu menjadi penggerak pembangunan. Sebaliknya, pembangunan juga harus dapat dinikmati oleh penduduk yang bersangkutan. Dengan demikian, pembangunan harus dikembangkan dengan memperhitungkan kemampuan penduduk agar seluruh penduduk dapat berpartisipasi aktif dalam dinamika pembangunan tersebut. Sebaliknya, pembangunan baru dapat dikatakan berhasil jika mampu meningkatkan kesejahteraan penduduk dalam arti luas yaitu kualitas fisik maupun nonfisik yang melekat pada diri penduduk itu sendiri.

Kedua, keadaan penduduk yang ada sangat mempengaruhi dinamika pembangunan yang sedang dilaksanakan oleh pemerintah. Jumlah penduduk yang besar, jika diikuti dengan kualitas penduduk yang memadai, akan merupakan pendorong bagi pertumbuhan ekonomi. Sebaliknya, jumlah penduduk yang besar, jika diikuti dengan tingkat kualitas yang rendah, menjadikan penduduk tersebut hanya sebagai beban bagi

pembangunan nasional. Iskandar (1974) memperkirakan bahwa tanpa adanya program pengendalian pertumbuhan penduduk maka jumlah penduduk Indonesia pada tahun 1995 akan berjumlah 237 juta jiwa. Kenyataannya, jumlah penduduk pada tahun tersebut adalah sekitar 194 juta jiwa. Dengan demikian, program pengendalian pertumbuhan penduduk telah berhasil melakukan penghematan untuk berbagai pengeluaran bagi sekitar 43 juta jiwa penduduk. Pengeluaran tersebut dapat digunakan untuk program lain yang bermanfaat bagi peningkatan kualitas penduduk, seperti kesehatan dan pendidikan, yang sangat diperlukan untuk investasi pada masa mendatang.

Ketiga, dampak perubahan dinamika kependudukan baru akan terasa dalam jangka yang panjang. Karena dampaknya baru terasa dalam jangka waktu yang panjang, seringkali peranan penting penduduk dalam pembangunan terabaikan. Sebagai contoh, beberapa ahli kesehatan memperkirakan bahwa krisis ekonomi dewasa ini akan memberikan dampak negatif terhadap kesehatan seseorang pada 25 tahun ke depan atau satu generasi.

Dengan demikian, dapat dibayangkan bagaimana kondisi sumber daya manusia Indonesia pada generasi mendatang, yaitu pada tahun 2022. Demikian pula, hasil program keluarga berencana yang dikembangkan selama 30 tahun yang lalu (1968), baru dapat dinikmati dalam beberapa tahun terakhir ini. Dengan demikian, tidak dimasukkannya dimensi kependudukan dalam kerangka pembangunan nasional sama artinya dengan *menyengsarakan* generasi penduduk pada masa mendatang.

Perhatian pemerintah terhadap kependudukan dimulai sejak pemerintah Orde Baru memegang kendali. Konsep *pembangunan manusia seutuhnya*, yang tidak lain adalah konsep *pembangunan kependudukan*, mulai diterapkan dalam perencanaan pembangunan Indonesia yang sistematis dan terarah sejak Repelita I pada tahun 1969. Namun sedemikian jauh, walaupun pada tataran kebijakan telah secara sungguh-sungguh mengembangkan konsep pembangunan yang berwawasan kependudukan, pemerintah tampaknya belum dapat secara optimal mengimplementasikan dan mengintegrasikan kebijakan

tersebut dalam berbagai program sektoral.*

Mengintegrasikan Kependudukan dalam Perencanaan Pembangunan

Pembangunan kependudukan adalah pembangunan sumber daya manusia. Berbagai studi dan literatur memperlihatkan bahwa kualitas sumber daya manusia memegang peranan penting dalam mendorong pertumbuhan ekonomi suatu negara. Dalam jangka pendek investasi dalam sumber daya manusia tampak sebagai suatu upaya yang sia-sia. Namun, dalam jangka panjang investasi tersebut justru mendorong pertumbuhan ekonomi. Johnson dan Lee (1987) melakukan analisis dengan model regresi antara pertumbuhan penduduk dengan pertumbuhan ekonomi pada 75 negara berkembang. Dua ukuran pertumbuhan ekonomi yang digunakan yaitu GNP pada tahun 1989 dan GNP per kapita antara tahun 1980–1989. Pertumbuhan penduduk dibagi menjadi

dua bagian, pertumbuhan penduduk masa lalu, yaitu pertumbuhan penduduk per tahun antara 1965–1980 dan pertumbuhan penduduk saat ini, yaitu pertumbuhan penduduk per tahun antara tahun 1980–1989. Pembagian ini dilakukan untuk mengetahui dampak jangka pendek dan jangka panjang dari pertumbuhan penduduk itu terhadap pertumbuhan ekonomi. Studi tersebut menemukan hubungan bahwa pertumbuhan penduduk yang tinggi antara tahun 1980–1989 berhubungan dengan rendahnya GNP per kapita pada tahun 1989 dan berhubungan dengan rendahnya pertumbuhan GNP antara tahun 1980–1989.

Demikian pula, berbagai studi dan literatur memperlihatkan bahwa investasi dalam kesehatan dan pendidikan dalam jangka panjang berdampak positif pada pertumbuhan ekonomi. Studi yang dilakukan oleh Rosenzweig (1998) misalnya menemukan hubungan positif sebesar 0,49

* Sejah ini walaupun disebutkan dalam GBHN bahwa pembangunan nasional adalah pembangunan sumber daya manusia seiring dengan pembangunan ekonomi, dalam kenyataannya pembangunan nasional masih terlalu terfokus pada pembangunan ekonomi. Di samping itu, tampak jelas bahwa pemilihan sasaran pembangunan ekonomi, khususnya pengembangan industri, dalam banyak kasus tidak memperhatikan dan memperhitungkan kondisi kependudukan yang ada.

antara *enrollment rate* sekolah dasar dari wanita usia 10–14 tahun terhadap peningkatan GNP per kapita. Demikian pula ditemukan hubungan positif sebesar 0,54 antara tingkat melek huruf dengan pertumbuhan GNP per kapita. Studi tersebut dilakukan atas data makro dari 94 negara berkembang.

Dalam hal mengintegrasikan dimensi penduduk dalam perencanaan pembangunan daerah maka manfaat paling mendasar yang diperoleh adalah besarnya harapan bahwa penduduk yang ada di daerah tersebut menjadi pelaku pembangunan dan penikmat hasil pembangunan. Itu berarti bahwa pembangunan berwawasan kependudukan lebih berdampak besar pada peningkatan kesejahteraan penduduk secara keseluruhan dibandingkan dengan orientasi pembangunan ekonomi yang berorientasi pada pertumbuhan. Dalam pembangunan berwawasan kependudukan, ada suatu jaminan akan keberlangsungan proses pembangunan. Pembangunan berwawasan kependudukan menekankan pada pembangunan lokal, perencanaan berasal dari bawah (*bottom up planning*), disesuaikan dengan kebutuhan dan kondisi masyarakat lokal, dan yang lebih penting

adalah melibatkan masyarakat dalam proses perencanaan.

Sebaliknya, orientasi pembangunan pada pertumbuhan ekonomi yang tinggi akan membawa pada peningkatan ketimpangan pendapatan. Industrialisasi dan liberalisasi yang terlalu cepat memang akan meningkatkan efisiensi dan produktivitas, tetapi sekaligus juga meningkatkan jumlah pengangguran dan setengah menganggur, sebagaimana yang terlihat selama ini di Indonesia. Demikian pula, dalam pertumbuhan ada yang dinamakan dengan *limit to growth*. Konsep ini mengacu pada kenyataan bahwa suatu pertumbuhan ada batasnya. Jika batas itu terlampaui, yang akan terjadi adalah terjadinya pemusnahan atas hasil-hasil pembangunan tersebut. Tampaknya ini yang sedang berlangsung di Indonesia dengan terjadinya krisis ekonomi sekarang ini. Jika diingat beberapa tahun yang lalu, selalu ada peringatan bahwa perekonomian kita terlalu memanas dan lain sebagainya. Hal itu adalah kata lain bahwa pertumbuhan ekonomi kita sedang memasuki apa yang disebut dengan *limit to growth*, bahwa pertumbuhan ekonomi tersebut tidak dapat dipacu lebih

tinggi lagi dengan melihat kondisi fundamental yang ada.

Ada beberapa kritik lagi yang ditujukan kepada konsep pembangunan yang berorientasi pada pertumbuhan yaitu 1) prakarsa biasanya dimulai dari pusat dalam bentuk rencana formal, 2) proses penyusunan program bersifat statis dan didominasi oleh pendapat pakar dan teknokrat, 3) teknologi yang digunakan biasanya bersifat *scientific* dan bersumber dari luar, 4) mekanisme kelembagaan bersifat *top-down*, 5) pertumbuhannya cepat, tetapi bersifat mekanistik, 6) organisatornya adalah para pakar spesialis, dan 7) orientasinya adalah bagaimana menyelesaikan program/proyek secara cepat sehingga mampu menghasilkan pertumbuhan. Dengan memperhatikan kriteria tersebut, tampak bahwa peranan penduduk lokal dalam proses pembangunan sangat sedikit.

Kritik para ahli terhadap orientasi pembangunan yang mengutamakan pada pertumbuhan tersebut telah berlangsung pada paro waktu pertama tahun 1980-an. Para cendekiawan dari MIT dan *Club of Rome* pada kurun waktu tersebut secara gencar mengkritik orientasi pembangunan ekonomi tersebut. Dari berbagai kajian dan diskusi

tersebut, muncullah perspektif pembangunan yang kemudian dikenal dengan konsep pembangunan berkelanjutan (*sustainable development*). Konsep pembangunan berkelanjutan dapat didefinisikan sebagai pembangunan untuk memenuhi kebutuhan pada saat ini tanpa mengorbankan kebutuhan generasi mendatang. Dalam konsep pembangunan berkelanjutan, secara implisit terkandung makna pentingnya memperhatikan aspek penduduk dalam pelaksanaan pembangunan.

Pembangunan berwawasan kependudukan menuntut strategi pembangunan yang bersifat *bottom-up planning*. Melalui pendekatan ini, tujuan utama seluruh proses pembangunan adalah lebih memeratakan kesejahteraan penduduk daripada mementingkan tingkat pertumbuhan ekonomi. Oleh karena itu, pendekatan *bottom-up* berupaya mengoptimalkan penyebaran sumber daya yang dimiliki dan potensial ke seluruh wilayah dan membangun sesuai dengan potensi dan masalah khusus yang dihadapi oleh daerah masing-masing.

Pada saat ini banyak pemerintah di negara-negara berkembang mengikuti aliran

bottom-up planning dengan maksud lebih menyeimbangkan pelaksanaan pembangunan, dalam arti memanfaatkan ruang dan sumber daya secara lebih efisien. Pendekatan *bottom-up* mengisyaratkan kebebasan daerah atau wilayah untuk merencanakan pembangunan sesuai dengan keperluan dan keadaan daerah masing-masing. Oleh karena itu, otonomi yang seluas-luasnya perlu diberikan kepada setiap daerah agar mampu mengatur dan menjalankan berbagai kebijakan yang dirumuskan sendiri guna peningkatan kesejahteraan masyarakat di daerah atau kawasan yang bersangkutan. Melalui otonomi daerah, yang berarti adalah desentralisasi pembangunan, maka laju pertumbuhan antardaerah akan semakin seimbang dan serasi sehingga pelaksanaan pembangunan nasional serta hasilnya semakin merata di seluruh Indonesia.

Beberapa kata kunci yang perlu diberikan penekanan pada pembangunan daerah adalah 1) pembangunan daerah disesuaikan dengan prioritas dan potensi setiap daerah, dan 2) ada keseimbangan pembangunan antardaerah. Kata kunci pertama mengandung makna pada

kesadaran pemerintah untuk melakukan desentralisasi pembangunan, terutama berkaitan dengan beberapa sektor pembangunan yang dipandang sudah mampu dilaksanakan di daerah masing-masing. Hal ini berarti bahwa pengambilan keputusan pembangunan berada pada tingkat daerah.

Kata kunci kedua mengandung makna adanya kenyataan bahwa setiap daerah memiliki potensi, baik alam, sumber daya manusia, maupun kondisi geografis yang berbeda-beda, yang menyebabkan ada daerah yang memiliki potensi untuk berkembang secara cepat dan sebaliknya ada daerah yang kurang dapat berkembang karena berbagai keterbatasan yang dimilikinya. Adanya perbedaan potensi antardaerah ini menyebabkan peran pemerintah pusat sebagai pengatur kebijakan pembangunan nasional tetap diperlukan agar timbul keselarasan, keseimbangan, dan keserasian perkembangan semua daerah, baik yang memiliki potensi yang berlebihan maupun yang kurang memiliki potensi. Dengan demikian, melalui otonomi dalam pengaturan pendapatan, sistem pajak, keamanan warga, sistem perbankan, dan berbagai pengaturan

lain yang diputuskan daerah sendiri, pembangunan setempat dijalankan.

Ada beberapa ciri kependudukan Indonesia pada masa depan yang harus dicermati dengan benar oleh para perencana pembangunan, baik di tingkat pusat maupun di tingkat daerah. Beberapa ciri penduduk pada masa depan adalah sebagai berikut.

1. Pendidikan yang meningkat.

Penduduk yang makin berpendidikan dan sehat akan membentuk sumber daya manusia yang makin produktif. Tantangannya adalah menciptakan lapangan kerja yang memadai sebab bila tidak, jumlah penganggur yang makin berpendidikan akan bertambah. Keadaan ini dengan sendirinya merupakan pemborosan terhadap investasi nasional karena sebagian besar dana tercurah dalam sektor pendidikan, di samping kemungkinan terjadinya implikasi sosial lainnya yang mungkin timbul.

2. Peningkatan kesehatan. Usia harapan hidup yang tinggi dan jumlah penduduk usia lanjut yang semakin besar akan juga menuntut kebijakan-kebijakan yang serasi dan sesuai dengan perubahan tersebut. Suatu tantangan pula untuk dapat

memanfaatkan penduduk usia lanjut yang berpotensi agar dapat dimanfaatkan sesuai dengan pengetahuan dan pengalamannya.

3. Pergeseran usia. Pada saat ini di Indonesia telah terjadi proses transisi umur penduduk dari penduduk muda ke penduduk tua (*ageing process*). Pergeseran struktur umur muda ke umur tua akan membawa konsekuensi peningkatan pelayanan pendidikan, terutama pendidikan tinggi dan kesempatan kerja. Pergeseran struktur umur produktif ke umur tua pada akhirnya akan mempunyai dampak terhadap persoalan penyantunan penduduk usia lanjut. Bersamaan dengan perubahan sosial ekonomi diperkirakan akan terjadi pergeseran pola penyantunan usia lanjut dari keluarga kepada institusi. Apabila hal ini terjadi, tanggung jawab pemerintah akan menjadi semakin berat.

4. Jumlah penduduk perkotaan semakin banyak. Seiring dengan peningkatan status sosial ekonomi masyarakat, persentase penduduk yang tinggal di perkotaan meningkat dari tahun ke tahun. Urbanisasi ini akan menjadi masalah yang semakin rumit.

Penduduk perkotaan akan bertambah terus sejalan dengan pertumbuhan penduduk. Dengan demikian, tuntutan fasilitas perkotaan akan bertambah pula. Tambahan volume fasilitas perkotaan akan sangat berpengaruh terhadap keadaan dan perkembangan fisik kota yang bersangkutan. Meningkatnya sarana perhubungan dan komunikasi antardaerah, termasuk di perdesaan, menyebabkan orang dari perdesaan tidak perlu lagi melakukan migrasi dan berdiam di perkotaan. Mereka cukup menuju perkotaan manakala diperlukan. Ini dapat dilakukan oleh mereka dalam kurun waktu harian, mingguan, bahkan bulanan. Dengan semakin berkembangnya sarana transportasi dan komunikasi, pola mobilitas penduduk seperti itu akan semakin banyak dilakukan, sementara migrasi permanen cenderung akan semakin berkurang.

5. **Jumlah rumah tangga meningkat, struktur semakin kecil.** Perubahan pola kelahiran dan kematian akan berpengaruh pada struktur rumah tangga. Pada masa depan ukuran rumah tangga akan semakin mengecil, tetapi

jumlahnya akan semakin banyak. Dengan makin mengecilnya jumlah anak yang disertai dengan peningkatan kesehatan penduduk, seiring dengan tingkat pendidikan dan keterampilan yang lebih baik, tercipta kesempatan pula bagi individu maupun keluarga untuk melakukan mobilitas ke daerah lain, apalagi bila otonomi daerah dilaksanakan sesuai dengan aturan dan keperluannya.

6. **Peningkatan intensitas mobilitas.** Mobilitas penduduk yang tinggi, baik secara internal maupun internasional, menuntut jaringan prasarana yang makin baik dan luas, serta akan bergeser kepada pergeseran norma-norma masyarakat, seperti ikatan keluarga dan kekerabatan. Kesemuanya ini dapat membawa dampak yang berjangka panjang terhadap perubahan sosial budaya masyarakat.
7. **Tingginya pertumbuhan angkatan kerja.** Sejalan dengan pertumbuhan penduduk yang tinggi, maka laju pertumbuhan angkatan kerjanya pun cukup tinggi. Permasalahan yang ditimbulkan oleh besarnya jumlah dan pertumbuhan angkatan kerja tersebut di satu pihak menuntut kesempatan kerja yang

lebih besar, di pihak lain menuntut pembinaan angkatan kerja agar mampu menghasilkan keluaran yang lebih tinggi sebagai prasyarat untuk memasuki era globalisasi.

8. **Perubahan lapangan kerja.** Sejalan dengan perkembangan ekonomi dan pembangunan pada umumnya, lapangan pekerjaan penduduk berubah dari yang bersifat primer, seperti pertanian, pertambangan, menuju lapangan pekerjaan sekunder atau bangunan, dan pada akhirnya akan menuju lapangan kerja tersier atau sektor jasa. Berbagai ciri dan fenomena di atas sudah sepantasnya diamati secara seksama, terutama dalam rangka menetapkan alternatif kebijakan selanjutnya.

Penutup

Krisis ekonomi pada saat ini telah berhasil memberikan pelajaran bahwa pembangunan yang menitikberatkan pada pertumbuhan dan dilakukan tanpa memperhatikan kondisi dan potensi penduduk tidak akan bersifat berkesinambungan. Pada masa krisis dan pascakrisis ekonomi, perhatian terhadap masalah kependudukan harus tetap dilakukan, terutama menyangkut upaya mengem-

bangkan pembangunan berwawasan kependudukan (*people-centered-development*). Ketidakpedulian terhadap isu pembangunan berwawasan kependudukan akan menyebabkan Indonesia kembali menghadapi situasi krisis yang sama pada beberapa tahun mendatang. Hal ini perlu diwaspadai dan sedapat mungkin dihindari.

Dalam kondisi keuangan negara yang semakin terbatas dan dengan derasnya tuntutan politik dalam dan luar negeri, perencanaan pembangunan yang bersifat *bottom-up* menjadi sangat penting. Dalam hal ini setiap daerah dituntut harus dapat memanfaatkan keuangan negara yang semakin terbatas untuk mencapai tujuan pembangunan, yaitu meningkatkan kesejahteraan masyarakat di daerahnya.

Pembangunan yang hanya mengejar pertumbuhan terbukti tidak berlangsung secara berkesinambungan dan tidak dinikmati oleh seluruh masyarakat sehingga filosofi penduduk sebagai subjek dan objek pembangunan tidak tercapai. Pembangunan tidak dirasakan sebagai milik rakyat sehingga tidak mengakar. Apa yang terjadi kemudian adalah jika terjadi sedikit gejolak (seperti yang sedang dialami pada saat ini),

gejolak tersebut menjadi sulit diatasi, dan masyarakat menjadi kurang berpartisipasi dalam mengatasinya. Hal ini disebabkan mereka tidak pernah merasa memiliki hasil pembangunan itu.

Oleh karena itu, apa yang terjadi pada saat ini kiranya dapat menjadi pelajaran yang sangat berharga, terutama bagi perencanaan dan pelaksana pembangunan

di daerah tingkat II sebagai ujung tombak pembangunan nasional pada masa mendatang. Merencanakan dan melaksanakan pembangunan harus melihat pada kondisi, potensi, dan kebutuhan nyata yang ada pada masyarakat di daerah masing-masing; tidak perlu selalu berpatokan dari apa yang terjadi di daerah lain, atau bahkan menunggu arahan pusat.

Referensi

- Ananta, Aris, Ismail Budhiarso dan Turro S. Wongkaren. 1995. "Revolusi demografi dan peningkatan sumber daya manusia," dalam Mohamad Arsyad Anwar, Faisal H. Basri, Mohamad Ikhsan (eds.), *Prospek Ekonomi Indonesia Jangka Pendek: Sumber Daya, Teknologi dan Pembangunan*. Jakarta: Kerja sama Fakultas Ekonomi Universitas Indonesia dengan Penerbit Gramedia Pustaka Utama.
- Hill, Hal. 1996. *Transformasi Ekonomi Indonesia Sejak 1966: Sebuah Studi Kritis dan Komprehensif*. Yogyakarta: PAU (Studi Ekonomi) UGM dan PT. Tiara Wacana.
- Iskandar, N. 1974. "Beberapa aspek permasalahan kependudukan di Indonesia", *special Reprint Series No.4*, Demographic Institute FE UI Jakarta, January, p.19.
- Johnson, D.G. and Lee, Ronald. 1987. *Population Growth and Economic Development Issues and Evidences*. Madison, WI: University of Wisconsin Press, USA.
- Kantor Menteri Negara Kependudukan/BKKBN. 1994. *Indonesia Country Report Population and Development*. Jakarta.
- Kantor Menteri Negara Kependudukan/BKKBN. 1997. *Draft Repelita VII Bidang Kependudukan*. Jakarta.

- Krugman, Paul. 1994. "The myth of Asia miracle", *Fortune*, November.
- Krugman, Paul. 1997. "What happened to Asia miracle", *Fortune*, November.
- Menteri Negara Kependudukan/ Kepala BKKBN. 1998. "Strategi kebijaksanaan kependudukan," *ceramah di SESKO ABRI, Bandung*, 6 Nopember.
- Rosenzweig, Mark R. 1998, "Human capital, population growth, and economic development", *Journal of Policy Modelling*, Special Issue on Population Growth and Economic Development.
- Tjiptoherijanto, Prijono. 1999. "Economic crisis and recovery: the Indonesia's case," *The EWCA Regional Conference in the Philippines on Asia and the Pacific in the Millenium: Challenges, Opportunities & Responses*, Manila, Phillippines, 28-29 January.
- Tjokrowinoto, Moeljarto. 1996. *Pembangunan: Dilema dan Tantangan*. Jakarta: Pustaka Pelajar.

SENSUS PENDUDUK DI INDONESIA

Tukiran*

Abstract

Although the population registration in Indonesia has long been put through, the result is still unreliable, thus population census should be considered as a major source in providing data of population and households. Since its independent status, Indonesia has carried out the census for five times: in 1961, 1971, 1980, 1990, and in 2000 with the goals of providing a considerable amount of details of population data such as: buildings and households, villages potential (potensi desa or podes), and main pattern frames for survey and others census applications.

The collected data contain information of households and individuals by the census taking system both de jure and de facto for the entire population of Indonesia, including those living abroads such as diplomatic corps with their family members. For the 2000 population census of Indonesia or SP 2000, the data of household and population by temporary residence status, have been put through by the national Central Bureau of Statistic, whereas the data of those by permanent residence status have been carried out by the Regional Central Bureau of Statistic, which are all predicted would be finished before the end of the year of 2000.

Pendahuluan

Ada tiga metode yang sering digunakan dalam pengumpulan data kependudukan yaitu sensus, survai, dan registrasi. Pengumpulan data dengan metode sensus adalah pencacahan secara menyeluruh terhadap penduduk yang ada pada suatu daerah tertentu dan pada waktu tertentu

pula. Pengumpulan data dengan metode survai adalah pencacahan yang dilakukan hanya sebagian dari penduduk yang ada pada suatu daerah dan waktu tertentu. Pengumpulan data dengan metode registrasi adalah pengumpulan data yang dilakukan secara terus-menerus atau dari waktu ke

* Drs. Tukiran, M.A, adalah peneliti Pusat Penelitian Kependudukan, Universitas Gadjah Mada dan pengajar Fakultas Geografi, Universitas Gadjah Mada, Yogyakarta.

waktu untuk penduduk yang ada. Pengumpulan data dengan metode sensus seperti sensus penduduk, sensus pertanian, dan sensus ekonomi/industri menurut United Nations (1969) sebaiknya dilakukan setiap 10 tahun sekali. Untuk sensus penduduk dilaksanakan pada tahun yang berakhir dengan digit akhir 0, sensus pertanian biasanya dengan digit akhir 3, dan sensus ekonomi/industri berakhir dengan digit akhir 6. Ketentuan tentang waktu penyelenggaraan ini dimaksudkan untuk memudahkan analisis perbandingan yang bersifat internasional. Indonesia dengan berbagai alasan pernah melakukan perubahan waktu dalam melaksanakan Sensus Penduduk (SP) yaitu SP 1961 dan SP 1971, dilaksanakan pada tahun yang berakhir dengan digit akhir 1, yang kemudian dilaksanakan kembali dengan tahun yang berakhir dengan digit akhir 0 (nol) mulai dari SP 1980.

Ada dua hal yang perlu diperhatikan dalam sensus penduduk yakni sensus penduduk secara lengkap (*overall*) dan sensus penduduk yang hanya mengambil sampel seperti yang digunakan dalam survei kependudukan (*susenas*, *sakernas*, dll). Informasi yang dikumpulkan dalam SP lengkap sangat terbatas

dan hanya data yang sifatnya mendasar, seperti halnya susunan anggota rumah tangga, umur, jenis kelamin, status perkawinan, dan kewarganegaraan. Informasi yang lebih rinci hanya ditanyakan kepada sebagian penduduk atau lebih dikenal hanya mengambil sampel dari hasil SP lengkap. Besar kecilnya jumlah sampel yang ada pada pencacahan sampel (SP sampel) akan berpengaruh pada analisis menurut tingkat administrasi seperti propinsi, kabupaten, kecamatan, dan desa/kelurahan. Untuk melengkapi data yang ada pada rumah tangga dan individu, sejak SP 1980 dilakukan pula pengumpulan data yang menyangkut potensi geografis, sosial ekonomi, dari semua desa yang ada melalui daftar potensi desa (*podes*). Informasi yang dikumpulkan pada *podes* berlaku untuk seluruh desa/kelurahan di Indonesia. Data potensi desa mencakup beberapa aspek yaitu profil desa/kelurahan, kependudukan, lingkungan hidup, perumahan dan permukiman, pendidikan, sosial budaya, rekreasi dan hiburan, kesehatan, gizi dan keluarga berencana, perhubungan, penggunaan lahan, ekonomi, dan keamanan.

Hampir di semua negara, sensus penduduk merupakan

sumber utama data kependudukan. Indonesia meskipun sudah melaksanakan pencacahan statistik vital, hasilnya belum begitu baik. Sebagai akibatnya, data sensus penduduk merupakan tonggak referensi waktu yang sekaligus merupakan pengendali data yang diperoleh dari survai kependudukan yang lain (McDonald, 1984). Perlu diingat bahwa tujuan dari sensus penduduk dari waktu ke waktu tidak mengalami perubahan yang mendasar. Paling tidak ada empat hal yang ingin dicapai dari sensus penduduk yakni pertama, menyediakan data dasar kependudukan dan perumahan, khusus untuk SP 2000 data dicatat sampai dengan wilayah administrasi yang terkecil (desa/kelurahan). Kedua, menyediakan data kependudukan untuk estimasi parameter kependudukan. Ketiga, menyediakan data potensi desa (podes). Keempat, menyusun kerangka contoh induk (KCI) yang akan digunakan sebagai dasar perencanaan sensus ataupun survai lain sebelum sensus penduduk berikutnya (BPS, 1999). Tulisan ringkas ini membahas dinamika pelaksanaan sensus penduduk di Indonesia mulai dari tahun 1961, 1971, 1980, 1990, sampai 2000, terutama ketersediaan data yang ada pada sensus penduduk,

termasuk di dalamnya berbagai kemungkinan untuk melakukan analisis perbandingan antar-sensus, tingkatan analisis wilayah administrasi dari data sensus lengkap dan sensus sampel. Dibahas pula berbagai kendala yang akan dihadapi oleh pengguna data sebagai akibat ditiadakannya sensus sampel pada SP 2000.

Sensus Penduduk di Indonesia

Pelaksanaan sensus penduduk (SP) di Indonesia dapat dibedakan dalam dua periode yakni sebelum kemerdekaan (1815–1945) dan setelah Indonesia merdeka (1961–2000). Sensus penduduk yang pertama kali diadakan di Indonesia sebelum Indonesia merdeka ialah pada tahun 1815 dan selama 1815–1930, yakni selama 115 tahun, telah dilaksanakan sepuluh kali sensus penduduk. Dari kesepuluh sensus penduduk ini, hanya tiga periode yang cukup baik dalam pelaksanaannya yaitu yang dilaksanakan pada tahun 1905, 1920, dan 1930. Dari ketiga periode ini, hanya SP 1930 yang kualitas datanya cukup baik dan banyak digunakan sebagai referensi dalam analisis kependudukan di Indonesia. Pelaksanaan SP 1930 dipercayakan kepada Biro Pusat

Statistik yang didirikan pada tahun 1925. Pada masa pendudukan Jepang (1942–1945) sensus penduduk dilakukan pada tingkat lokal, tetapi semua dokumen hasil sensus penduduk ini hilang, kecuali untuk Propinsi Kalimantan Barat dan Pulau Lombok (Mantra, 1985: 15–16). Setelah Indonesia merdeka, telah dilaksanakan sensus penduduk sebanyak lima kali yakni SP 1961, SP 1971, SP 1980, SP 1990, dan SP 2000. Berikut ini disajikan pelaksanaan sensus penduduk di Indonesia mulai dari 1961–2000, khususnya waktu pelaksanaan, cakupan wilayah, dan jumlah sensus sampel yang diambil serta ketersediaan data untuk setiap sensus.

Cakupan Wilayah

Sensus Penduduk 1961 merupakan sensus yang pertama kali dilakukan setelah Indonesia merdeka. Namun, pada saat itu wilayah Irian Jaya (dulu Irian Barat) dan Timor-Timur belum bergabung dengan Indonesia. Kedua wilayah ini tidak termasuk dalam SP 1961. Hal yang sama untuk wilayah terpencil, pulau-pulau kecil yang sangat sulit dijangkau, serta beberapa suku terasing, terutama yang ada di luar Jawa-Bali tidak tercakup

dalam sensus dan jumlahnya tidak diketahui. Dengan demikian, hasil SP 1961 belum mencerminkan seluruh wilayah Indonesia, terutama Propinsi Irian Jaya tersebut. Adanya kendala transportasi, komunikasi, dan keamanan di daerah-daerah yang masih terisolasi dan yang sulit dijangkau menyebabkan di beberapa wilayah tidak dilaksanakan pencacahan.

Dengan bergabungnya wilayah Irian Jaya dengan Republik Indonesia serta perkembangan transportasi dan komunikasi maka cakupan wilayah SP 1971 jauh lebih luas daripada sensus sebelumnya. Di Propinsi Irian Jaya, karena pertimbangan keamanan dan keterjangkauan wilayah, hanya dilakukan pencacahan untuk daerah perkotaan. Untuk daerah terpencil, pulau-pulau kecil yang berpenduduk dan suku terasing lebih banyak dilakukan pencacahan daripada sensus sebelumnya. Di Propinsi Timor-Timur tidak dilakukan pencacahan karena belum bergabung dengan Indonesia. Kemudian pada SP 1980 cakupan wilayah pencacahan lebih lengkap lagi karena mencakup Propinsi Irian Jaya (perdesaan dan perkotaan) dan Propinsi Timor-Timur khususnya daerah yang aman dan dapat

dijangkau. Sensus penduduk yang keempat yakni tahun 1990 merupakan salah satu pencacahan penduduk dengan cakupan wilayah yang paling lengkap dibandingkan dengan sensus sebelum dan sesudahnya. Hampir di semua daerah terpencil, suku terasing, pulau-pulau kecil, Irian Jaya, dan Timor-Timur dapat dilakukan pencacahan.

Pada SP 2000 yang lebih dikenal dengan pencacahan penduduk menjelang abad milenium, justru cakupan wilayah pencacahan tidak selengkap dibandingkan dengan periode sebelumnya. Propinsi Timor-Timur sudah terpisah dengan Indonesia dengan meninggalkan problema penduduk pengungsi. Penduduk Timor-Timur yang mengungsi ke wilayah Indonesia sebagai migran terpaksa tidak diketahui jumlahnya. Sama halnya pengungsi Timor Timur yang setuju berintegrasi dengan Indonesia dan sedang mengungsi ke propinsi terdekat, terutama di NTT dan NTB, kemungkinan tidak tercacah dalam sensus. Adanya kerawanan wilayah seperti yang terjadi di Propinsi Aceh, Maluku, Sulawesi Tenggara, Sulawesi Tengah, Kalimantan Barat, dan Irian Jaya akan berpengaruh terhadap kelengkapan cakupan wilayah

pencacahan. Harian *Kompas* terbitan akhir Juli 2000 menyebutkan bahwa sampai menjelang akhir Juli masih ada sekitar 950 blok sensus di Irian Jaya yang belum dapat dilakukan pendataan.

Adanya berbagai problema yang dihadapi dalam hal cakupan wilayah ini memberikan indikasi bahwa pengguna data SP 2000 perlu hati-hati. Sebagai contoh, karena pemisahan Propinsi Timor Timur dengan Indonesia, jumlah penduduk Indonesia untuk tahun sebelumnya (1980 dan 1990) dari hasil sensus perlu direvisi karena terjadi penyusutan wilayah Indonesia. Demikian pula, adanya berbagai kerawanan yang terjadi menjelang pelaksanaan sensus sedikit banyak akan berpengaruh pula terhadap kelengkapan cakupan blok sensus. Sensus Penduduk 2000 yang lebih dikenal dengan pencacahan penduduk secara lengkap justru belum dapat mencakup wilayah yang lebih lengkap dibandingkan dengan tahun-tahun sebelumnya. Pada giliran berikutnya, kekurangan cakupan blok sensus dalam pencacahan penduduk tahun 2000 ini akan banyak dirasakan pada ketersediaan data di unit analisis wilayah yang paling rendah yaitu wilayah perdesaan.

Sistem Pencacahan

Pencacahan penduduk dalam sensus dibedakan menjadi dua cara yakni untuk penduduk yang bertempat tinggal secara menetap dan untuk mereka yang bertempat tinggal tidak menetap. Sebagai contoh pada SP 2000, untuk yang bertempat tinggal menetap dihitung dengan menggunakan daftar SP 2000-L2, sedangkan untuk mereka yang tidak menetap digunakan daftar SP 2000-L3. Hal yang sama juga diberlakukan untuk sensus pada tahun-tahun sebelumnya, dan hanya nama dokumen yang berbeda. Jumlah penduduk hasil SP 2000 dapat diperoleh dengan menjumlahkan yang ada pada daftar isian SP 2000-L2 dan SP 2000-L3. Sebelum dilakukan pencacahan dengan menggunakan daftar isian SP 2000-L2 dan SP 2000-L3, terlebih dahulu dilakukan sensus/pendaftaran. Sensus bangunan dan rumah tangga menggunakan daftar isian SP 2000-L1. Dari daftar ini dapat dilakukan rekapitulasi secara cepat untuk mendapatkan jumlah bangunan, jumlah rumah tangga, dan jumlah penduduk.

Pencacahan penduduk pada sistem sensus sejak 1961, 1970, 1980, 1990, dan 2000 ini menggunakan dua cara berikut ini.

1. Sistem *de jure* ialah pencacahan penduduk di tempat mereka biasanya bertempat tinggal, yaitu tempat yang telah dihuni selama 6 bulan atau lebih atau mereka bertempat tinggal kurang dari 6 bulan, tetapi berkeinginan untuk menetap di daerah tersebut.
2. Sistem *de facto* ialah pencacahan penduduk di tempat mereka ditemui oleh petugas pada waktu pencacahan. Mereka tersebut adalah tunawisma, pengungsi, awak kapal berbendera Indonesia, masyarakat terpencil/terasing, penghuni perahu rumah apung, dan penduduk yang sedang bepergian dan belum pernah dicacah di daerah lain.

Dalam upaya untuk mengetahui adanya perubahan jumlah penduduk yang disebabkan oleh kelahiran dan kematian serta perpindahan yang bersifat permanen, yang terjadi pada saat pencacahan sampai dengan 30 Juni 2000, perlu dilakukan pengecekan ulang (*moment telling*) yang dilakukan pada 1 Juli 2000. Kegiatan pengecekan ulang ini dilakukan setelah pencacahan untuk penduduk yang tidak bertempat tinggal tetap seperti tunawisma, pengungsi, dan sejenisnya (BPS, 1999: 4). Dengan menggunakan sistem pencacahan

gabungan antara *de facto* dan *de jure* serta pengecekan ulang selama sensus dilakukan, diharapkan semua penduduk Indonesia dapat tercacah secara menyeluruh. Pada sensus-sensus sebelumnya, juga dilakukan pengecekan ulang untuk mendapatkan data yang lengkap.

Sistem pencacahan dengan model gabungan ini digunakan pula untuk survai kependudukan lainnya seperti sakernas, susenas kor, dan susenas modul. Pada sisi lain, registrasi/pendaftaran penduduk (RP) menurut sistem atau peraturan dalam pencatatan dan pelaporan, sama dengan sistem SP, semestinya datanya dapat diperbandingkan. Bilamana pendataan penduduk dengan sistem RP ini cukup baik, hasilnya dapat digunakan sampai sensus penduduk berikutnya. Perlu diingat bahwa hasil sensus penduduk merupakan pengendali data. Akan tetapi, dalam pelaksanaan RP, cenderung tidak jelas sistem pencacahan mana yang digunakan. Sebagian ada yang menganut sistem *de jure*, ada pula yang tidak tercacah sama sekali karena petugas RP sangat pasif. Petugas RP mencatat dan melaporkan kalau yang bersangkutan melapor pada petugas. Sistem pencatatan pasif inilah yang menyebabkan data hasil RP

tidak banyak dimanfaatkan dalam perencanaan pembangunan (Tukiran dkk., 1989).

Sensus Lengkap dan Sampel

Sensus Penduduk 2000 merupakan sensus yang pertama kali dilakukan secara lengkap, tanpa menggunakan sampel. Dalam arti semua wilayah yang sudah dipetakan dalam blok sensus dicacah secara menyeluruh dengan daftar pertanyaan yang sama. Hal ini sangat berbeda bila dibandingkan dengan tahun sebelumnya seperti SP 1961, SP 1971, SP 1980, dan SP 1990, yang kesemuanya menggunakan sensus sampel. Sebagai konsekuensi dari sensus lengkap maka seluruh rumah tangga yang ada harus disensus dan seluruh anggota rumah tangga diwawancara dengan menggunakan daftar pertanyaan yang sudah disiapkan. Dengan menggunakan cara sensus lengkap, maka ada sekitar 52 juta rumah tangga yang perlu dicacah, dengan harus menanggung konsekuensi tentang jumlah petugas sensus, biaya, dan akomodasi lainnya. Sebagai akibatnya, Badan Pusat Statistik telah melakukan penyusutan daftar pertanyaan yang cukup banyak sehingga hanya pertanyaan yang sangat penting yang ditanyakan

untuk seluruh anggota rumah tangga.

Selain Sensus Penduduk 2000, seperti pada sensus sebelumnya juga dilakukan sensus bangunan dan rumah tangga secara menyeluruh. Ini berarti bahwa dua pekerjaan besar yakni sensus penduduk dan sensus bangunan dan rumah tangga dilakukan secara menyeluruh tanpa menggunakan sampel. Dibandingkan dengan sensus penduduk tahunan sebelumnya, kesemuanya menggunakan sensus lengkap untuk bangunan dan sensus sampel yang didasarkan dari hasil sensus bangunan, yang berisikan jumlah bangunan dan rumah tangga. Setelah hasil sensus bangunan dan rumah tangga selesai, sensus sampel dapat dilakukan, dengan hanya sebagian dari rumah tangga tersebut yang menjadi sampel dalam sensus penduduk. Jumlah sensus sampel untuk tahun 1961 sekitar 1 persen dari jumlah rumah tangga yang ada. Kemudian, SP 1971 menggunakan sampel sekitar 3,8 persen, SP 1980 dan SP 1990 sekitar 5 persen, dan SP 2000 menggunakan sensus lengkap.

Sekali lagi, pengguna data dihadapkan pada situasi yang kurang menguntungkan, terutama kalau menginginkan analisis antarwaktu seperti data SP 1990

(sensus sampel) dengan SP 2000 (sensus lengkap). Pada SP 1990 dan sebelumnya, hasil sensus sampel tersebut dikalikan atau *blow up* dengan hasil sensus bangunan dan rumah tangga, terutama jumlah jiwa dalam setiap rumah tangga. Hasil yang didapatkan mirip dengan hasil sensus lengkap seperti yang tampak pada berbagai terbitan BPS seri hasil sensus penduduk. Sekiranya perlu diperhatikan, terutama yang melakukan analisis series waktu (1971-1980-1990-2000), di antara rangkaian waktu tersebut ada yang dihasilkan dengan pencacahan lengkap dan pencacahan sampel, di samping cakupan wilayah yang berbeda-beda seperti telah dibahas sebelumnya.

Pelaksanaan Sensus

Sensus Penduduk 1961 dilaksanakan pada Oktober 1961 tanpa rincian tanggal dan penentuan hari sensus (*census date*). SP 1971 dilaksanakan pada 20 September sampai 4 Oktober dengan hari sensus 24 September. SP 1980 dilaksanakan pada 20 September - 30 Oktober dengan hari sensus 31 Oktober. Sensus penduduk 1990 dilaksanakan pada 15 September - 31 Oktober dengan hari sensus 31 Oktober. Sensus

Penduduk 2000 dilaksanakan pada 1-30 Juni dengan hari sensus 30 Juni. Setelah hari sensus, biasanya dilakukan *moment telling*, yang dimaksudkan untuk mengecek kembali perubahan yang terjadi selama pencacahan penduduk dilaksanakan, yaitu kemungkinan ada perubahan jumlah kelahiran, kematian, dan perpindahan. Kegiatan ini dilakukan dengan tujuan untuk menghindari adanya kekurangan dan kelebihan cacah selama sensus dilaksanakan. Sebagai contoh pada SP 2000, yang dilaksanakan selama tanggal 1 sampai 30 Juni 2000, kemungkinan terjadi perubahan dari kelahiran, kematian, dan perpindahan. Perubahan tersebut akan diteliti kembali pada 1 Juli 2000 dan tanggal ini disebut *moment telling*.

Ketersediaan Data

Tujuan dilakukan sensus penduduk ialah untuk menyediakan data dasar kependudukan dan bangunan serta potensi desa. Di samping hal tersebut, dikumpulkan pula data kependudukan yang lebih rinci dan spesifik untuk estimasi parameter kependudukan serta untuk menyusun kerangka contoh induk (KCI) sebagai dasar perencanaan sensus atau

survai lain sebelum sensus berikutnya dilakukan. Data yang dikumpulkan pada SP 1961 sampel relatif lebih sederhana bila dibandingkan dengan sensus sampel SP 1971, SP 1980, SP 1990, dan SP 2000 yang menggunakan sensus lengkap. Data yang cukup lengkap dan dapat diperbandingkan hanya pada SP 1971, SP 1980, dan SP 1990 dengan berbagai catatan, terutama aspek ketenagakerjaan yang menggunakan konsep berbeda. Ini disebabkan pengumpulan data menggunakan sistem yang sama yaitu sensus sampel 2,8 persen untuk SP 1971, 5 persen untuk SP 1980, dan 5 persen untuk SP 1990. Untuk SP 2000 agak sulit diperbandingkan dengan SP 1990 atau sebelumnya karena menggunakan pencacahan lengkap untuk seluruh penduduk Indonesia. Paling tidak, pengguna data SP 2000 harus memberikan catatan khusus bahwa sistem pengumpulan datanya berbeda.

Secara umum memang data yang dikumpulkan pada setiap sensus tidak jauh berbeda, terutama untuk SP 1971, SP 1980, dan SP 1990. Akan tetapi, untuk SP 2000 data yang dikumpulkan tidak serinci seperti tiga sensus sebelumnya. Berikut ini disajikan data yang tersedia pada SP 1961 – 2000 seperti berikut.

1. Data pendaftaran bangunan dan rumah tangga.
 - a. Jenis bangunan, jenis dan unsur rumah, status hunian, dan kepemilikan rumah.
 - b. Jenis rumah tangga, banyaknya rumah tangga, dan jumlah anggota rumah tangga.
 2. Data bangunan tempat tinggal dan pemilikan rumah tangga.
 - a. Jenis dan jumlah bangunan fisik, status penguasaan tempat tinggal, jenis atap, dinding, lantai dan luas lantai, dan penerangan.
 - b. Sumber air minum, memasak, mencuci, tempat mandi, tempat buang air besar.
 - c. Penguasaan barang-barang rumah tangga, lemari, kompor, sepeda/sampan, radio, TV, sepeda motor/motor tempel, mobil/kapal motor.
 - d. Penguasaan lahan pertanian: milik sendiri, sewa, gadai, bagi hasil, menggarap, luas lahan yang dikuasai, pemilikan barang rumah tangga.
 3. Data individu/anggota rumah tangga.
 - a. Umur, jenis kelamin, status perkawinan, kewarganegaraan, suku bangsa/etnis (hanya SP 2000), agama, dan jumlah jiwa dalam rumah tangga.
 - b. Tempat lahir, tempat tinggal 5 tahun lalu, dan tempat tinggal sekarang/saat sensus.
 - c. Pendidikan, bahasa yang digunakan, kemampuan berbahasa Indonesia, dan membaca dan menulis.
 - d. Status kegiatan ekonomi, lapangan, jenis dan status pekerjaan, dan jam kerja.
 - e. Perempuan status nikah, cerai hidup, cerai mati, usia perkawinan pertama, jumlah perkawinan, jumlah anak lahir hidup, masih hidup, jumlah anak yang meninggal, bulan dan kelahiran anak terakhir.
- Distribusi rincian data yang dikumpulkan dari SP 1961, SP 1971, SP 1980, SP 1990, dan SP 2000 digunakan untuk memudahkan dalam analisis perbandingan antarsensus. Ketersediaan data tentang tempat tinggal dan rumah tangga dapat dilihat pada Tabel 1, sedangkan ketersediaan data penduduk pada sensus dapat dilihat pada Tabel 2.

Analisis Sensus Bangunan dan Rumah Tangga

Dengan memperhatikan ketersediaan data yang ada pada sensus, baik data bangunan dan

Tabel 1
Ketersediaan Data Tempat Tinggal dan Rumah Tangga

No.	Tempat tinggal dan rumah tangga	Sensus Penduduk				
		1961	1971	1980	1990	2000
1.	Jenis bangunan		✓	✓	✓	✓
2.	Jumlah bangunan			✓	✓	
3.	Jumlah rumah tangga	✓	✓	✓	✓	✓
4.	Status pemilikan tempat tinggal		✓	✓	✓	
5.	Banyaknya anggota rumah tangga	✓	✓	✓	✓	✓
6.	Jenis atap rumah	✓	✓	✓	✓	
7.	Jenis dinding rumah	✓	✓	✓	✓	
8.	Jenis lantai rumah	✓	✓	✓	✓	
9.	Luas lantai rumah			✓	✓	
10.	Penerangan/lampu		✓	✓	✓	
11.	Bahan bakar memasak		✓	✓	✓	
12.	Sumber air minum		✓	✓	✓	
13.	Sumber air mandi/cuci			✓	✓	
14.	Tempat mandi			✓	✓	
15.	Tempat buang air besar		✓	✓	✓	
16.	Jumlah kamar	✓	✓			
17.	Jumlah kakus		✓			
18.	Pembuangan sampah		✓			
	Unsur Rumah					
19.	Pemilikan almari/bufet			✓	✓	
20.	Pemilikan kompor			✓	✓	
21.	Pemilikan sepeda/sampan			✓	✓	
22.	Pemilikan radio/kaset			✓	✓	
23.	Pemilikan TV			✓	✓	
24.	Pemilikan sepeda motor/perahu				✓	
25.	Pemilikan mobil/kapal				✓	
26.	Pemilikan lahan pertanian			✓	✓	
27.	Lahan pertanian yang disewakan			✓	✓	
28.	Lahan pertanian yang disewa			✓	✓	
29.	Lahan yang dikuasai			✓	✓	
30.	Pemilikan ternak sapi	✓		✓		
31.	Pemilikan ternak kerbau	✓		✓		
32.	Pemilikan kuda	✓		✓		
33.	Pemilikan kambing	✓		✓		
34.	Pemilikan babi	✓		✓		
35.	Pemilikan ayam/itik	✓		✓		

Tabel 2
Ketersediaan Data Penduduk pada Sensus Penduduk

No.	Jenis data yang dikumpulkan	Sensus Penduduk				
		1961	1971	1980	1990	2000
	Semua Umur					
1.	Hubungan dengan kepala rumah tangga	✓	✓	✓	✓	✓
2.	Jenis kelamin	✓	✓	✓	✓	✓
3.	Tanggal, bulan, tahun kelahiran	✓	✓	✓	✓	✓
4.	Umur	✓	✓	✓	✓	✓
5.	Status perkawinan	✓	✓	✓	✓	✓
6.	Agama	✓	✓	✓	✓	✓
7.	Kewarganegaraan/suku bangsa	✓	✓	✓	✓	✓
8.	Tempat lahir, propinsi	✓	✓	✓	✓	✓
9.	Pernah tinggal di propinsi lain		✓	✓	✓	
10.	Tempat tinggal terakhir sebelum tinggal di propinsi ini		✓		✓	
11.	Lama tinggal di propinsi ini		✓		✓	
12.	Ibu kandung tinggal dalam rumah tangga ini			✓	✓	
	Umur 5 tahun ke atas					
13.	Propinsi tempat tinggal 5 tahun yang lalu			✓	✓	✓
14.	Pernah sakit minggu lalu			✓		
15.	Tempat/cara pengobatan			✓		
16.	Penderita cacat			✓		
17.	Jenis cacat			✓		
18.	Status sekolah			✓	✓	
19.	Pendidikan tertinggi yang sedang/pernah diikuti			✓	✓	
20.	Tingkat/kelas tertinggi yang sedang/pernah diikuti			✓	✓	
21.	Jenjang pendidikan tertinggi yang ditamatkan	✓	✓	✓	✓	
22.	Jurusan pendidikan		✓	✓	✓	✓
23.	Bahasa ibu yang digunakan		✓		✓	
24.	Bahasa sehari-hari di rumah			✓	✓	
25.	Dapat berbahasa Indonesia			✓	✓	
26.	Dapat membaca dan menulis	✓	✓	✓	✓	

Lanjutan: Tabel 2 Ketersediaan Data Penduduk pada Sensus Penduduk

No.	Jenis data yang dikumpulkan	Sensus Penduduk				
		1961	1971	1980	1990	2000
	Umur 10 tahun ke atas					
27.	Kegiatan terbanyak seminggu lalu		✓	✓	✓	✓
28.	Bekerja minimal 1 jam seminggu			✓	✓	✓
29.	Mempunyai pekerjaan, tetapi sementara tidak bekerja			✓	✓	
30.	Pernah bekerja sebelumnya			✓	✓	
31.	Jumlah jam kerja seluruhnya		✓	✓	✓	
32.	Jumlah jam kerja pekerjaan utama			✓	✓	
33.	Jumlah hari kerja			✓	✓	
34.	Jenis pekerjaan utama	✓	✓	✓	✓	✓
35.	Lapangan pekerjaan utama	✓	✓	✓	✓	✓
36.	Status pekerjaan utama	✓	✓	✓	✓	✓
37.	Mempunyai pekerjaan tambahan				✓	
38.	Lapangan pekerjaan tambahan				✓	
39.	Mencari pekerjaan seminggu yang lalu			✓	✓	
40.	Alasan tidak cari kerja			✓	✓	
41.	Bekerja selama setahun lalu			✓	✓	
42.	Lapangan kerja setahun lalu			✓	✓	
	Perempuan pernah menikah					
43.	Bulan, tahun perkawinan pertama			✓	✓	
44.	Umur pada perkawinan pertama			✓	✓	
45.	Jumlah perkawinan			✓	✓	
46.	Jumlah anak lahir hidup	✓	✓	✓	✓	✓
47.	Jumlah anak masih hidup	✓	✓	✓	✓	✓
48.	Jumlah anak sudah meninggal			✓	✓	
49.	Bulan, tahun kelahiran hidup anak terakhir			✓	✓	
50.	Anak lahir hidup terakhir masih hidup			✓	✓	
51.	Cara KB yang pernah dilakukan			✓		
52.	Cara KB yang digunakan sekarang			✓		

rumah tangga maupun data individu terbuka peluang yang cukup besar untuk melakukan analisis perubahan dari setiap sensus. Menurut United Nations (1969 dan 1971), hasil sensus bangunan/tempat tinggal dan rumah tangga, meskipun jumlah dan jenis data yang dikumpulkan cukup banyak, di banyak negara sedang berkembang sangat terbatas dianalisis. Pengguna data jauh lebih banyak menganalisis data kependudukan daripada data bangunan dan rumah tangga. Ini sangat disayangkan karena data bangunan dan rumah tangga dikumpulkan secara sensus lengkap.

Indonesia tampaknya mengalami hal yang sama. Ini tampak sekali apabila diperhatikan dari publikasi yang sangat terbatas untuk laporan bangunan dan rumah tangga. Menurut United Nations (1974) data rumah tangga di Indonesia pada SP 1971 sangat lengkap, tetapi tidak banyak yang digunakan dalam analisis rumah tangga. Hal yang sama juga disebutkan oleh McDonald (1984) dalam panduan analisis sensus 1971 dan 1980, bahwa analisis tentang keadaan bangunan dan rumah tangga sangat terbatas dibandingkan dengan data yang dikumpulkan. Seperti disajikan pada rincian data yang dikumpul-

kan diberikan peluang yang sangat besar untuk melakukan analisis. Akan tetapi, yang perlu diperhatikan adalah data yang dikumpulkan dari sensus ke sensus sangat beragam. Artinya, jenis data bangunan dan rumah tangga dari sensus ke sensus cukup besar variasinya sehingga cukup sulit untuk analisis perbandingan antarwaktu, utamanya pemilikan rumah tangga. Berbagai kemungkinan analisis bangunan dan rumah tangga dapat dilakukan berdasarkan jenis data yang ada pada rincian data tersebut.

Analisis Potensi Desa (Podes)

Perlu diingat bahwa Badan Pusat Statistik wilayah desa/kelurahan yang dikenal dengan podes dimulai sejak SP 1980. Selama 20 tahun (1980–2000) telah dilakukan pengumpulan data podes sebanyak 7 kali yaitu bersamaan dengan Sensus Penduduk (1980, 1990, 2000) dengan Sensus Ekonomi (1986 dan 1996) dan bersamaan dengan Sensus Pertanian (1983 dan 1993). Dari sensus ke sensus, jenis data yang dikumpulkan pada podes tidak banyak berubah apabila dibandingkan dengan data bangunan dan rumah tangga. Data podes dapat menggambar-

kan kesejahteraan masyarakat dan penyusunan statistik pada tingkat desa atau wilayah kecil (*small area welfare and statistics*). Selain itu, dapat pula digunakan untuk penentuan lokasi dan jenis investasi usaha pada tingkat desa (BPS, 1999a).

Dengan memperhatikan rendahnya pemanfaatan data podes yang ada, BPS perlu melakukan sosialisasi/diseminasi tentang tujuan dan data yang ada pada podes. Jumlah dan jenis data yang cukup banyak ini sebetulnya dapat digunakan untuk melakukan pemantauan dan evaluasi hasil pembangunan, terutama keadaan bangunan tempat tinggal dan keadaan penduduk seperti yang direkomendasikan oleh United Nations (1992). Apa yang direkomendasikan oleh United Nations ini memang ada betulnya apabila memperhatikan dari 10 aspek/kelompok data yang dikumpulkan, seperti yang disajikan pada data yang tersedia. Problemanya adalah mengapa data yang cukup rinci ini, tersedia setiap tiga tahun dan dikumpulkan secara sensus lengkap, kurang dimanfaatkan? Justru yang dijumpai di lapangan adalah instansi/pengguna data mengumpulkan data yang hampir sama, yang sebenarnya tidak perlu dilakukan. Sama halnya dengan

data sensus bangunan dan rumah tangga, berbagai kemungkinan analisis dapat dilakukan dengan memperhatikan data yang ada pada daftar pertanyaan podes maupun bangunan dan rumah tangga. Analisis gabungan dari kedua sumber data ini sangat penting untuk memantau hasil pembangunan, mulai dari wilayah kecil yaitu desa/kelurahan sampai pada tingkat regional dan nasional.

Analisis Sensus Penduduk

Seperti telah disebutkan sebelumnya bahwa pelaksanaan sensus penduduk dari sistem sensus sampel (1961, 1971, 1980, dan 1990) ke sensus lengkap (2000) menyebabkan jumlah dan jenis data mengalami pengurangan yang cukup mendasar. Data yang dikumpulkan pada SP 1961 dan SP 1971 relatif sederhana apabila dibandingkan dengan SP 1980 dan SP 1990 yang sangat lengkap sampai mencapai sekitar 50 variabel. Sebaliknya, data yang dikumpulkan pada SP 2000 lebih terbatas lagi dan hanya mencapai sekitar 15 variabel. Ini berarti bahwa peluang untuk melakukan analisis perbandingan antarsensus menjadi sangat terbatas. Tampaknya data yang dikumpulkan pada SP 2000 hanya merupakan data

pokok/inti, sedangkan yang lengkap akan dikumpulkan melalui survai seperti Survai Angkatan Kerja Nasional (Sakernas) dan Survai Sosial Ekonomi Nasional (Susenas), baik Susenas Inti (Kor) maupun Susenas Modul.

Dilihat dari jumlah data yang dikumpulkan, untuk SP 2000 memang sangat sedikit sehingga banyak kendala yang muncul dalam analisis komparasi dengan sensus sebelumnya. Namun, untuk analisis berbagai tingkat administrasi sangat dimungkinkan mulai dari tingkat desa/kelurahan karena data tersebut dikumpulkan secara sensus lengkap. Ini berarti bahwa pengguna data dapat melakukan analisis mulai dari desa/kelurahan, kecamatan, kabupaten/kotamadya. Hal seperti ini sulit dilakukan pada sensus sebelumnya. SP 2000 memang dirancang untuk menampilkan profil wilayah mulai dari desa/kelurahan, baik itu profil kependudukan, bangunan dan rumah tangga, maupun podes. Dari sisi BPS inilah untuk pertama kali disajikan ketiga kelompok data tersebut, yang dapat dimanfaatkan bagi pengguna data secara simultan, mulai dari potensi desa/kelurahan, dalam hubungannya dengan keadaan

bangunan dan rumah tangga dan penduduk, baik sebagai individu maupun kelompok pada suatu wilayah. Menurut White (1993) data sensus yang dikumpulkan dengan biaya yang sangat mahal kurang dimanfaatkan dalam menyusun berbagai perencanaan pembangunan. Pengguna data lebih tertarik untuk mengumpulkan data sendiri meskipun telah tersedia data dari hasil sensus. Bahkan, dalam membahas dinamika jumlah dan distribusi penduduk saja harus dikumpulkan data yang sebenarnya dapat diestimasi dari hasil sensus.

Penutup

Adanya perubahan pelaksanaan sensus penduduk dari sistem sensus sampel yang dilaksanakan pada SP 1961, SP 1971, SP 1980, dan SP 1990 menjadi sensus lengkap pada SP 2000 membawa implikasi yang cukup besar dalam penyediaan data, terutama data kependudukan. Data tentang sensus bangunan dan rumah tangga sejak 1961–2000 tetap dilakukan dengan sensus lengkap, demikian halnya dengan potensi desa (podes) sejak 1980–2000. Data kependudukan sejak SP 1961–1990 dikumpulkan dengan sistem sensus sampel, kemudian pada SP 2000 berubah menjadi

sensus lengkap. Sebagai akibat dari perubahan tersebut, data kependudukan pada SP 2000 sangat terbatas dan hanya merupakan data pokok karena data yang lain akan dikumpulkan melalui survai kependudukan, terutama Susenas Kor, Susenas Modul, dan Sakernas.

Kesulitan yang dihadapi bagi pengguna data sensus ialah apabila ingin melakukan analisis perbandingan antarsensus. Tampaknya SP 2000 tidak sepenuhnya dirancang untuk keperluan ini meskipun peluangnya masih tersedia dalam jumlah variabel sangat terbatas. Akan tetapi, karena SP 2000 dalam melakukan pendataan bangunan dan rumah tangga serta potensi desa dan sensus penduduk kesemuanya dilakukan dengan sensus lengkap, mulai dari desa/kelurahan, berbagai analisis

kependudukan dapat dimulai dari unit wilayah paling kecil, yang sebelumnya tidak dapat dilakukan. Kini tiba saatnya bagi pengguna data untuk dapat melakukan analisis secara simultan, mulai dari tingkat desa/kelurahan tentang potensi desa dalam hubungannya dengan keadaan bangunan dan rumah tangga dan sekaligus dihubungkan dengan penduduknya. Pengolahan data SP 2000 dengan sistem *scanner* yang ada pada setiap propinsi dan beberapa kabupaten/kotamadya akan memperpendek waktu antara pengumpulan data sampai pada pemanfaatan data. Menurut rencana, sebelum akhir tahun 2000 hasil sensus penduduk sudah dapat dimanfaatkan, data yang tersedia sampai pada unit wilayah paling rendah yaitu desa/kelurahan.

Referensi

- Badan Pusat Statistik. 1999. *Pedoman Pencacah Sensus Penduduk 2000*. Jakarta.
- . 1999a. *Pedoman Pencacah Podes SP 2000*. Jakarta
- Biro Pusat Statistik. 1989. *Pedoman Pencacahan Sensus Penduduk 1990*. Jakarta
- McDonald, Peter F. 1984. *Pedoman Analisa Data Sensus Indonesia 1971-1980*. Yogyakarta: Gadjah Mada University Press,
- Tukiran, Sukamdi, dan Sofian Effendi. 1989. *Pelaksanaan Registrasi Penduduk di Daerah Istimewa Yogyakarta*. Yogyakarta: Pusat Penelitian Kependudukan Universitas Gadjah Mada.
- United Nations. 1969. *Handbook of Population and Housing Census Methods*. Part II. New York.
- . 1971. *Handbook of Population and Housing Census Methods*. Part VI. New York.
- . 1971a. *Methodology of Demographic Sample Surveys*. New York.
- . 1974. *Handbook of Population and Housing Census Methods*. Part IV. New York.
- . 1992. *World Population Monitoring 1991*. New York
- White, Michael J. 1993. "Measurement of population size composition and distribution" in George W. Rumsey (ed.), *Readings in Population Research Methodology*. Chicago: Social Development Centre. pp. 1-29.

KONDISI SOSIAL EKONOMI DAN PERAWATAN YANG DIINGINKAN PENDUDUK LANJUT USIA

*Sukamdi, Umi Listyaningsih, Faturochman**

Abstrak

The number of elderly in the province of Yogyakarta Special Region has showed an absolute and relative tendencies to increase. The average increase from 1971 to 1995 which was 3.27 percent per year, cannot be separated from the uprising of people life expectancy. The increasing of life expectancy, in one hand indicates to be positive phenomena, but in another hand, brings forth the problem of cares. The changes of time and family structures have affected the cares of aging people which was different from what they did to their parents. This study which applies both qualitative and quantitative methods in the subdistricts of Umbulharjo, Kraton, and Pakualaman, within the city of Yogyakarta shows that the majority of elderly has disapproved the presence of special institutions for them. To take care of aging persons has been regarded as an obligation of every children to indicate devotions to their parents. Furthermore, for elderly living with children and grandchildren, may also serve as motivation of life enthusiasms and to keep away from loneliness as the most troublesome psychological problems.

Pendahuluan

Data Sensus Penduduk dan Supas menunjukkan bahwa persentase penduduk lanjut usia (lansia) semakin meningkat. Jumlah lansia Daerah Istimewa

Yogyakarta pada tahun 1971 sebesar 6,82 persen. Sepuluh tahun kemudian jumlahnya meningkat menjadi 8,70 persen. Pada tahun 1990 jumlah lansia

- * Drs. Sukamdi, M.Sc., adalah sekretaris Pusat Penelitian Kependudukan, Universitas Gadjah Mada dan pengajar Fakultas Geografi, Universitas Gadjah Mada, Yogyakarta.
- * Umi Listyaningsih, S.Si, adalah asisten peneliti Pusat Penelitian Kependudukan, Universitas Gadjah Mada, Yogyakarta.
- * Drs. Faturochman, M.A. adalah peneliti Pusat Penelitian Kependudukan, Universitas Gadjah Mada dan pengajar Fakultas Psikologi, Universitas Gadjah Mada, Yogyakarta.

meningkat lagi menjadi 11,04 persen hingga akhirnya pada tahun 1995 menjadi 12,58 persen. Peningkatan ini tidak bisa dilepaskan dari peningkatan harapan hidup. Propinsi Daerah Istimewa Yogyakarta memiliki angka harapan hidup nomor dua tertinggi dibandingkan dengan propinsi lain, bahkan lebih tinggi juga dibandingkan dengan tingkat nasional. Angka harapan hidup Daerah Istimewa Yogyakarta pada tahun 1990 sebesar 67,58, meningkat menjadi 68,35 pada tahun 1995. Namun, yang perlu diperhatikan di balik tingginya angka harapan hidup ialah banyak lansia mengalami masalah. Kurang lebih sekitar 52,1 persen lansia di Daerah Istimewa Yogyakarta mengalami keluhan kesehatan. Dari kedua fakta tersebut perlu ada perhatian khusus, bahwa di balik tingginya harapan hidup, lansia memiliki kerentanan tubuh.

Aspek demografi yang cukup menarik di Yogyakarta, yang secara tidak langsung berpengaruh terhadap kondisi lansia adalah tingginya migrasi keluar. Banyak kelompok muda bermigrasi keluar Yogyakarta untuk mengadu nasib di kota lain yang lebih besar kesempatannya. Di samping faktor migrasi, perubahan struktur keluarga dari keluarga luas menjadi keluarga inti, tentu

saja, berpengaruh terhadap perawatan yang ditawarkan anak kepada orang tuanya. Perawatan yang ada pada keluarga luas lebih menjanjikan karena banyak anggota rumah tangga yang ikut serta terlibat. Secara psikologis, lansia juga merasa tidak kesepian karena selalu ada yang menemaninya. Namun, sebaliknya pada keluarga inti, kemungkinan kesepian dan orang tua tidak terawat lebih besar, apalagi kalau dalam keluarga tersebut suami istri bekerja. Alasan kesibukan dan tidak memiliki waktu yang banyak untuk merawat lansia menjadikan banyak anak menitipkan orang tua dalam panti jompo sebagai salah satu alternatifnya. Alternatif lain yang ditawarkan adalah membayar orang untuk tinggal bersama lansia, khusus melayani kebutuhan lansia setiap hari. Namun, pertanyaan yang muncul kemudian adalah apakah perawatan yang ditawarkan anak tersebut sesuai dengan yang dikehendaki lansia. Bentuk perawatan seperti apa yang dikehendaki lansia.

Kondisi Sosial Ekonomi

Salah satu variabel demografi yang berhubungan dengan aktivitas sosial dan ekonomi adalah umur. Asumsinya adalah meningkatnya umur biasanya selalu diiringi dengan kemundur-

an kemampuan fisik dan nonfisik. Kemunduran ini tentu saja akan berpengaruh terhadap bentuk aktivitas, yang selanjutnya akan berpengaruh pada penurunan pendapatan.

Rata-rata umur lansia dalam penelitian ini adalah 69,7 tahun (lebih tinggi dibandingkan dengan angka harapan hidup Daerah Istimewa Yogyakarta pada tahun 1995), bahkan terdapat pula lansia yang mampu bertahan hidup hingga usia 96 tahun. Keekerabatan yang baik dalam masyarakat dan keluarga serta tingkat kesehatan dan kualitas hidup menjadi salah satu penyebabnya. Kondisi semacam ini pula yang melatarbelakangi lansia penduduk pendatang untuk menetap tinggal di Yogyakarta meskipun sudah berakhir masa tugasnya. Sebanyak 62,2 persen lansia adalah penduduk pendatang. Alasan lain yang diutarakannya, salah satu di antaranya, ialah karena masih bekerja atau salah satu pasangan hidupnya masih bekerja sehingga harus mengikutinya.

Kurang lebih sekitar 40 persen lansia masih aktif dalam pasar kerja. Menurut Wirakartakusumah dan Priyono (1994) terdapat tiga alasan yang mempengaruhi lansia terjun dalam pasar kerja. Pertama, ada kemungkinan masih banyak lansia yang

tetap kuat secara fisik dan mental sehingga tidak ada alasan bagi mereka keluar dari pasar kerja. Kedua, terjunnya lansia di pasar kerja karena desakan ekonomi. Ketiga, alasan bukan didasarkan pada motif ekonomi, tetapi lebih didasarkan pada motif aktualisasi diri atau emosi. Dari lansia yang bekerja, 51,2 persen merupakan lansia yang termasuk dalam kelompok kedua, yang alasan bekerjanya ialah karena tuntutan kebutuhan keluarga. Kondisi ini cukup memprihatinkan. Lansia seharusnya mendapat santunan karena kondisi fisik dan nonfisik mengalami penurunan, yang terjadi justru sebaliknya.

Dengan memperhatikan hanya terdapat 40 persen lansia yang aktif bekerja maka secara ekonomis terdapat 60 persen yang tidak memiliki sumber pendapatan, artinya bahwa mereka tidak mampu secara ekonomis. Bagi mereka yang memiliki penghasilan, pertanyaan yang kemudian muncul adalah apakah penghasilan tersebut mampu mencukupi kebutuhan hidupnya dan keluarga. Pertanyaan yang bisa diajukan untuk lansia tidak bekerja adalah bagaimana cara mereka mencukupi kebutuhan hidupnya.

Hasil penelitian menunjukkan bahwa secara ekonomis lansia mengalami masalah (Tabel 1). Indikasi yang paling kuat terlihat

pada rasio antara pendapatan dan pengeluaran rumah tangga. Rata-rata pendapatan (pemasukan) rumah tangga adalah 227.186 rupiah per bulan. Sementara itu, pengeluarannya lebih besar, yaitu 249.019 rupiah. Artinya, pendapatan mereka tidak mencukupi kebutuhannya. Perlu dikemukakan di sini bahwa pendapatan sebesar itu sebenarnya sudah termasuk bantuan, baik dari anggota rumah tangga lain maupun anggota keluarga yang tidak tinggal serumah. Untuk melengkapi informasi tentang keadaan ekonomi lansia, dapat disampaikan bahwa rata-rata pendapatan lansia yang besarnya adalah 168.316 rupiah per bulan,

sumbangan yang mereka terima rata-rata 58.870 rupiah per bulan.

Dari data yang ada, cukup menarik untuk dilihat lebih jauh kondisi ekonomi lansia. Pertama, sumber pendapatan lansia ada dua yaitu dari lansia dan bantuan, baik dari anggota rumah tangga yang tinggal bersama maupun yang tinggal di luar rumah. Seharusnya yang disebut dengan pendapatan adalah hasil dari pekerjaannya, tetapi dalam penelitian ini ditemukan banyak lansia yang meskipun tidak bekerja, tetap memiliki pendapatan. Hal ini bisa terjadi karena ada di antara mereka yang mendapatkan uang pensiun dari pasangannya yang telah meninggal. Ada

Tabel 1
Pendapatan dan Pengeluaran per Bulan berdasar Status Kegiatan Ekonomi

Status Kegiatan Ekonomi	Tidak bekerja	Bekerja	Pensiun	Total
Pendapatan				
Sendiri	77.189*)	198.850	286.277	168.316
Bantuan	63.594	42.091	90.051	58.870
Total	140.784	240.941	376.329	227.186
Pengeluaran				
Total per bulan	230.932	239.149	312.227	249.019
Per kapita	59.314	67.388	110.427	71.966
Makan	113.580	117.884	146.538	121.392
Proporsi Pengeluaran makan	0,49	0,49	0,47	0,49

Sumber: Data Primer, 1997

*) dari bunga tabungan, sewa rumah, pensiun, dll

juga lansia yang tidak bekerja, tetapi dalam memasukkan pendapatan menggunakan pendapatan pasangannya. Karena dalam penelitian, skala analisis adalah rumah tangga, yang dimaksud dengan pendapatan adalah semua pendapatan yang diterima lansia dalam rumah tangga.

Kedua, dari kedua sumber pendapatan tersebut dapat ditarik kesimpulan bahwa lansia masih mengandalkan pada pendapatannya sendiri dibandingkan dengan bantuan. Kesimpulan ini diambil berdasarkan fakta bahwa pendapatan lansia masih lebih besar dibandingkan dengan sumbangan yang diterima. Meskipun demikian, harus pula diakui bahwa bantuan tersebut memiliki peran yang cukup berarti.

Ketiga, lansia yang tidak bekerja memiliki pendapatan paling kecil. Untuk memenuhi kebutuhannya, mereka mendapatkan bantuan cukup besar yaitu 63.594 rupiah. Jumlah ini hampir mendekati pendapatan lansia sendiri yaitu 77.189 rupiah. Dengan demikian, besar pemasukan lansia adalah 141 ribu rupiah, tetapi jumlah ini masih jauh dari cukup untuk memenuhi pengeluaran rumah tangga sebesar 231 ribu rupiah. Lansia akan mampu mencukupi kebutuhan jika bekerja, menerima uang pensiun, dan mendapatkan

bantuan. Lansia pensiun memiliki pendapatan dan memperoleh bantuan yang lebih besar dibandingkan dengan lansia yang lain.

Keempat, meskipun ada defisit ekonomi dalam rumah tangga, khususnya pada lansia yang tidak bekerja, pendapatan rumah tangga masih bisa memenuhi bila sekedar untuk mencukupi kebutuhan makan. Namun, untuk memenuhi kebutuhan hidup yang lebih tinggi, lansia kelihatannya agak keberatan.

Secara sepintas defisit anggaran rumah tangga lansia sulit dicari cara pemecahannya. Dari hasil wawancara mendalam, cara yang umum dilakukan lansia adalah dengan pinjaman atau hutang. Cara ini sepintas memang telah menyelesaikan masalah, tetapi bila ditinjau lebih jauh lagi, ternyata hanya sekedar mengalihkan permasalahan, lansia masih terbebani hutang. Bagi lansia sendiri, hal ini tidak menimbulkan masalah. Mereka mengatakan bahwa hidup tanpa berhutang hambar rasanya, rejeki pasti akan datang.

Telah disebutkan sebelumnya bahwa sebagian besar lansia adalah pedagang. Pada saat penelitian berlangsung, krisis ekonomi tengah melanda. Bagi pedagang saat seperti ini merupakan saat sulit untuk menjalankan roda perekonomiannya. Dalam

keadaan normal ada suatu keyakinan mampu memenuhi kebutuhannya atau pada kesempatan lain defisit yang dialami akan tertutup.

Berdagang sebagai pilihan untuk gantungan hidup tampaknya didasari pertimbangan bahwa sektor perdagangan memiliki pendapatan yang lebih besar dibandingkan dengan jenis pekerjaan yang lain. Jenis pekerjaan tersebut dirasakan paling sesuai dikembangkan di Yogyakarta. Pendapatan pedagang rata-rata dalam satu bulan 267.258 rupiah. Angka tersebut jauh lebih tinggi dibandingkan dengan pekerjaan buruh yang hanya memperoleh rata-rata per bulan 78.420 rupiah. Jenis pekerjaan dengan pendapatan yang menyaingi pekerjaan pedagang adalah pegawai. Hal ini logis karena lansia pada umur 60 tahun ke atas, yang masih terlibat aktif dalam pasar kerja umumnya merupakan lansia yang potensial dan masih dibutuhkan. Pada dasarnya pegawai pemerintahan pensiun pada umur 60 tahun, kecuali tenaga pengajar di perguruan tinggi. Lansia yang masih aktif umumnya telah memiliki kedudukan atau jabatan yang tinggi. Variasi pendapatan ini menggambarkan adanya variasi ekonomi lansia yang sangat tajam, yang lebih lanjut

persoalan ekonomi yang dihadapi pun bervariasi juga. Namun, yang perlu mendapat perhatian khusus ialah bahwa lansia dengan pendapatan tinggi pun tidak menjamin tidak membutuhkan santunan atau bantuan, terutama lansia sebagai kepala keluarga dan masih mempunyai beban tanggungan. Oleh karenanya, bukan hal yang aneh bila dijumpai lansia dengan penghasilan yang relatif besar, tetapi sumbangan dari pihak lain, apakah itu dari keluarga atau di luar keluarga, masih mempunyai andil penting bagi kelangsungan rumah tangga. Keadaan tersebut menunjukkan bahwa status kerja cukup baik untuk menjelaskan keadaan ekonomi rumah tangga. Pertanyaan yang muncul kemudian ialah bagaimana karakteristik lansia berdasarkan status kerjanya.

Status pekerjaan pada Tabel 2 melibatkan pensiunan. Secara konseptual pensiunan memang tidak termasuk kelompok pekerja, tetapi kelompok ini secara rutin mendapatkan penghasilan. Pertimbangan lain, jumlah pensiunan cukup besar yaitu kurang lebih satu perlima dari jumlah lansia. Lansia yang secara ekonomi benar-benar menggantungkan pada anggota rumah tangga lain, tanpa melakukan ataupun memiliki sumber penghasilan seperti pensiunan, termasuk

dalam kelompok lansia yang tidak bekerja. Sebaliknya, lansia yang masih aktif terlibat dalam kegiatan ekonomi, terlepas dari berbagai alasan yang melatar-belakanginya, termasuk dalam kelompok lansia bekerja.

Tabel 2 memberikan keterangan bahwa lansia laki-laki cukup menyebar pada ketiga kelompok, sementara lansia perempuan yang tidak bekerja paling besar yaitu hingga 50 persen. Dari keadaan tersebut muncul pertanyaan baru apakah lansia perempuan kondisi ekonominya lebih buruk dibandingkan dengan lansia laki-laki? Pertanyaan tersebut belum

terjawab melalui penelitian ini. Kedua, lansia yang tidak aktif secara ekonomi, usia rata-ratanya tua. Ini berkaitan dengan kemampuan fisik mereka yang semakin melemah. Ketiga, ada kecenderungan bahwa mereka yang tidak bekerja memiliki tingkat pendidikan yang rendah. Sebaliknya, lansia berpendidikan tinggi paling banyak dijumpai pada lansia pensiunan. Dilihat dari status pernikahan pada saat penelitian berlangsung, lansia dengan status tidak menikah paling banyak pada kelompok lansia yang tidak bekerja. Dari kenyataan tersebut terlihat bahwa

Tabel 2
Kegiatan Ekonomi Lansia berdasarkan Karakteristik

Karakteristik	Tidak Bekerja		Bekerja		Pensiun		Total	
Jenis Kelamin								
a. Laki-laki	63	27,63	110	48,25	55	24,12	228	100
b. Perempuan	100	49,75	79	39,30	22	10,95	201	100
Status Perkawinan								
a. Nikah	83	32,81	119	47,03	51	20,16	253	100
b. Tidak nikah	80	45,45	70	39,77	26	14,77	176	100
Pendidikan								
a. Sekolah Dasar	64	40,51	79	50,0	15	9,49	158	100
b. SLP	15	26,79	18	32,14	23	41,07	56	100
c. SLA +	16	19,28	31	37,35	36	43,37	83	100
Rata-rata umur	71		68		69		69	
N	163		189		77		429	

Sumber: Data Primer: 1997

lansia perempuan dengan pendidikan rendah, tua, dan tidak memiliki pasangan hidup cenderung tidak aktif secara ekonomi sehingga kondisi ekonominya pun lebih jelek.

Untuk lebih mendapatkan gambaran yang jelas tentang status ekonomi lansia perlu dilihat data kualitatifnya. Terdapat dua kasus yang saling berlawanan. Lansia yang satu dengan kondisi tubuh yang rentan, ibarat peribahasa, hidup segan mati pun tak hendak, kepasrahan merupakan alternatif yang kemudian dipilihnya, sedangkan lansia yang satunya memiliki semangat hidup tinggi karena ditunjang kondisi tubuh yang sehat serta keaktifan dalam kegiatan kemasyarakatan.

Kasus 1.

Panggil saja dengan Pak Bakri (bukan nama sebenarnya). Lansia ini berusia 69 tahun. Selama enam tahun kondisi kesehatannya terus mengalami penurunan. Hal ini berawal dari kecelakaan yang menyimpannya yaitu ditabrak becak sehingga tulang punggung dan rusuknya patah. Sejak saat itu Pak Bakri tidak dapat berbuat banyak, hendak pergi ke masjid saja (200 m) harus tertatih-tatih, sampai di masjid yang niatnya hendak

salat, malah jatuh terduduk. Sebelumnya Pak Bakri adalah tukang becak. Saat ini ia hidup bersama istri dan istrilah yang memenuhi kebutuhan rumah tangganya dengan berjualan di rumah. Kegiatan keseharian Pak Bakri ialah membuka warung bila pagi hari dan mengasuh cucu. Menyesalkah Pak Bakri dengan keadaan seperti ini?

“Wong niku kudu ngukur carane dewe. Mbiyen piye, saiki piye ngoten, dadi nggih nrimo. Sedoyo niku mung kantun nglampahi, manut nopo Dawuhe Gusti. Kulo mboten duwe nggih trimo, pun mboten sah mikir nopo-nopo.”

Kepasrahan demikian terlihat dalam kehidupannya. Meskipun kondisi fisiknya tidak berdaya, Pak Bakri enggan merepotkan orang lain, termasuk anaknya sendiri. Menurut Sunarto (1978) ketergantungan lansia kepada anak atau keluarga ialah karena terpaksa keadaan fisik mereka tidak bisa untuk bekerja.

“Kulo urip pun tutug. Nek arep dipundut, kepingin kulo ora sah ngrepotke anak. Ora sah nganggo loro, mondok, langsung dipundut ngono

*wae. Kulo niku pun pasrah,
nek salat malem, kulo nyuwun
loro kados niki nggih purun,
ning yo ojo banget-banget."*

Gambaran di atas mencerminkan keadaan lansia yang tergolong miskin. Tidak semua lansia hidup kekurangan, terdapat pula lansia yang berhasil dan masih aktif dalam kegiatan kemasyarakatan. Mengikuti kegiatan sosial kemasyarakatan merupakan tujuan utama mengisi waktu sisa hidupnya agar tidak kesepian setelah ditinggal orang-orang yang dikasihinya.

Kasus 2.

Bu Mira (bukan nama sebenarnya) pernah terpilih sebagai Ibu Teladan Nasional, saat ini berumur 67 tahun. Saat ini ia aktif dalam kegiatan PKK, BP4, dan Persatuan Istri Veteran. Kehidupannya saat ini berbeda dengan kehidupan sebelumnya ketika suaminya masih hidup. Ketika keenam anak masih kecil, keluarga Mira hidup sangat kekurangan. Berkat perjuangan suami dan dirinya, akhirnya saat ini Bu Mira mampu mengantarkan anak-anaknya mencapai gelar sarjana dan mendapatkan pekerjaan yang diinginkan.

Keberhasilan anak-anak ini hanya bisa disaksikan oleh Bu Mira karena suami telah dipanggil Yang Kuasa. Ketika itu Bu Mira seakanakan kehilangan pegangan hidup. Dalam kesehariannya ia hanya melamun dan bersenandung (hobinya) mengenang suami. Namun, hal tersebut tidak berlangsung lama karena kegiatan sosial telah menantinya. Dengan aktif melibatkan diri dalam berbagai aktivitas, Bu Mira mampu melupakan kesedihannya, bahkan hingga saat ini meskipun hidup sendiri, tidak merasa kesepian. Keterlibatan Bu Mira dalam kegiatan sosial ini telah dilakukan cukup lama ketika anak-anak masih kecil hingga akhirnya terpilih sebagai Ibu Teladan Nasional II.

Yang menarik dari kasus Bu Mira ini ialah semangat hidup yang dimiliki sehingga dalam usia yang cukup tua masih melibatkan diri dalam kegiatan sosial. Terdapat pola yang sama antara Bu Mira dan Pak Bakri, keduanya enggan merepotkan anak.

"Anak-anak saya selalu menyuruh saya untuk tinggal bersama. Namun, saya nggak

mau, saya masih mampu hidup sendiri dari pensiun suami. Pernah anak saya mengirim uang, uang itu kemudian saya kembalikan, ini untuk biaya anak-anak kamu saja, ibu tidak membutuhkan. Mungkin anak saya tersinggung, eh malah akhirnya di rumah, ketika saya pulang dari arisan, sudah ada material bangunan. Dia tahu kalau saya nggak suka diberi uang”.

Dari kedua kasus tersebut tampak jelas bahwa lansia yang tercukupi kebutuhan hidupnya mampu melakukan aktivitas sosialnya dengan baik. Sebaliknya, lansia yang miskin harus berjuang agar bisa bertahan hidup, bahkan mereka harus menghindari dari sakit agar tetap bisa berusaha sehingga kebutuhan hidup bisa terpenuhi. Pada keluarga kaya seperti Bu Mira, untuk mencegah sakit, mereka melakukan kegiatan sehari-hari seperti menyiram bunga, membersihkan pekarangan dan rumah, serta setiap setengah tahun sekali melakukan *chek-up* kesehatan. Berbeda dengan lansia miskin, dalam kondisi sakit pun kalau masih mampu melakukan aktivitas kesehariannya, belum dianggap sakit dan harus dilupakan. Uang merupakan orientasi pertama agar kebutuhan hidupnya terpenuhi.

Analisis berikut ini menekankan pada perbedaan status berdasarkan pengeluaran per kapita yang dihitung dari jumlah pengeluaran rumah tangga dibagi dengan jumlah anggota rumah tangga. Setelah angka itu didapat, dibagi dalam tiga kelompok, yaitu 40 persen terbawah, 40 persen menengah, dan 20 persen teratas. Pembagian ini merupakan pembagian kelompok berdasarkan data dan statistik. Hasilnya menunjukkan bahwa mereka yang tergolong kelas bawah (miskin) rata-rata pengeluaran per bulannya sekitar 29 ribu rupiah, kelompok menengah (cukup) 65 ribu rupiah, dan kelompok atas (kaya) 173 ribu rupiah. Bila dikonversikan dengan beras yang harganya pada waktu penelitian berlangsung sekitar 2000 rupiah per kilogram, pengeluaran kelompok miskin dalam sebulan kurang dari 25 kilogram. Sebaliknya, mereka yang tergolong berkecukupan membelanjakan uang dalam sebulan lebih besar daripada pengeluaran setara harga 25 kilogram beras. Gambaran ini sesuai dengan kriteria kemiskinan yang sering dipakai berdasarkan patokan Sajogyo (1996) yang menggunakan ambang batas kemiskinan setara 320 kg beras per tahun. Senada dengan itu, tampak pula bahwa pengeluaran per bulan pada

kelompok miskin didominasi oleh konsumsi (75 persen). Salah satu hal yang perlu dicatat adalah kenyataan bahwa mereka yang tergolong kelompok berkecukupan ternyata rata-rata pengeluaran konsumsinya masih sedikit di atas 50 persen. Ini dapat dimaklumi karena batas kemiskinan relatif yang sering digunakan adalah 50 persen pengeluaran untuk makan, yang pada umumnya berlaku untuk negara maju. Untuk negara Indonesia, batasan itu tampaknya masih terlalu tinggi.

Mengapa mereka miskin? Penelitian ini tidak langsung bisa menjawab pertanyaan ini, tetapi beberapa hasil analisis menunjukkan fakta yang menarik. Dilihat dari aktivitas ekonominya, lansia yang rumah tangganya tergolong miskin sebagian besar tidak bekerja dan juga tidak menerima pensiun (Tabel 3). Ini berbeda dengan mereka yang tergolong

berkecukupan atau kaya. Kedua kelompok ini pada umumnya masih aktif secara ekonomis atau menerima pensiun. Meskipun ada kecenderungan seperti itu, asosiasi dua variabel tersebut tidak cukup kuat. Oleh karenanya, perlu dilihat juga kategori lansia berdasarkan status ekonominya.

Analisis pertama diterapkan untuk melihat pendapatan dan pengeluaran berdasarkan kelompok status ekonomi (Tabel 4). Dari tabel pendapatan dan pengeluaran terlihat bahwa hanya lansia yang tergolong kaya yang dapat mencukupi kebutuhan rumah tangganya. Ini agak berbeda dengan kondisi ekonomi lansia berdasarkan status kerja. Berdasarkan perhitungan yang baru ini, bahkan ditemukan fakta yang lebih konsisten yaitu tanpa bantuan dari anak atau pihak lain, semua kelompok lansia tidak dapat memenuhi kebutuhan

Tabel 3
Status Ekonomi Lansia berdasar Status Kegiatan Ekonomi

Status Ekonomi	Status Kegiatan Ekonomi							
	Tidak bekerja		bekerja		Pensiun		Total	
	n	%	n	%	n	%	n	%
Miskin	79	48,4	78	41,5	14	18,4	171	40,0
Cukup	58	35,6	80	42,5	33	43,4	171	40,0
Kaya	26	16,0	30	16,0	29	38,2	85	20,0
Total	163	100,0	188	100,0	76	100,0	427	100,0

Sumber: Data Primer, 1997

Tabel 4
Rata-Rata Pendapatan dan Pengeluaran berdasar Status Ekonomi

Variabel	Status ekonomi Rumah Tangga			
	Miskin	Sedang	Kaya	Total
Pendapatan				
Sendiri	94.316	166.478	322.896	168.717
Bantuan	21.339	61.387	130.694	59.145
Total	115.655	227.885	453.590	227.862
Pengeluaran				
Rata-rata pengeluaran rumahtangga	155.461	242.410	450.529	249.019
Per kapita	28.906	64.850	172.908	71.966
Makan	95.632	120.845	175.494	121.627
Proporsi pengeluaran makan	0,75	0,53	0,43	0,60

Sumber: Data Primer, 1997

rumah tangganya. Dengan kata lain, data yang baru ini makin menegaskan pentingnya peran bantuan bagi lansia. Hal yang menyedihkan adalah adanya kenyataan bahwa dengan dibantu pun kelompok miskin dan menengah masih belum bisa mencukupi kebutuhan rumah tangganya.

Untuk memperjelas posisi ekonomi lansia, berikut ini disampaikan karakteristik lansia berdasarkan status ekonominya (Tabel 5). Di sini tampak bahwa proporsi lansia perempuan yang tergolong miskin lebih kecil dibandingkan dengan proporsi laki-laki. Meskipun data ini menunjukkan perbedaan yang tidak terlalu mencolok, dapat

disimpulkan bahwa perempuan justru tidak berasosiasi dengan kemiskinan. Variabel lain yang berasosiasi dengan status ekonomi adalah tingkat pendidikan lansia. Dari tabel tampak bahwa tingkat pendidikan berasosiasi dengan status ekonomi. Mereka yang status ekonominya baik, cenderung berpendidikan tinggi. Tampaknya pendidikan menjadi penentu dalam mendapatkan pekerjaan, yang selanjutnya mempengaruhi penghasilan mereka. Permasalahannya ialah variabel pendidikan ini sulit dimanipulasi dalam rangka meningkatkan status ekonomi lansia. Sementara itu, status perkawinan dan usia tidak memiliki hubungan yang jelas dengan status ekonomi.

Untuk lebih memahami kondisi ekonomi lansia dapat didekati dengan melihat kondisi fisik tempat tinggal lansia. Bahasan berikut menyajikan kondisi tempat tinggal lansia.

Sekitar 69,7 persen tempat tinggal berstatus milik sendiri, sedangkan selebihnya lansia tinggal bersama anak, *ngindung*, atau mengontrak. Tiga perempat dinding rumah terbuat dari tembok dan selebihnya terbuat dari bambu, papan, dan *kotangan*, masing-masing kurang dari 10 persen. Hampir 60 persen lantai rumah terbuat dari semen atau dengan istilah lokal *plesteran*,

sedangkan yang masih berlantai tanah sebesar 6 persen. Delapan puluh lima persen rumah beratap genteng biasa dan hanya sebesar 0,5 persen rumah yang beratap seng.

Kualitas tempat tinggal juga dapat dilihat dari kepemilikan kamar mandi dan WC. Hampir semua rumah tangga memiliki kamar mandi dan WC, sedangkan yang menggunakan fasilitas umum relatif sedikit, kurang dari 3 persen. Sumber air juga dapat digunakan sebagai salah satu alat pengukur kesejahteraan rumah tangga. Sekitar tiga perempat rumah tangga telah memiliki

Tabel 5
Status Ekonomi Rumah Tangga Lansia berdasarkan Karakteristik

Karakteristik	Status Ekonomi Rumah Tangga							
	Miskin (N = 171)		Sedang (N = 171)		Kaya (N = 85)		Total (N = 427)	
Jenis Kelamin								
Laki-laki	95	41,85	85	37,44	47	20,71	227	100
Perempuan	76	38,00	86	43,00	38	19,00	200	100
Status Perkawinan								
Nikah	97	38,34	110	43,48	46	18,18	253	100
Tidak nikah	74	42,53	61	35,06	39	22,41	174	100
Pendidikan								
Sekolah Dasar	70	44,87	64	41,03	22	14,10	156	100
SLP	14	25,00	23	41,07	19	33,93	56	100
SLA +	15	18,07	32	38,55	36	43,37	83	100
Rata-rata umur	69		70		69		69	

Sumber: Data Primer, 1997

sumur pribadi sebagai sumber air, baik untuk keperluan memasak dan minum maupun untuk keperluan rumah tangga yang lain seperti mencuci pakaian, menyiram tanaman, atau yang lain. Satu perlima keluarga lansia menggunakan bahan bakar gas untuk keperluan memasak, sekitar dua pertiga (61 persen) lansia menggunakan bahan bakar minyak tanah, dan sisanya menggunakan bahan bakar kayu dan arang. Sekitar 78 persen rumah tangga lansia menggunakan listrik dengan cara melanggannya sendiri sebagai penerangan dan 19 persen menggunakan listrik dengan cara menyalur dari tetangga terdekat. Dari uraian tentang rumah dan fasilitas penunjangnya, didapatkan gambaran bahwa kondisi tempat tinggal dan fasilitas yang dimiliki lansia cukup memadai dan secara langsung akan berpengaruh terhadap kesehatan dan tingkat kesejahteraan.

Bantuan dan Dukungan

Penyantunan lansia mencakup dua aspek yaitu ekonomi dan nonekonomi. Dalam banyak kasus kedua aspek penyantunan ini bersifat komplementer. Untuk kasus-kasus tertentu, salah satu jenis santunan lebih dibutuhkan dibandingkan dengan jenis lainnya. Sebagai contoh, bagi

lansia yang miskin, santunan ekonomi lebih penting untuk dapat bertahan hidup, meskipun bukan berarti bahwa santunan yang nonekonomi tidak diperlukan. Sebaliknya, bagi lansia yang secara ekonomi berkecukupan, santunan nonekonomi menjadi sangat penting daripada bantuan ekonomi.

Menurut Adi (1982) anak masih merupakan jaminan yang paling baik bagi para lansia. Terdapat suatu kewajiban dan merupakan loyalitas menyantuni orang tua yang sudah tidak bisa mengurus dirinya sendiri. Pada bagian terdahulu telah disebutkan bahwa sumbangan dari anak, besarnya sekitar seperempat dari penghasilan lansia. Analisis lebih lanjut juga menunjukkan bahwa peran sumbangan tersebut cukup signifikan. Di samping itu, juga agak ironis sebab kelompok yang relatif kaya justru menerima bantuan lebih besar dibandingkan dengan kelompok yang lebih miskin. Dalam hal seperti ini, tingkat kepentingan santunan ekonomi barangkali tidak selalu identik dengan jumlah uang yang diberikan, tetapi juga menyangkut aspek lain yang lebih luas.

Persoalannya adalah bagaimana peran keluarga, terutama anak-anaknya? Kasus Isah (bukan nama sebenarnya) barangkali dapat digunakan sebagai ilustrasi.

Isah hidup bersama kakak sepupunya yang juga sudah tua dan tidak mempunyai anak. Dia tidak ingin merepotkan keponakannya bila harus menanggungnya. Kemungkinan keponakannya secara ekonomi tidak cukup kuat sehingga tidak dapat dijadikan tumpuan hidup. Hal ini merupakan ironi. Di satu pihak keberadaan lansia di dalam masyarakat mengakibatkan beban bagi anggota masyarakat yang lain. Di pihak lain persoalan tersebut merupakan akibat dari ketidakmauan atau ketidakmampuan lansia untuk menggeser beban tersebut kepada anak atau anggota keluarga. Dalam masyarakat kota yang tingkat kohesi sosialnya sudah berkurang, munculnya fenomena ini menunjukkan dua hal yang kontradiksi. Pertama, tidak selalu berkurangnya kohesi sosial berkaitan langsung dengan kesediaan seseorang untuk berkorban bagi orang lain, khususnya kelompok rentan, misalnya lansia dan penduduk miskin. Kedua, tidak menutup kemungkinan hal tersebut muncul karena tuntutan sosial dalam masyarakat, bukan individu. Sebagai akibatnya, proses yang berlangsung merupakan paksaan dari kondisi lingkungan yang ada.

Kasus berikut ini memberikan gambaran yang lebih jelas

mengenai posisi lansia miskin di perkotaan. Bagi keluarga lansia yang miskin, maka tidak banyak yang dapat diharapkan. Kromo (bukan nama sebenarnya), 75 tahun, contohnya, mempunyai dua anak, satu perempuan dan satu laki-laki. Anak perempuannya menjadi penjual jamu gendong dan anak laki-lakinya menjadi buruh angkutan jasa pengiriman barang. Kedua anaknya ini secara ekonomi pas-pasan karena mereka masih menanggung kebutuhan anak-anaknya (cucu Kromo). Karena itu, Kromo tidak banyak mengharap bantuan dari kedua anaknya.

"Yang laki-laki itu kadang ke sini, tapi tidak melakukan apa-apa ... tidak ... tidak (memberikan bantuan) karena anaknya banyak. Sesekali pernah, tapi tetap tidak memikirkan itu ... ya terserah saja ... nggak mesti itu ... sulit kok mencari makan. Saya tidak pernah meminta. Tidak. Saya tidak pernah minta pada anak."

Minah (bukan nama sebenarnya), 62 tahun, masih lebih beruntung. Meskipun miskin dan masih menanggung satu anak yang pengangguran, dia sering dibantu anak perempuannya yang bekerja di Batam. Untuk kebutuhan sehari-hari, Minah menjadi penjual makanan dan suaminya menjadi tukang becak.

Anaknya enam, tetapi hanya satu yang bisa membantu, itu pun karena dia belum menikah. Kalau nanti menikah, mungkin tidak banyak lagi yang bisa diberikan kepada Minah.

"Anak saya yang perempuan membantu secara rutin, yang laki-laki tidak. Mereka punya keluarga sendiri ... punya tanggungan sendiri kok. Anak saya yang perempuan bilang: 'Kalau ada masalah (uang) minta tolonglah sama aku ... nanti aku kirim. Itu tanggung jawabku'. Besok kalau sudah punya suami tentu lain masalah."

Kembali ke persoalan tersebut, apabila keluarga tidak bisa membantu, apakah masyarakat sekitar dapat diandalkan? Para lansia sangat yakin bahwa masyarakat sekitar banyak yang mau membantu. Keyakinan ini tumbuh karena mereka selama ini berhubungan baik, tetangga juga memperlakukan dengan baik. Hal ini sekaligus mempertegas penjelasan sebelumnya bahwa para lansia miskin mengandalkan hubungan sosial agar dapat bertahan hidup. Seperti halnya Minah, Bakri, Mira, dan Kromo yang berjualan makanan serta sayuran, selama ini mereka merasa tidak pernah memperlakukan tetangga dengan buruk. Mereka bahkan sangat

toleran bila ada lansia yang berhutang, tetapi tidak membayar. Harapannya, bila nanti butuh bantuan, mereka bergantian membantu. Harto (bukan nama sebenarnya) yang sering memberi jasa pengobatan dan Mira yang banyak melakukan kegiatan sosial juga beranggapan sama. Mereka sekarang berharap bila ada anggota masyarakat yang memerlukan bantuan, masyarakat sekitar tentu akan membolehkannya.

Beberapa kasus tersebut menegaskan hal-hal yang telah dikemukakan sebelumnya, khususnya mengenai masalah yang dihadapi lansia miskin. Bagi mereka, kesulitan hidup akan berakhir setelah meninggal. Meskipun begitu, mereka menyikapinya dengan cara yang bijak, menerima keadaan. Sikap ini dapat diinterpretasikan bermacam-macam, tetapi bagi mereka sendiri hal seperti ini adalah suatu keharusan. Cara lain tampaknya tidak mungkin ditemukan. Sikap tersebut juga bukan sekedar pasrah sebab menurut perhitungan mereka, akan ada jalan baik yang akan mereka lalui. Kebaikan yang telah ditanam selama ini mereka yakini akan berbuah baik pula. Harapan bahwa masyarakat setempat akan membantu mereka, hal ini pula yang menyebabkan mereka

enggan untuk berpindah ke tempat lain, termasuk ke panti jompo kelak. Pendapat lansia di bawah ini cukup mewakili keinginan para lansia.

Ini rumah kenangan saya dengan Bapak. Saya tidak mau pindah dari sini meskipun anak-anak selalu mengajak saya untuk bersama mereka. Tetangga juga baik ... sudahlah saya di sini saja (Mira).

Saya dulu pindah ke sini malah menjadi sedih. Ngapain saya pindah. Sekarang banyak teman ... kalau pindah lagi nanti sedih lagi (Ny. Rani).

Tanah ini saya miliki dengan penuh perjuangan. Saya mau di sini sampai mati. Jangan ... jangan ke panti jompo. Memangnya tidak ada yang bisa merawat di sini (Bakri).

Meskipun ada harapan dan ada nilai-nilai yang menempatkan lansia pada posisi tinggi dalam masyarakat, dalam realitasnya yang paling diandalkan untuk dapat membantu mereka adalah anak atau saudara. Berbakti dan rasa kekeluargaan yang melebihi tekanan ekonomi merupakan beberapa pertimbangan yang melatarbelakangi keluarga merawat lansia (Emilia, *et.al.*, 1995). Dalam penelitian ini ditemukan hampir sembilan persen (38 responden) yang tidak menjadi kepala rumah tangga dan ke-

hidupan mereka banyak ditopang oleh anak-anaknya. Di samping itu, ditemukan juga sebanyak 12 responden (3 persen) yang hidup bersama saudaranya. Dari sejumlah 50 responden ini, sebagian besar (70 persen) tidak lagi bekerja meskipun ada juga yang mendapat pensiun. Kehidupan mereka secara ekonomi sangat tergantung pada anak dan saudara yang ditinggali, setidaknya bila dibandingkan dengan lansia yang menjadi kepala keluarga atau istri kepala keluarga. Secara kongkret pendapatan kelompok ini adalah 79 ribu rupiah per bulan, sedangkan lansia yang mandiri rata-rata pendapatannya sekitar 180 ribu per bulan. Apakah mereka secara ekonomi berkecukupan? Ternyata hampir dua pertiga dari mereka hidup dalam rumah tangga yang tergolong miskin. Apakah ini indikasi dari *shared poverty*? Penelitian ini belum bisa menjawab dengan tegas, tetapi ada indikasi ke arah itu. Dari hasil analisis kualitatif ditemukan bahwa mobilitas vertikal dari responden penelitian ini termasuk sedikit jumlahnya. Sementara itu, lansia kelompok kaya lebih banyak yang menolak hidup bersama anaknya. Oleh karena itu, bisa dipahami bahwa sumbangan yang diberikan anak kepada lansia yang kaya lebih banyak

jumlahnya. Sepertinya, sumbangan dalam bentuk uang ini merupakan kompensasi untuk perawatan lansia oleh anaknya. Sebaliknya, lansia yang miskin dan membutuhkan bantuan terpaksa ditampung oleh anaknya, meskipun status ekonomi anaknya juga tergolong miskin. Namun, seperti halnya proporsi bantuan anak kepada orang tuanya dalam bentuk materi yang masih kecil, meskipun bermakna, jumlah lansia miskin yang ditampung oleh anak ataupun saudaranya juga masih lebih sedikit dibandingkan dengan lansia miskin yang tidak tinggal dengan anak ataupun saudaranya.

Bantuan anak dan saudara yang diterima lansia seperti pembahasan di atas adalah bantuan langsung dan bersifat terus-menerus, terutama untuk kebutuhan ekonominya. Di samping itu, masih ada bantuan lain yang diterima secara tidak langsung/temporer dan bentuknya tidak selalu materi (*social psychological support*). Bantuan ini tidak hanya datang dari anak atau saudara, tetapi juga dari teman atau orang lain. Meskipun demikian, sekali lagi terbukti bahwa dukungan dari keluarga tampak paling besar. Dalam survai ditanyakan lebih banyak dukungan yang diterima, tetapi hasilnya tidak cukup menonjol sehingga yang

bisa dikemukakan di sini hanya beberapa. Jenis-jenis dukungan yang banyak diberikan oleh keluarga (*children and relatives*) adalah pemberian pertimbangan dalam memecahkan masalah dan tukar pikiran (*diskusi*). Dari teman-teman lansia, yang umurnya belum tentu lanjut, dukungan yang diterima, antara lain, adalah bantuan materi, kesediaan untuk berbagi rasa senang/sedih, dan kepercayaan (bisa dipercaya). Di luar keluarga dan teman, lansia masih bisa menerima *support* dari orang lain dalam bentuk mau memahami pemikirannya, menemani, dan berbagi rasa sedih/senang.

Cukupkah bantuan dan dukungan yang diterima lansia tersebut? Kelihatan jelas sekali bahwa bantuan itu belum cukup. Masih ada jenis-jenis bantuan yang dibutuhkan oleh mereka. Banyak pertanyaan yang diajukan untuk mengidentifikasi kebutuhan lansia, tetapi tidak terlalu banyak yang sebenarnya mereka butuhkan. Untuk masalah-masalah personal, misalnya, sangat kecil yang memerlukan bantuan. Secara kebetulan, secara fisik mereka tidak banyak bermasalah. Masalah dan bantuan yang diperlukan lebih banyak merupakan masalah domestik. Ada tiga masalah domestik yang cukup berarti dan perlu bantuan,

yaitu memasak (31,2 persen), membersihkan rumah (23,1 persen), dan belanja kebutuhan sehari-hari (28,2 persen). Bantuan-bantuan yang diperlukan untuk itu pun sebagian besar sudah terpenuhi dan yang memenuhinya adalah keluarga, termasuk anak-anaknya. Di luar bantuan domestik seperti dikemukakan itu, ada satu bantuan lagi yang dibutuhkan lansia, yaitu mendampingi atau mengantar mereka pergi ke luar kota, 22 persen dari lansia membutuhkan bantuan ini.

Melihat kenyataan tersebut, tidak mengherankan bila tinggal di rumah jompo tidak menjadi pilihan lansia. Sekitar tiga perempat (73,7 persen) lansia tidak menghendaki adanya panti jompo. Alasan yang dikemukakan cukup bervariasi seperti pertama, merawat orang tua merupakan suatu kewajiban, bagaimanapun sibuknya anak. Kedua, orang tua lebih senang bila anak tinggal bersama atau dekat dengan tempat tinggal orang tua. Ketiga, merawat orang tua merupakan perwujudan bakti anak atas apa yang telah dilakukan orang tua kepada anak. Menurut Prawitasari (1994) bagaimana pun juga, seorang lansia di dalam masyarakat mana pun dia berada akan mendapatkan rasa bahagia lebih mendalam dan lebih memuaskan apabila dapat hidup di dalam ke-

luarganya bersama-sama dengan para anggota keluarga yang dicintainya. Rasa bahagia akan meluas apabila dia tetap tinggal di tengah-tengah masyarakat yang secara sosiologis dan psikologis ikut membesarkannya dari lahir sampai lansia.

Selebihnya, yaitu sekitar 26,3 persen menyatakan setuju atas adanya panti jompo. Alasan atas sikapnya ini lebih mengacu pada pengertian lansia pada kesibukan dan kondisi ekonomi anak. Lansia rela ditempatkan di panti jompo daripada tinggal bersama anak, tetapi perawatan tidak terjamin. Lansia tidak ingin membebani dan mengganggu perhatian anak. Ketidaksetujuan lansia akan panti jompo ini tidak dipengaruhi oleh status perkawinan. Lansia yang tidak menikah pun tidak setuju bila anak menempatkan orang tua di panti jompo. Hal ini diungkapkan oleh salah seorang informan yang tidak menikah.

"Membalas budi dan memelihara orang tua merupakan kewajiban anak. Durhakalah anak yang tidak mau memelihara orang tuanya. Meskipun tidak mempunyai anak, saya tidak mau kalau harus tinggal di panti jompo. Saya menginginkan mati di rumah ini. Saya lebih percaya dengan tetangga di sekitar sini, nggak mungkin kalau saya sakit, bahkan sampai meninggal

dibiarkan begitu saja. Tetangga itu seperti saudara. Kalau kita baik, saya yakin mereka juga akan baik."

Lansia sadar betul bahwa pada suatu saat akan ditinggal oleh anak-anak sehingga orang tua tidak terlalu menerapkan konsep tradisional yang dianutnya. Sebagai perwujudan baktinya, orang tua mengharapkan anak senantiasa menjenguk orang tua walaupun hanya dilakukan sekali dalam setahun (40,3 persen). Sekitar 28 persen lansia mengharapkan anak selalu memberikan kiriman barang atau uang, sedangkan lansia yang hanya mengharapkan kabar dari anak sebesar 11,2 persen. Sisanya, sekitar 20,5 persen mengharapkan anak selalu berbuat baik dan menjaga nama baik keluarga (*mikul duwur mendhem jero*).

Keinginan lansia untuk dimengerti, disayang, dan diperlakukan dengan sopan besar pengaruhnya terhadap kesehatan lansia, terutama kesehatan psikis. Keeratan hubungan, masalah tempat tinggal, dan dukungan sosial merupakan aspek penting bagi kebahagiaan lansia. Keluarga berperan besar dalam masalah ini. Anggota keluarga perlu mengembangkan kehidupan yang nyaman sehingga mampu membahagiakan lansia.

Bentuk perhatian yang diukur dalam hal ini meliputi kesediaan, keikhlasan, dan waktu yang diluangkan keluarga dan lingkungan mendengarkan berbagai keluhan dan permasalahan yang dihadapi lansia. Bentuk perhatian ini dibagi menjadi tiga kelompok yaitu perhatian yang rendah, cukup, dan baik. Hampir 53 persen lansia menyatakan perhatian yang diberikan keluarga dan lingkungan dalam kehidupan lansia cukup, sedangkan yang menyatakan bahwa perhatian keluarga dan lingkungan kurang baik sekitar 9,8 persen. Selebihnya 37,2 persen menyatakan perhatian mereka dalam kelompok baik.

Meskipun menyatakan perawatan dan perhatian yang diberikan keluarga dan lingkungan sudah memadai, lansia masih memiliki permasalahan yang sampai saat ini belum terpecahkan. Permasalahan yang paling banyak dialami adalah kesepian, anak, ekonomi, dan sosial. Menurut Soemardjan (1993), bagi seorang lansia yang sudah cukup tua umurnya, suatu hal yang biasanya dirasakan dan sukar untuk ditanggulangi yaitu rasa kesepian. Hal yang sama juga diungkapkan Deeken (1986) yang menyatakan bahwa menghadapi usia lanjut berarti menghadapi kesepian. Ketakutan dan kesadar-

an akan kesendirian sering menjadi pengalaman yang menakutkan dan menekan. Lebih dari 56 persen lansia menyatakan dirinya kesepian setelah orang yang dicintai dan anak-anaknya pergi. Sekitar 14,2 persen menghadapi permasalahan anak. Permasalahan anak tersebut menyangkut kehidupan anak yang belum layak, anak belum mandiri, atau yang cukup banyak dikeluarkan sebagai alasan ialah karena anak belum menikah. Permasalahan lain yang cukup mengganggu adalah gangguan kesehatan dan 12,6 persen lansia masih menghadapi permasalahan ekonomi keluarga. Sekitar 2,6 persen lansia menghadapi permasalahan sosial seperti masalah warisan, konflik dengan tetangga, dan sebagainya.

Bagaimana bantuan perawatan kesehatan lansia oleh anak atau keluarganya? Seperti disebutkan di bagian terdahulu bahwa sebagian besar dari mereka tidak membutuhkan bantuan personal, yang biasanya berkaitan dengan masalah kesehatan. Fakta seperti ini sebenarnya tidak menangkis kemungkinan adanya kebutuhan akan bantuan perawatan kesehatan bagi lansia. Namun, ada fakta lain yang menunjukkan bahwa masalah kesehatan sering dianggap bukan masalah fisik, tetapi masalah persepsi. Maksud-

nya, sakit dan sehat juga tergantung pada cara melihatnya. Dalam hal ini, munculnya anggapan bahwa lansia bermakna ketidakmampuan dan berfisik ringkih cukup dominan. Bagi peneliti, anggapan seperti itu justru menyulitkan posisi lansia.

Penduduk usia lanjut identik dengan kesehatan yang menurun. Penelitian ini juga menunjukkan bahwa cukup banyak dari mereka memiliki masalah kesehatan, khususnya tekanan darah tinggi (26,6 persen). Penyakit lain yang mereka rasakan umumnya berkisar pada masuk angin, pusing, dan influenza. Penyakit jenis ini biasa dirasakan sekitar tiga hari. Selama terkena penyakit itu mereka pada umumnya hanya mengatasinya dengan jalan *kerokan* atau membeli obat-obat di sekitar tempat tinggal mereka, seperti di warung. Cara lain adalah menggunakan obat-obatan tradisional, baik yang dijual di toko atau warung maupun ramuan sendiri. Sebagai kasus, misalnya Yunisah, 67 tahun, menggunakan air rebusan kacang hijau untuk mengobati panas badan, minum air perasan kencur untuk menghilangkan batuk, dan menghindari berpikir yang berat penyebab stres agar bisa beristirahat dan tidur tenang sehingga terhindar dari sakit.

Tampaknya usaha mencegah penyakit giat dilakukan para lansia. Cara yang digunakan bermacam-macam. Sebagai contoh, Soesmiarto, 70 tahun, melakukan yoga dan semedi ajaran Sapta Dharma. Isah dan Mira, keduanya 67 tahun, berusaha selalu bergerak dengan melakukan kegiatan seperti menyapu, membersihkan rumah, dan mengangkat air sebagai olahraga sekaligus kegiatan produktif. Berbagai kegiatan pencegahan itu dilakukan bersamaan dengan upaya untuk menjaga kondisi psikologis, tidak berpikir yang berat-berat karena mereka yakin bahwa salah satu sumber penyakit adalah pikiran. Artinya, kalau bebannya banyak, mereka akan mudah terkena penyakit. Bagaimana peran lembaga kesehatan modern seperti puskesmas dan dokter? Secara umum dapat dikatakan bahwa para lansia mempercayai kemampuan keduanya dalam mengobati penyakit. Namun, lebih banyak dari mereka yang tidak memanfaatkannya. Mengapa? Sebagian besar beranggapan bahwa selama ini sakit yang mereka rasakan tidak berat. Bila memang dirasakan berat, mereka akan menggunakan jasa lembaga kesehatan modern. Yang lain merasa bahwa karena usia mereka telah tua, beberapa penyakit yang diderita

merupakan sesuatu yang mudah dialami. Ada kepasrahan dan ini dinilai sebagai cara terbaik untuk menghadapi masalah kehidupan.

Harus diakui bahwa ada kendala ekonomis yang berat bila harus berobat modern, tetapi mereka sulit mengemukakan masalah ini. Isah, misalnya, memiliki kartu asuransi kesehatan, tetapi enggan menggunakannya. Dia memang bisa mendapatkan pemeriksaan secara gratis, tetapi selalu ada obat yang harus dibeli karena tidak ditanggung pihak asuransi, dan itu hampir pasti tidak terjangkau. Pendapatannya yang sangat kecil, Rp50.000,00 sebulan, dipastikan tidak cukup untuk memenuhi kebutuhan selain makan. Ini sangat kontras dengan Mira, yang kehidupannya berkecukupan karena berapa pun kebutuhannya, akan ditanggung oleh anak-anaknya. Dia selalu melakukan *chek-up* kesehatan rutin setiap enam bulan sekali. Hasil penelitian ini tidak menemukan lansia lain selain Mira yang melakukan upaya kesehatan begitu baik.

Miskin pada usia tua, apa yang bisa dilakukan? Bertahan hidup. Bagi lansia miskin, sakit dan harus berobat berarti akan menambah miskin. Kromo, 75 tahun, barangkali mewakili kelompok ini. Dia berpendapat seperti berikut.

Ke puskesmas tidak ... ke dokter tidak. Doa saya jangan sampai sakit he ... he ... he. Orang nggak punya kalau harus masuk rumah sakit ya geger (ekonominya). Saya selalu berdoa supaya sehat ... selamat.

Penutup

Pada akhir tulisan ini perlu dikutip isi pengajian yang diikuti para lansia, intinya terdapat perbedaan yang cukup besar antara perawatan orang tua terhadap anak dengan perawatan yang dilakukan anak terhadap orang tua. Orang tua merawat anak selalu disertai dengan doa agar kelak anaknya menjadi orang yang berguna, baik untuk agama, keluarga, bangsa, maupun negara. Pada sisi lain, jika anak merawat orang tua selalu diikuti dengan keluhan, "Kapan hal tersebut akan berakhir." Beberapa hasil penelitian tentang kondisi ekonomi dan perawatan yang diinginkan penduduk lansia adalah sebagai berikut.

1. Sekitar 40 persen lansia aktif dalam pasar kerja dan 0,5 persen lansia menderita sakit, seperti tekanan darah tinggi dan rematik. Adalah tidak benar apabila dikatakan lansia memiliki kondisi fisik yang lemah, tidak sehat, dan tidak aktif secara ekonomi. Beberapa kasus memperlihatkan bahwa

seorang janda mampu hidup tanpa tergantung pada anggota rumah tangga lain.

2. Rata-rata pendapatan lansia ialah 168 ribu rupiah per bulan dengan bantuan dari anggota keluarga sebesar 59 ribu rupiah. Hal ini berarti bahwa satu pertiga pendapatan lansia berasal dari santuan. Namun, pendapatan tersebut belum bisa mencukupi kebutuhan hidup karena lansia memiliki total pengeluaran yang cukup besar yakni 249 ribu rupiah.
3. Peran masyarakat dalam membantu mencukupi kebutuhan keluarga lansia sangat besar, dan peran masyarakat sebagai pengganti anggota keluarga cukup besar pula. Kondisi tersebut pulalah yang melatarbelakangi lansia tidak menyukai panti jompo. Namun, kondisi itu tidak akan bertahan seandainya kohesitas masyarakat mengalami penurunan. Jika hal tersebut terjadi, panti jompo merupakan solusi yang cukup tepat mengingat perubahan struktur keluarga, pola mobilitas, dan kondisi ekonomi lansia dan anak terus terjadi. Yang menjadi permasalahan adalah kondisi sosial dan budaya lansia yang selalu menolak adanya panti jompo. Perlunya sosialisasi panti terhadap lansia untuk mengubah

persepsi lansia terhadap panti jompo sangat diperlukan. Di samping itu, perlu adanya pembaharuan pelayanan dalam panti sehingga lansia merasa nyaman dan mendapatkan teman baru dengan

tinggal di panti. Permasalahan yang pokok adalah tidak semua lansia dan keluarganya memiliki ekonomi yang baik agar bisa menjadi penghuni panti yang memiliki kualitas perawatan yang memadai.

Referensi

- Adi, Riyanto. 1982. *The Aged in the Homes for the Aged in Jakarta: Status and Perceptions*. Jakarta: Pusat Penelitian Universitas Atmajaya.
- Biro Pusat Statistik. 1974. *Sensus Penduduk 1971*. Jakarta.
- — — — —. 1991. *Sensus Penduduk 1990*. Jakarta.
- — — — —. 1996. *Survei Penduduk Antar Sensus 1995*. Jakarta.
- Deeken, A. 1986. *Usia Lanjut*. Yogyakarta: Kanisius.
- Emilia, Ova, Mubasyir Hasanbasri, Yayi S. Prabandari, Djaswadi Dasuki. 1995. "Penduduk lanjut usia propinsi Daerah Istimewa Yogyakarta: studi kualitatif terhadap permasalahan usia lanjut," *Berita Kedokteran Masyarakat* 11(2): 43-56.
- Prawitasari, Johana E. 1994. "Aspek sosio-psikologis lansia di Indonesia," *Buletin Psikologi* 2(1): 27-34.
- Sajogyo. 1996. *Garis Kemiskinan dan Kebutuhan Minimum Pangan*. Yogyakarta: Aditya Media.
- Soemardjan, Selo. 1993. "Lanjut usia, sejahtera, bahagia." *Semiloka Pemantapan Operasionalisasi Pola Asuh Anak Remaja dan Peran serta Lansia dalam Pembangunan Keluarga Sejahtera*. Yogyakarta, 31 Juli - 2 Agustus, BKKBN DIY.
- Wirakartakusumah, Djuhari, Edi Priyono. 1994. "Lansia sebagai modal pembangunan, peluang dan tantangan," *Warta Demografi* 24(1): 4-11.
- Sunarto, H.S. 1978. *Kehidupan Ekonomi Orang-orang Lanjut Usia: Studi Kasus Desa di Yogyakarta*. Yogyakarta: IKIP Karang Malang.

STRATEGI BERTAHAN HIDUP DI TIGA WILAYAH

Dyah Ratih Sulistyastuti dan Faturochman*

Abstract

The paradigm of trickle down effect development is not occurred by itself. Thus, there are some groups within the society that still have not derived from the outcome of the development. Those groups remain living in poverty which need government attention. Although the government has intervened to undertake poverty in the forms of the national development programs, have not been able to achieve their goals due to the various drawbacks and implementations. These obstructions have frequently related with the decision of the aspects of real target groups, and the problems of the unequal distribution. Besides problems of implementation, these programs had not meet with success in providing empowerment and sustainability, therefore, the poor had to actively create a strategy for survival. In discussing issues about poverty, it is imperative to further examine not only the causes and the problems of it, but also another important issue such as efforts of the suffering society to overcome its problem. Various strategies as a response of the limitations of government role towards society can be categorized into two levels: the households, that would be the focus of the discussion, and the community levels.

Pengantar

Seandainya *invisible hand* benar-benar berjalan seperti yang dikemukakan oleh para penganut ekonomi pasar bebas, pemerintah tidak perlu ada. Kemakmuran dan keadilan akan terjadi sendirinya dengan diatur oleh pasar. Akan

tetapi, dalam kenyataannya kemakmuran dan keadilan sebagaimana yang dicitrakan tersebut tidak pernah terwujud. Ini terjadi karena prasyarat pasar yang ideal memang belum pernah dapat terpenuhi. Akibat kega-

* Dyah Ratih Sulistyastuti, S.I.P. adalah asisten peneliti pada Pusat Penelitian Kependudukan, Universitas Gadjah Mada, Yogyakarta.

* Drs. Faturochman, M.A. adalah peneliti Pusat Penelitian Kependudukan, Universitas Gadjah Mada dan pengajar Fakultas Psikologi, Universitas Gadjah Mada, Yogyakarta.

galannya, muncul sekelompok orang yang memonopoli pasar. Hanya mereka yang memegang kendali produksi (pemilik kapital) yang dapat mengendalikan perekonomian atau mengatur distribusi kemakmuran sehingga mereka pula yang akan memperoleh kemakmuran. Sisanya, kaum miskin, cacat, dan manula tidak akan memperoleh bagian. Akibatnya, dalam sistem pasar seperti itu masyarakat terbagi menjadi dua golongan besar yaitu mereka yang makmur (yang menang dalam persaingan) dan mereka yang miskin (yang kalah dalam persaingan).

Karena pasar tidak pernah bisa diandalkan menjadi distributor kemakmuran yang adil, intervensi negara menjadi sangat diperlukan. Hukum ini yang dianut oleh pemerintah Indonesia ketika memulai pembangunan sejak Pelita I digulirkan, lebih dari 30 tahun yang lalu. Pembangunan dimaksudkan sebagai upaya secara aktif oleh pemerintah agar semua masyarakat dapat memperoleh kehidupan yang layak yaitu semua kebutuhan dasar hidup terpenuhi. Pemerintah membangun jalan, sarana kesehatan, fasilitas pendidikan, pelayanan air minum, dan berbagai bentuk pelayanan publik lainnya

untuk masyarakat. Pemerintah juga memberikan subsidi bagi kelompok yang kalah dalam kompetisi pasar seperti petani kecil, nelayan, industri kecil, dan kelompok-kelompok yang kurang beruntung seperti manula, orang cacat, dan anak yatim. Maksud dari semua itu adalah agar kesejahteraan masyarakat dapat diwujudkan. Dalam proses pembangunan tersebut, pemerintah juga berupaya sebagai wasit yang adil agar mekanisme pasar berjalan dengan wajar. Pemerintah mencoba memberikan proteksi bagi yang lemah dari hisapan kelompok yang kuat. Fungsi sebagai wasit yang adil tersebut tercermin dalam kebijakan-kebijakan pemerintah yang bersifat distributif, kompetitif regulatif, protektif regulatif, dan redistributif.

Peran pemerintah untuk mewujudkan kesejahteraan tersebut belum dapat diwujudkan karena berbagai hambatan, seperti korupsi, kolusi, nepotisme, dan bias terhadap kaum kapitalis. Akibatnya, sejumlah besar kelompok masyarakat yang seharusnya mendapat bantuan pemerintah tersebut justru tidak tersentuh oleh berbagai program pemerintah. Kegagalan pemerintah ini dengan sangat jelas terlihat

dari berbagai indikator, baik kemiskinan, kesejahteraan, maupun indikator yang menunjukkan terjadinya kesenjangan, seperti meningkatnya kejahatan, kerusuhan, penjarahan, dan sejenisnya. Sebagai konsekuensi dari kegagalan negara dalam mewujudkan kesejahteraan dalam bentuk jaminan sosial kepada kelompok miskin atau kurang beruntung maka masyarakat terpaksa harus berusaha sendiri agar dapat bertahan hidup. Upaya-upaya tersebut dilakukan, baik secara individual, rumah tangga, maupun dalam lingkaran yang lebih luas oleh orang-orang yang masih mempunyai hubungan kekerabatan ataupun dalam suatu ikatan komunitas.

Tulisan ini mendeskripsikan cara bertahan hidup yang dilakukan oleh masyarakat dalam mengatasi kesulitan hidup. Data yang digunakan adalah hasil penelitian *Social Security and Social Policy in Indonesia* yang dilakukan pada tahun 1997-1998 di tiga lokasi, yaitu di Desa Keboansikep, Kabupaten Sidoarjo; Kalitengah, Kabupaten Klaten; dan Sriharjo, Kabupaten Bantul. Keboansikep merupakan daerah *urban*, Kalitengah merupakan desa transisi dari *rural* ke *urban*, sedangkan Sriharjo merupakan daerah per-

desaan. Setiap lokasi mempunyai karakteristik yang berbeda-beda (Kortteinen, 1998). Saat penelitian berlangsung secara kebetulan bersamaan waktunya dengan terjadinya krisis ekonomi yang menimpa Indonesia sejak pertengahan 1997. Oleh karena itu, dalam tulisan ini dibahas strategi bertahan hidup yang dilakukan masyarakat dalam mencukupi kehidupan sehari-hari dalam kondisi krisis yang terjadi.

Secara umum strategi yang dikembangkan secara aktif oleh masyarakat ini sebagian besar berkaitan dengan aspek ekonomi rumah tangga untuk memenuhi kebutuhan dasar. Upaya-upaya ini terutama ditujukan untuk bertahan hidup (Cederroth, 1995). Dari berbagai macam strategi bertahan hidup yang diupayakan oleh masyarakat miskin, secara umum dapat dibedakan dalam dua pendekatan. Pertama, pendekatan yang lebih aktif dilakukan dengan menambah pemasukan. Kedua, pendekatan yang lebih pasif dilakukan dengan memperkecil pengeluaran. Tidak jarang dua pendekatan ini dilakukan secara bersama-sama, secara lebih aktif menambah pemasukan, tetapi juga sekaligus berusaha mengurangi pengeluaran. Mekanisme strategi bertahan hidup

yang diciptakan masyarakat tersebut dipengaruhi oleh banyak faktor, tetapi kondisi geografis, utamanya potensi alam, kemajuan pembangunan lokal yang memberikan peluang kerja serta lembaga sosial setempat, dan tradisi (*social and economic setting*) merupakan faktor yang cukup berpengaruh.

Pada dasarnya mekanisme bertahan hidup ini dapat berlangsung pada dua tingkat, yaitu tingkat keluarga dan tingkat komunitas. Pada tingkat keluarga, strategi bertahan hidup meliputi dua lingkungan, yaitu keluarga batih dan keluarga luas. Strategi bertahan hidup oleh keluarga batih menekankan pada aspek ekonomi, melalui pemanfaatan tenaga kerja keluarga, pemanfaatan sumber daya yang dimiliki, mekanisme aliran modal, serta warisan dan penghematan. Pada dasarnya strategi keluarga ini ditujukan untuk memenuhi kebutuhan hidup dan pemenuhan kesejahteraan pada tingkat dasar. Dalam lingkungan keluarga luas, strategi bertahan hidup tidak hanya meliputi aspek ekonomi, tetapi juga menyangkut aspek sosial seperti gotong-royong membangun rumah, pindah rumah, membuat bata merah, dan sebagainya. Mekanisme strategi

bertahan hidup pada masyarakat lebih bersifat umum dibandingkan dengan yang telah disebutkan pada tingkat rumah tangga, seperti gotong-royong membersihkan jalan, membantu pada saat tetangga mempunyai hajatan, dan mengurus orang meninggal. Pembahasan berikut ini lebih mengkhhususkan pada strategi bertahan hidup yang ada pada lingkup keluarga batih.

Pemanfaatan Pekerja Keluarga

Fenomena umum yang ditemukan dalam berbagai penelitian (Faturochman, 1999; Hart, 1980; Muntiyah dan Sukamdi, 1997) menegaskan bahwa dalam suatu keluarga cenderung ada lebih dari satu anggota yang aktif secara ekonomi. Ada dua hal yang mempengaruhi pemanfaatan pekerja keluarga ini. Pertama, penghasilan yang diperoleh oleh kepala keluarga, baik penghasilan pokok maupun sampingan sangat terbatas. Kedua, tersedianya lapangan kerja di daerah tersebut. Dari berbagai sumber diperoleh informasi bahwa faktor terbesar yang mendorong anggota rumah tangga, selain kepala rumah tangga, bekerja merupakan suatu kebutuhan. Bila mereka tidak ikut bekerja, kebutuhan rumah tangga akan sulit dipenuhi. Namun,

upaya ini sering menemui hambatan karena tidak tersedianya peluang kerja sehingga kemudian mereka terpaksa melakukan pekerjaan apa saja meskipun dengan risiko mendapatkan penghasilan yang rendah. Dalam hal ini kemudian jenis pekerjaan tidak dijadikan masalah, yang penting memperoleh penghasilan. Mereka inilah yang sering disebut dengan pekerja yang terpaksa bekerja.

Data Tabel 1 dan Tabel 2 menegaskan bahwa tanggung jawab untuk mencari nafkah bukan hanya tanggung jawab kepala rumah tangga. Hasil penelitian menunjukkan bahwa

lebih dari 90 persen kepala rumah tangga memang bekerja, tetapi tidak berarti bahwa mereka satu-satunya pencari nafkah keluarga. Analisis lebih lanjut menunjukkan bahwa hanya sekitar sepertiga dari rumah tangga yang diteliti memosisikan kepala rumah tangga sebagai satu-satunya pencari nafkah. Peran pasangan hidup, yang sebagian besar istri, ternyata sangat besar. Hal ini terbukti karena hampir separo jumlah rumah tangga yang diteliti menyatakan bahwa istrinya ikut menyumbang pendapatan rumah tangga. Fakta juga menunjukkan bahwa bentuk rumah tangga *double earner* paling besar porsi-

Tabel 1
Persentase Anggota Rumah Tangga yang Bekerja

Anggota rumah tangga yang bekerja	Sriharjo (356)	Kalitengah (321)	Keboansikep (262)
Kepala keluarga	92,4	92,2	90,5
Istri	45,8	55,1	46,6
Anak	30,1	23,7	26,7
Menantu	9,8	6,5	10,3
Orang tua	1,7	0,6	1,9
Mertua	0,8	0,3	0,8
Cucu	0,3	0,3	0,8
Anggota keluarga lain	1,4	2,5	7,3
Bukan anggota keluarga	-	-	0,4

Sumber: Survei *Social Security and Social Policy*, PPK-UGM, 1998

nya. Dari tiga wilayah yang diteliti, keterlibatan istri dalam ekonomi rumah tangga paling menonjol ditemukan di Kalitengah. Hal ini disebabkan oleh adanya kesempatan kerja yang lebih besar bagi perempuan untuk ikut aktif secara ekonomi, yaitu sebagai buruh jahit (di Kalitengah terdapat puluhan perusahaan konveksi), buruh perkebunan tembakau, berjualan di pasar, dan berbagai aktivitas ekonomi yang lain. Pada waktu penelitian berlangsung, produktivitas pada industri garmen dan konfeksi sedang mengalami penurunan yang cukup drastis. Dalam kondisi ekonomi normal diperkirakan keterlibatan mereka akan lebih besar. Meskipun peran istri cukup besar sebagai kontribusi penghasilan rumah tangga, karena peran ganda dalam rumah

tangga, sebagai istri dan pekerja, peran ekonomis istri akan sulit untuk bisa setara dengan suami yang menyandang predikat sebagai *soko guru* ekonomi keluarga.

Di samping kepala rumah tangga dan istri, anggota rumah tangga yang ikut berperan dalam ekonomi rumah tangga adalah anak. Perlu diberi catatan di sini bahwa meskipun status mereka anak, tidak berarti bahwa mereka semua termasuk pekerja anak. Sebagian besar di antaranya sudah termasuk golongan usia kerja, bahkan ada yang sudah berkeluarga, tetapi masih menjadi bagian rumah tangga tersebut karena secara ekonomi masih menjadi satu. Dalam beberapa rumah tangga juga ditemukan tidak hanya satu anak yang bekerja. Makin banyak anak yang

Tabel 2
Persentase Jumlah Anggota Rumah Tangga yang Bekerja

Jumlah yang bekerja	Sriharjo	Kalitengah	Keboansikep
Tidak ada	1,1	1,9	1,9
Satu orang	34,6	32,2	29,4
Dua orang	42,5	47,2	44,2
Tiga orang	16,9	12,2	16,8
Empat orang dan lebih	4,9	6,5	7,7
	100,0	100,0	100,0

Sumber: Survei *Social Security and Social Policy*, PPK-UGM, 1998

berusia dewasa dan tidak bersekolah, makin banyak yang membantu ekonomi rumah tangga.

Keterlibatan istri dan anak dalam mencari nafkah menunjukkan bahwa penghasilan kepala keluarga tidak mencukupi semua pengeluaran rumah tangga. Hal ini terjadi karena pendapatan yang diterima oleh setiap pekerja yang bekerja ada pada sebagian besar jenis pekerjaan kasar. Sebagai ilustrasi ditunjukkan pada Tabel 2 bahwa ternyata persentase terbesar rumah tangga mempunyai dua orang anggota rumah tangga atau lebih yang bekerja. Hal ini disebabkan jika dalam satu rumah tangga yang bekerja hanya satu orang, penghasilan tersebut tidak akan dapat menutup semua pengeluaran rumah tangga. Selain penghasilan yang rendah, sebagian masyarakat menghadapi masalah mengenai ketidakpastian sumber penghasilan. Hal ini menjadi tekanan yang berat bagi penduduk miskin. Misalnya petani, hasil panennya sangat tergantung pada banyak faktor

(musim, hama, modal kerja), begitu juga buruh bangunan yang sangat tergantung pada kondisi atau perkembangan ekonomi nasional. Pada saat krisis, buruh bangunan paling awal merasakan dampak krisis karena terhentinya berbagai proyek pembangunan.

Sebagian besar upaya pemanfaatan pekerja rumah tangga masih ditujukan untuk bertahan hidup daripada peningkatan kesejahteraan. Hal ini terbukti dari kontribusi penghasilan total kepala rumah tangga terhadap penghasilan total rumah tangga, yaitu sekitar 55 persen dan setara dengan 60-70 persen dari semua pengeluaran rumah tangga (Tabel 3). Kekurangan penghasilan kepala rumah tangga untuk memenuhi kebutuhan ini memberikan peran penting bagi anggota rumah tangga lain. Data ini juga menunjukkan bahwa peran kepala rumah tangga, walaupun harus dibantu, masih sangat besar*. Peran ekonomis anggota rumah tangga semakin besar di wilayah urban. Fakta menunjukkan bahwa, baik secara

* Data tentang peran kepala rumah tangga ini perlu diberi catatan khusus secara metodologis sebab hal ini sangat mungkin disebabkan bias responden dalam memberikan jawaban. Anggota rumah tangga lain sering sejak awal menempatkan diri sebagai orang "sekedar membantu" sehingga perannya tampak lebih kecil daripada yang sesungguhnya.

absolut maupun secara relatif, ada peningkatan sumbangan anggota rumah tangga selain kepala rumah tangga di wilayah *semi urban* dan makin tinggi lagi di wilayah *urban*. Untuk sementara,

data-data ini memperkuat dugaan bahwa faktor kesempatan kerja ikut berperan dalam mengaktifkan anggota rumah tangga dalam pasar kerja.

Tabel 3
Rata-rata dan Proporsi Penghasilan serta Pengeluaran

	Sriharjo	Kalitengah	Keboansikep
Penghasilan (dalam rupiah)			
1. Penghasilan pokok kepala rumah tangga	100.650	175.865	253.655
2. Hasil samping kepala rumah tangga	19.190	14.395	5.625
3. Hasil total kepala rumah tangga	119.840	190.260	259.280
4. Hasil istri	32.900	84.700	190.110
5. Hasil anak	29.850	46.900	75.400
6. Hasil lain	37.740	43.090	10.550
7. Penghasilan total rumah tangga	220.330	364.950	535.340
Proporsi			
1. Penghasilan pokok KK / hasil total RT	0,46	0,48	0,47
2. Hasil total KK / hasil total RT	0,54	0,52	0,48
3. Hasil total istri/hasil total RT	0,15	0,23	0,36
4. Hasil total anak/hasil total RT	0,14	0,13	0,14
5. Penghasilan lain/hasil total RT	0,17	0,12	0,20
Pengeluaran (dalam rupiah)			
1. Makanan dan minum	96.750	137.685	174.935
2. Bukan makanan dan minum	70.600	115.960	225.585
3. Pengeluaran total rumah tangga	167.350	253.640	400.515
Proporsi			
1. Pengeluaran makan/pengeluaran total	0,58	0,54	0,44
2. Pengeluaran total/hasil total	0,76	0,69	0,75
3. Penghasilan total istri/pengeluaran total	0,20	0,33	0,47
4. Penghasilan total anak/pengeluaran total	0,18	0,18	0,19

Sumber: Survei *Social Security and Social Policy*, PPK-UGM, 1998

Sriharjo merupakan daerah agraris lahan kering dan sektor pertaniannya tidak mampu menopang kehidupan penduduknya. Kepala keluarga memiliki kontribusi separo lebih dari penghasilan total rumah tangga. Penghasilan total kepala keluarga ini hanya dapat mencukupi kebutuhan makan. Kekurangan yang masih harus dipenuhi untuk mencukupi semua kebutuhan rumah tangga dalam sebulan sekitar 30 persen. Keterlibatan anggota rumah tangga untuk kelangsungan hidup rumah tangga ternyata tidak didominasi oleh istri saja. Data menunjukkan bahwa peran anak, setelah istri, terhadap perekonomian rumah tangga juga besar. Sriharjo memiliki proporsi keterlibatan anak yang paling tinggi. Kondisi ini dimungkinkan berkaitan dengan proporsi anak yang sudah menikah, tetapi mereka yang masih ikut orang tua juga tinggi. Istri memberikan kontribusi 19,6 persen untuk mencukupi kebutuhan rumah tangga, sedangkan kontribusi anak 17,8 persen.

Pada kondisi perekonomian normal dengan angka pertumbuhan 6-7 persen, sektor perdagangan dan jasa cukup menguntungkan. Ketika perekonomian mengalami penurunan maka sektor pertanian

menjadi andalan. Sebagian besar masyarakat di Kalitengah dan Sriharjo memiliki pekerjaan sampingan di sektor pertanian. Fenomena ini dapat dilihat dari ilustrasi keluarga Bahtiar (Kalitengah). Keluarga Bahtiar relatif sejahtera karena memiliki dua sumber penghasilan yaitu sebagai buruh jahit dan petani. Pekerjaan sebagai buruh jahit dijadikan sebagai pekerjaan utama yang dilakukan sehari-hari. Sementara itu, sisa waktunya dia manfaatkan untuk mengerjakan sawah. Dalam setahun rata-rata ia dapat memanennya tiga kali, yang menghasilkan antara 1,2-1,5 juta rupiah (antara 100.000-125.000 rupiah per bulan) dan hasil dari buruh jahit rata-rata sebesar Rp210.000,00 per bulan. Bahkan, pada masa krisis ekonomi, keluarga Bahtiar tampak lebih stabil dibandingkan dengan keluarga yang mengandalkan pekerjaan di sektor garmen saja (Kustantina, 1998). Demikian juga, sebagian besar masyarakat Sriharjo yang kehilangan pekerjaan sebagai buruh bangunan mengandalkan bekerja di sawah/ladang. Hal yang menarik pada saat krisis ialah para buruh bangunan ini berubah profesi sebagai *penderep* (tenaga upahan menuai padi) di daerah lain, bahkan ada yang

lokasi bekerjanya sampai di luar Daerah Istimewa Yogyakarta.

Keterlibatan anggota rumah tangga untuk bekerja ini berkaitan dengan kondisi perekonomian lokal yang memunculkan lapangan kerja. Pada daerah transisi, sektor pertanian dan sektor industri/jasa berkembang secara seimbang sehingga memberikan peluang kerja yang relatif lebih bervariasi. Sektor industri/jasa yang berkembang masih bersifat informal dengan teknologi rendah. Oleh karena itu, sektor ini memberikan peluang besar bagi masyarakat. Hal ini dapat ditunjukkan dengan apa yang ada di Kalitengah sebagai daerah transisi yang memiliki proporsi keterlibatan istri bekerja paling tinggi. Tingginya proporsi keterlibatan istri ini berkaitan dengan peluang kerja di sektor industri garmen yang memberikan banyak kesempatan bagi pekerja perempuan. Selain sektor garmen, kehadiran PTPN X (Perseroan Terbatas Perkebunan Nasional) memberikan peluang kerja bagi perempuan. Pekerja perempuan yang bekerja sebagai buruh perkebunan tembakau diupah Rp4.000,00 per hari dengan rata-rata jam kerja 5,5 jam.

Di Sriharjo, sumber mata pencaharian masih didominasi

oleh sektor pertanian. Akan tetapi, lahan pertanian di Sriharjo yang diteliti merupakan lahan kering sehingga tidak dapat memberikan hasil yang maksimal. Jenis pekerjaan lain yang dilakukan masyarakat Sriharjo adalah sektor jasa. Hal ini bukan saja bagi kepala keluarga, tetapi juga bagi istri dan anggota rumah tangga lain. Pada Tabel 1, keterlibatan istri untuk bekerja di Sriharjo adalah paling rendah. Untuk memperbesar penghasilan rumah tangga, mereka melibatkan anak dalam bekerja, sedangkan Kalitengah sesuai dengan statusnya sebagai daerah transisi, merupakan daerah kombinasi antara kegiatan pada sektor pertanian dan industri. Lahan pertanian di Kalitengah berbeda dengan lahan pertanian di Sriharjo. Lahan pertanian di Kalitengah adalah lahan yang subur dengan sistem irigasi yang baik. Kalitengah merupakan area penanaman tembakau. Keberadaannya sebagai lahan yang subur dan area tembakau menjadikan daerah ini lebih menguntungkan. Pada musim penghujan, lahan ini dapat ditanami padi secara baik. Pada musim kemarau, persawahan di Kalitengah banyak ditanami tembakau. Pada saat musim tembakau, kesempatan kerja di

sektor ini terbuka luas. Meskipun Keboansikep sebagai daerah industri yang menawarkan kesempatan kerja lebih luas, keterlibatan istri untuk bekerja lebih kecil dibandingkan dengan daerah Kalitengah. Hal ini terjadi karena penghasilan kepala

keluarga paling besar dibandingkan dengan dua daerah lainnya dan penghasilan kepala keluarga ini sudah dapat memenuhi kebutuhan makan. Selain sektor pertanian, sektor industri yaitu industri garmen merupakan peluang kerja yang cukup besar.

Tabel 4
Sektor Pekerjaan Anggota Rumah Tangga

	Sriharjo (356)	Kalitengah (321)	Keboansikep (262)
Kepala Keluarga			
1. Pertanian	59,0	35,9	5,3
2. Perdagangan	3,4	11,2	9,5
3. Industri	3,9	25,5	30,6
4. Jasa	29,5	22,1	49,6
5. Tidak bekerja	4,2	5,3	5,0
Istri			
1. Pertanian	19,7	10,3	0,8
2. Perdagangan	15,7	17,7	14,5
3. Industri	9,0	25,7	26,7
4. Jasa	7,9	7,9	10,3
5. Tidak bekerja	47,7	38,4	47,7
Anggota Rumah Tangga lain			
1. Pertanian	9,0	1,2	0,4
2. Perdagangan	2,8	1,6	1,5
3. Industri	3,9	8,4	22,9
4. Jasa	17,7	14,6	12,6
5. Tidak bekerja	66,6	74,2	62,6

Sumber: Survei *Social Security and Social Policy*, PPK-UGM, 1998

Sebesar 25,5 persen KK dan 26,5 persen istri bekerja di sektor industri, sedangkan peluang kerja di sektor jasa banyak didominasi oleh anggota rumah tangga lain.

Keboansikep, sesuai dengan statusnya sebagai daerah industri maka daerah ini didominasi oleh dua sektor lapangan kerja, yaitu sektor industri dan sektor jasa. Khusus kepala keluarga, mereka lebih banyak bekerja di sektor jasa (49,6 persen) daripada sektor industri (30,5 persen). Proporsi terbesar pekerjaan di sektor jasa terutama dilakukan oleh penduduk asli. Penduduk asli menyediakan fasilitas untuk pendatang, yaitu dengan menyewakan kamar, sedangkan sektor industri lebih banyak diisi oleh pendatang. Kebanyakan para istri bekerja di sektor industri (26,7 persen) daripada sektor jasa (10,3

persen). Demikian juga bagi anggota rumah tangga lain, mereka juga lebih banyak terlibat di sektor industri (22,9 persen) daripada sektor jasa (12,6 persen).

Pekerjaan Sampingan

Selain mengoptimalkan tenaga kerja yang ada dalam rumah tangga, strategi untuk memperoleh penghasilan tambahan adalah mendapatkan pekerjaan sampingan (Cederroth, 1995). Sebagian besar yang melakukan pekerjaan sampingan ini adalah kepala rumah tangga. Hal ini menegaskan bahwa kepala rumah tangga berupaya untuk tetap memegang peranan utama dalam upaya memenuhi kebutuhan rumah tangga. Dari tiga daerah penelitian, ternyata proporsi kepala rumah tangga terbanyak yang mempunyai pekerjaan

Tabel 5
Persentase Rumah Tangga
menurut Jumlah ART yang Mempunyai Pekerjaan Sampingan

Jumlah anggota rumah tangga	Sriharjo (N=356)	Kalitengah (N=321)	Keboansikep (N=262)
Tidak ada	57,6	85,7	90,5
Satu orang	39,6	13,7	9,5
Dua orang dan lebih	2,8	0,6	-
	100,0	100,0	100,0

Sumber: Survei *Social Security and Social Policy*, PPK-UGM, 1998

sampingan adalah di Sriharjo (39,9 persen), kemudian di Kalitengah (13,7 persen), dan di Keboansikep (9,5 persen). Persentase istri yang melakukan pekerjaan sampingan relatif sedikit dan hanya ada di Sriharjo (2,5 persen) dan di Kalitengah (0,6 persen). Jumlah anggota rumah tangga terbesar yang melakukan pekerjaan sampingan terdapat di Sriharjo (Tabel 5). Hal ini disebabkan kecilnya penghasilan yang diperoleh masyarakat Sriharjo dari pekerjaan pokok.

Pekerjaan sampingan ini sering berkaitan dengan kondisi daerah dan penghasilan yang diperoleh dari pekerjaan pokok. Kombinasi yang sering terjadi pada pekerjaan sampingan adalah sektor industri dan jasa dengan sektor pertanian. Sebagai contoh, Sriharjo dan Kalitengah yang masih memiliki lahan pertanian relatif luas, proporsi pekerjaan sampingan masih tinggi. Bedanya, di Sriharjo pekerjaan pokok didominasi oleh sektor pertanian, sedangkan di Kalitengah, sektor industri dan jasa merupakan pekerjaan pokok. Tingginya proporsi pekerjaan sampingan ini berkaitan juga dengan curahan waktu dan penghasilan dari pekerjaan pokok yang masih rendah. Dua masalah ini banyak ditemukan pada sektor

pertanian sehingga tidak mengherankan bila di Sriharjo proporsinya paling besar. Pada sisi lain, kecilnya proporsi pekerjaan sampingan di Keboansikep ini berkaitan dengan bidang pekerjaan pokok yaitu sektor industri. Bagi masyarakat Keboansikep, bekerja di pabrik dirasakan cukup. Selain itu, bekerja di pabrik memerlukan curahan waktu yang cukup lama sehingga orang sudah tidak sempat lagi bekerja. Secara umum dapat ditarik kesimpulan bahwa proporsi penduduk yang memiliki pekerjaan ganda tertinggi berada di daerah miskin.

Melakukan Penghematan

Strategi bertahan hidup yang paling sederhana adalah melakukan penghematan dari berbagai kebutuhan. Penghematan di sini diartikan sebagai upaya mengurangi konsumsi. Dari hasil penelitian di tiga lokasi, penghematan dilakukan dengan menekan pengeluaran bukan makanan dan mengonsentrasikan pengeluarannya untuk makanan dan minuman. Selama krisis, selain memprioritaskan kebutuhan makan, upaya penghematan ini juga dilakukan dengan menggantikan bahan makanan yang lain. Dalam pengeluaran makan pun juga dilakukan penghematan

sehingga menurunkan kualitas menu. Hasil wawancara yang dilakukan di Sriharjo menyatakan bahwa pengurangan pengeluaran untuk konsumsi diikuti pula penghilangan untuk pengeluaran lainnya. Kopi dan teh (minuman manis) mulai hilang dari rumah tangga perdesaan. Demikian juga halnya dengan kebiasaan mengonsumsi makanan kecil di sela-sela jam makan mulai hilang. Kalaupun masih ada, jenis barang yang dikonsumsi beralih pada jenis produk lokal, seperti ketela rebus, kacang rebus, dan berbagai jenis makanan kecil olahan dari ketela pohon.

Dalam rangka menekan pengeluaran, penghematan juga dapat dilakukan dengan mengganti nasi menjadi gaplek, terutama di Sriharjo. Sebagian rumah tangga miskin mulai mengonsumsi makanan yang terbuat dari gaplek dan jagung.

Saat harga beras naik luar biasa, mereka mencoba menyiasatinya dengan mencari alternatif lain. Secara perlahan-lahan mereka mencoba memperkenalkan jenis makanan tradisional mereka kepada generasi muda. Pola lain adalah dengan mencampur nasi dan tiwul pada saat yang sama. Mereka juga berusaha mengurangi pengeluaran untuk lauk-pauk. Untuk kelompok miskin, tempe dan tahu sudah merupakan barang mewah. Penelitian Kutaneegara (1998) mengatakan bahwa mereka lebih banyak makan dengan sayur pedas dan sayur bening. Strategi penghematan ini tentu juga terjadi di daerah lain seperti Kalitengah dan Keboansikep. Kasus di Kalitengah seperti yang ditemukan oleh Purwanto (1999) mengatakan bahwa, strategi penghematan dilakukan dengan menurunkan kualitas makan. Jika sebelum krisis mereka

Tabel 6
Pemanfaatan Tabungan

Jenis pemanfaatan	Sriharjo	Kalitengah	Keboansikep
Biaya pendidikan	39,5	55,5	67,5
Biaya sakit	2,5	7,2	8,4
Kebutuhan mendadak	23,5	19,3	1,2
Saat tidak bekerja	10,1	3,4	6,2

Sumber: Survei *Social Security and Social Policy*, PPK-UGM, 1998

dapat makan dengan tahu, tempe, dan kadang-kadang diselangsing dengan telur seminggu sekali atau dua kali, setelah krisis menu yang dihidangkan adalah nasi, sayur, dan krupuk atau *karak*.

Secara kuantitatif, penghematan dapat dihitung dari penghasilan yang tidak dikonsumsi. Sesuai dengan kondisi wilayahnya yang miskin, rata-rata tabungan yang dimiliki di Sriharjo paling kecil yaitu sebesar Rp56.980,00, sedangkan rumah tangga di Kalitengah dapat menyisihkan pendapatannya rata-rata Rp111.210,00 setiap bulannya. Di Keboansikep sisa dari konsumsi adalah paling tinggi yaitu rata-rata sebesar Rp134.850,00 per bulan. Untuk pengeluaran nonmakan, yang tidak dapat dihindari adalah pengeluaran kebutuhan yang berkaitan dengan kebutuhan dasar, seperti biaya pendidikan, kesehatan, dan sumbangan. Walaupun aktivitas hajatan mengalami penurunan pada masa krisis, pengeluaran untuk sumbangan justru besar. Hal ini terjadi karena harga barang-barang naik. Dengan demikian, nilai rupiah sumbangan pun juga turut naik. Untuk kasus di Sriharjo, patokan sumbangan minimal adalah sebanding dengan 10 kg beras. Kalau sebelum krisis sumbangan-

nya berkisar Rp5.000,00 – Rp8.000,00, setelah krisis jumlah sumbangan naik menjadi Rp20.000,00 – Rp25.000,00. Karena jumlah tersebut dirasakan berat, mereka menurunkan jumlah sumbangan setara 10 kg beras tersebut menjadi Rp15.000,00 – Rp20.000,00 (Kutanegara, 1998).

Pemanfaatan Tabungan

Alternatif strategi bertahan hidup yang lain adalah pemanfaatan tabungan (Cederroth, 1995) dan menjual barang-barang miliknya. Sekitar 33,7 persen rumah tangga di Sriharjo menabung, sedangkan di Keboansikep sebesar 63,0 persen, dan di Kalitengah sebesar 37,1 persen. Pemanfaatan tabungan tersebut terutama untuk biaya sekolah dan keperluan mendadak. Diasumsikan bahwa makin besar pemanfaatan tabungan untuk kebutuhan mendadak dan kebutuhan harian maka makin berat mereka melakukan strategi bertahan hidup. Asumsi ini ada benarnya sebab dari awal ada konsistensi bahwa dari tiga daerah yang diteliti, Sriharjo termasuk wilayah paling miskin dengan dinamika bertahan hidup yang paling berat. Di samping itu, fungsi tabungan pada masyarakat

modern yang makmur pada umumnya ditujukan untuk hal-hal yang progresif, seperti pendidikan anak sebagai cerminan dari investasi untuk masa depan. Dari data yang ada jelas terlihat bahwa dibandingkan dengan di Kalitengah dan Keboansikep, rumah tangga di Sriharjo, sekali lagi, menghadapi tekanan ekonomi lebih berat sehingga perlu strategi bertahan yang juga lebih berat.

Pemanfaatan Pekarangan

Hampir semua rumah tangga di Sriharjo dan sebagian di Kalitengah memanfaatkan lahan yang mereka miliki untuk menambah penghasilan. Beberapa di antaranya juga memelihara ternak sebagai pekerjaan sampingan, tetapi tidak mereka anggap sebagai pekerjaan. Meskipun belum ditemukan data yang rinci mengenai luas lahan untuk mendapatkan tambahan hasil, pemanfaatan lahan berupa penanaman pohon seperti pohon pisang dan pohon kelapa banyak sekali ditemukan di dua wilayah itu. Secara periodik, hasil tanaman kebun dapat diambil untuk dikonsumsi sendiri dan dijual. Bahkan, untuk kasus dua pedukuhan yang diteliti di Sriharjo, sebagian masyarakat

dapat menanam lahan milik pihak lain dengan pohon jati, ketela pohon, jagung, dan kacang tanah. Selain tanaman tersebut, sering mereka mengambil ranting-ranting kering yang berjatuh di hutan (*ngrencek*). Ranting-ranting yang mereka kumpulkan itu dapat dijual seharga sekitar Rp2.500,00 setiap ikat.

Pemanfaatan Jaringan Keluarga

Keluarga luas meliputi jaringan anak-orang tua, saudara sejalur, dan saudara seiring (keponakan, sepupu, paman, bibi, *budhe/pakdhe*). Keberadaan keluarga luas merupakan salah satu bentuk jaminan sosial. Jaringan keluarga yang relatif kuat masih tampak pada hubungan anak-orang tua dan adik-kakak. Melalui jaringan keluarga ini, dimungkinkan adanya aliran bantuan dari anak kepada orang tua maupun dari orang tua kepada anak atau pada keluarga seiring. Fakta di lapangan menunjukkan bahwa cukup banyak rumah tangga yang terdiri dari beberapa keluarga, biasanya keluarga pihak anak dan keluarga pihak orang tua, seringkali saling membantu dalam memenuhi kebutuhan. Dengan kata lain, ada jaminan orang tua kepada anak atau

sebaliknya, jaminan anak kepada orang tua. Data tentang rumah tangga yang terdiri dari dua keluarga atau lebih adalah sebagai berikut: 71 rumah tangga (19,1 persen) di Sriharjo, 29 rumah tangga (11,1 persen) di Keboansikep, dan di Kalitengah 28 rumah tangga (8,7 persen) dapat digunakan untuk memperkuat dugaan ini.

Bentuk jaminan sosial dalam keluarga besar biasanya berupa bantuan uang, bahan makanan, maupun barang modal usaha. Selain barang-barang tersebut, warisan dari orang tua kepada anaknya merupakan bentuk jaminan yang sangat besar. Aliran warisan, baik berupa tanah maupun rumah (Tabel 7) men-

cerminkan fungsi yang besar dari jaringan keluarga.

Selain itu, bantuan orang tua kepada anak juga ditemui pada pola pembangunan rumah. Walaupun rumah tidak diwariskan secara langsung, seringkali proses pembangunan rumah melibatkan keluarga luas, baik secara materi (bahan bangunan) maupun tenaga kerja. Di berbagai daerah proses pembangunan rumah selain dikerjakan oleh tenaga dengan membayar, juga dikerjakan secara gotong-royong, terutama di antara kerabat dan tetangga. Sriharjo sesuai dengan statusnya sebagai daerah *rural*, proporsi gotong-royong masih tinggi yaitu 18,5 persen dan proses pembangunan yang dikerjakan

Tabel 7
Tanah dan Rumah Kaitannya dengan Warisan

	Sriharjo	Kalitengah	Keboansikep
Tanah			
1. warisan	94,3	80,9	47,5
2. bukan warisan	5,7	19,1	52,5
	100,0	100,0	100,0
Rumah			
1. warisan	28,5	33,0	9,3
2. bukan warisan	71,5	67,0	90,7
	100,0	100,0	100,0

Sumber: Survei *Social Security and Social Policy*, PPK-UGM, 1998

secara gotong-royong dan kombinasi dengan membayar tukang hanya 25 persen dari upah normal. Tingginya proporsi gotong-royong ini menandakan bahwa peran keluarga luas di Sriharjo masih penting. Sriharjo juga memiliki tradisi yang unik yaitu rumah *gebyog*. Rumah *gebyog* adalah semacam bangunan rumah yang terbuat dari kayu (hasil tanaman sendiri) yang dapat dipindahkan ke tempat lain. Tujuan pembangunan rumah *gebyog* ini ialah agar orang tua bisa mewariskannya kepada anak yang sudah berkeluarga. Di Kalitengah aliran bantuan dalam usaha garmen dari orang tua untuk anaknya dalam bentuk modal merupakan hal yang biasa.

Melakukan Mobilitas

Selain melakukan strategi bertahan hidup dengan cara menambah penghasilan dan menghemat pengeluaran, maka cara melakukan strategi bertahan hidup yang lain adalah dengan melakukan migrasi. Mobilitas penduduk ini lebih erat kaitannya dengan upaya bertahan hidup dan menambah penghasilan. Karena sulit menemukan kesempatan kerja di tempat asal (karena lahan pertanian yang makin sempit

sementara kesempatan kerja di sektor nonpertanian belum berkembang), mobilitas merupakan salah satu pilihan yang dapat dilakukan. Perbedaan kondisi ketiga daerah penelitian membuktikan konstelasi teoretis itu yaitu desa agraris cenderung merupakan daerah asal migran, sedang daerah urban merupakan daerah tujuan migran.

Desa Sriharjo dengan luas lahan pertanian semakin menyempit, sementara kegiatan pada sektor nonpertaniannya belum berkembang, memaksa penduduknya keluar dari desa asal untuk mencari penghasilan dari daerah lain. Sebelum krisis berlangsung, penduduk Desa Sriharjo banyak yang pergi ke kota-kota besar, terutama Jakarta, Surabaya, dan Yogyakarta untuk mencari penghasilan di sana. Sementara di Desa Kalitengah, aktivitas mobilitas sangat kecil karena kegiatan ekonomi di luar sektor pertanian di daerah tersebut cukup beragam sehingga penduduk yang tidak tertampung di sektor pertanian dapat melakukan aktivitas lain di luar pertanian, sedangkan Desa Keboansikep sebagai daerah industri justru lebih banyak menerima migran dari daerah lain. Sebagian besar migran berasal dari desa-desa di

Jawa Timur, terutama Tulungagung.

Komposisi penduduk, asli dan pendatang, pada ketiga daerah penelitian sebagaimana terlihat dalam Tabel 8 memberikan sedikit gambaran bagaimana pola migrasi penduduk pada masing-masing daerah itu. Dilihat dari daerah asal penduduk, terlihat bahwa penduduk Desa Sriharjo dan Desa Kalitengah sebagian besar merupakan penduduk asli desa tersebut. Sementara penduduk Desa Keboansikep hanya sebagian kecil yang merupakan penduduk asli dan 66,8 persen merupakan penduduk yang berasal dari luar kabupaten.

Persoalan ekonomi yang membelit penduduk Desa Sriharjo sebagai akibat keterbatasan luas lahan telah menyebabkan penduduk melakukan mobilitas

sirkuler ke daerah di sekitar Yogyakarta, misalnya sebagai buruh bangunan atau tukang becak. Pekerjaan tersebut mereka pilih karena relatif tidak membutuhkan keterampilan. Selain itu, kota Yogyakarta dijadikan tujuan para migran sirkuler karena merupakan kota terdekat dan banyak aktivitas proyek pembangunan yang dilakukan. Selain itu, ikatan dengan keluarga di desa yang masih kuat juga merupakan salah satu sebab mengapa penduduk melakukan mobilitas sirkuler. Pilihan untuk melakukan mobilitas sirkuler merupakan gabungan dari faktor pendorong (kekuatan sentrifugal) dengan kekuatan sentripetal yang menahan penduduk tetap tinggal di desa, seperti ikatan kekeluargaan yang kuat dan sistem gotongroyong.

Tabel 8
Daerah Asal Kepala Keluarga

Daerah Asal	Sriharjo (356)	Kalitengah (321)	Keboansikep (262)
Penduduk asli	88,5	74,5	24,4
Desa lain satu kecamatan	5,6	7,2	2,3
Kecamatan lain dalam satu kabupaten	3,7	14,3	6,5
Kabupaten lain dalam satu propinsi	1,7	2,5	50,8
Propinsi Lain	0,6	1,6	16,0

Sumber: Survei *Social Security and Social Policy*, PPK-UGM, 1998

Sebagian besar bentuk mobilitas sirkuler yang dilakukan oleh penduduk Sriharjo adalah komuter atau ulang-alik. Karena jarak antara kota Yogyakarta dan Desa Sriharjo relatif tidak begitu jauh, dapat ditempuh dengan menggunakan sepeda selama kurang lebih satu jam, sebagian besar penduduk Sriharjo yang bekerja sebagai buruh bangunan lebih suka ulang-alik. Selain alasan akomodasi (pemukondan dan makan), ulang-alik sebenarnya juga dapat diartikan sebagai strategi bertahan hidup. Karena dengan ulang-alik, mereka masih dapat melakukan berbagai aktivitas pekerjaan yang lain di rumah pada sore dan malam hari.

Selain di Yogyakarta, banyak penduduk generasi muda di Sriharjo yang memilih bekerja di kota besar seperti Jakarta atau

Surabaya. Survei menunjukkan bahwa 63,8 persen rumah tangga mempunyai anggota keluarga yang tidak tinggal di dalam rumah tangga tersebut, dan 46,1 persen dari persentase tersebut bekerja di luar kabupaten. Hal ini menunjukkan bahwa mobilitas penduduk Sriharjo cukup besar. Selain itu, juga menunjukkan bahwa desentralisasi (ekonomi dan pembangunan) selama ini tidak berhasil karena ternyata kota kabupaten tidak cukup mampu memberikan peluang pekerjaan kepada penduduk di wilayahnya.

Sementara itu, untuk kasus Desa Kalitengah tidak ditemukan data yang berarti tentang mobilitas penduduk. Hal ini karena di Desa Kalitengah kegiatan ekonomi lebih beragam. Bahkan, aktivitas di sektor nonpertanian lebih

Tabel 9
Lama Tinggal Kepala Keluarga di Tiga Daerah

Lama tinggal (tahun)	Persentase		
	Sriharjo	Kalitengah	Keboansikep
≤ 9	34,1	19,5	19,7
10 - 19	26,9	24,4	35,9
20 - 29	21,9	36,6	25,2
30 - 39	9,8	23,1	3,5
40 +	7,1	15,9	5,7

Sumber: Survei *Social Security and Social Policy*, PPK-UGM, 1998

banyak dibandingkan dengan sektor pertanian.

Keadaan yang berkebalikan dengan Sriharjo terjadi di Desa Keboansikep tempat terjadinya arus migran masuk yang cukup besar. Sebagai daerah industri, kawasan ini cukup menarik minat pendatang untuk menetap di Keboansikep. Berdasarkan survai, hanya 24,4 persen yang merupakan penduduk asli (lahir di desa tersebut), 66,8 persen justru berasal dari luar Kabupaten Sidoarjo. Sebagian besar pendatang berasal dari Kabupaten Tulungagung yang dimulai sekitar awal tahun 1970 ketika sebuah pabrik mulai dibangun. Lama tinggal rata-rata penduduk Keboansikep yang baru sekitar 20 tahun sangat jelas menjadi indikator bahwa sebagian besar penduduk di situ merupakan pendatang. Rata-rata lama tinggal tersebut, apabila dilacak, terkait

erat dengan kebijakan Pemerintah Daerah Propinsi Jawa Timur untuk menjadikan daerah tersebut sebagai kawasan industri. Seiring dengan meningkatnya kegiatan industri di daerah tersebut maka jumlah migran masuk juga semakin besar pula.

Penduduk Keboansikep yang sebagian besar pendatang, pada umumnya mengemukakan alasan pindah ke desa tersebut karena pekerjaan (62,1 persen). Kombinasi antara tekanan sumber daya alam yang berat di daerah asal dan kesempatan kerja yang lebih besar di daerah tujuan juga menjadi salah satu penjelasan mengapa banyak penduduk dari Tulungagung melakukan migrasi ke Desa Keboansikep. Hasil wawancara menunjukkan bahwa besarnya proporsi penduduk dari Tulungagung yang menetap di Desa Keboansikep terkait dengan upaya bertahan hidup penduduk

Tabel 10
Rata-rata Besar Kiriman Anak per Bulan

Desa	Jumlah Uang	Jumlah Penerima
Sriharjo	31.492	118
Kalitengah	43.203	65
Keboansikep	44.533	25
Total	36.719	208

Sumber: Survai *Social Security and Social Policy*, PPK-UGM, 1998

daerah tersebut ketika pada tahun 1970 Tulungagung ditimpa banjir besar yang berlanjut terjadinya paceklik karena gagal panen. Akibatnya, banyak penduduk dari daerah tersebut berpindah ke Keboansikep. Beberapa pioner dari Tulungagung yang berhasil kemudian menarik sanak kerabatnya untuk datang ke desa tersebut hingga jumlahnya menjadi besar seperti saat ini.

Dipilihnya migrasi sebagai suatu strategi untuk meningkatkan taraf kehidupan akan memberikan dampak positif dan negatif. Dampak negatif yang ditimbulkan dari tindakan ini bagi daerah asal adalah terjadinya dislokasi tenaga kerja di sektor pertanian dengan semakin berkurangnya tenaga kerja usia muda di sektor ini. Sebagai akibatnya, produktivitas sektor pertanian di desa-desa yang ditinggalkan menjadi semakin menurun. Juga aktivitas ekonomi di sektor pertanian menjadi kurang menarik lagi karena tidak memberikan keuntungan yang memadai dengan semakin mahalnya tenaga kerja di sektor ini. Sementara bagi daerah tujuan, kedatangan para migran ini akan semakin menambah kepadatan penduduk, yang akhirnya ber-muara pada timbulnya berbagai masalah kepen-

dudukan yang lain. Kasus di Desa Keboansikep membuktikan masalah ini. Di Desa Keboansikep masalah kaum pendatang, seperti sering mabuk, hamil di luar nikah, perjudian, dan pencurian, semakin meningkat. Perasaan tidak aman juga mulai dirasakan penduduk Keboansikep pada malam hari.

Sementara itu, dampak positif yang ditimbulkan dari adanya migrasi ini adalah remitan ke daerah asal, serta tersedianya tenaga kerja (yang murah) di daerah tujuan. Besar rata-rata kiriman anak yang bekerja di luar daerah adalah Rp36.710,00 tiap bulan. Besar kiriman anak masing-masing daerah dapat dilihat pada Tabel 10. Jumlah kiriman anak di Desa Sriharjo meskipun rata-rata kecil, menunjukkan frekuensi yang terbesar, yang berarti bahwa jumlah migran yang keluar di Sriharjo cukup besar. Di Desa Keboansikep kedatangan para migran di daerah tersebut membuat kegiatan perekonomian menjadi semakin berkembang. Banyaknya pendatang di daerah tersebut meningkatkan kreativitas penduduk untuk melakukan berbagai jenis usaha, seperti usaha warung makan, telekomunikasi, transportasi, kos, dll. Beraneka ragam jenis usaha ini selain

meningkatkan kesejahteraan penduduk, juga memunculkan jaminan sosial bagi pendatang dan penduduk asli.

Penutup

Beberapa strategi bertahan hidup pada tingkat keluarga dan rumah tangga yang telah dipaparkan di atas tidak mencakup semua strategi yang ada, tetapi hanya sebagian yang menonjol. Tulisan ini juga tidak melihat secara lebih rinci strategi yang dilakukan oleh kelompok strata ekonomi yang berbeda-beda. Hasil pengamatan di lapangan tampak sekali bahwa tiap lapisan masyarakat yang berbeda memiliki cara dan dinamika bertahan hidup yang berbeda pula dengan lapisan yang lain. Meskipun demikian, secara umum dapat dikatakan bahwa semakin rendah status ekonomi, semakin berat upaya untuk bertahan hidup. Satu hal yang

membanggakan dari kelompok ini adalah kegigihannya untuk tetap bertahan dengan menggunakan usaha yang semakin banyak meskipun hanya untuk mendapatkan sedikit uang. Karenanya, campur tangan pemerintah untuk benar-benar memperhatikan dan berpihak pada mereka adalah suatu keharusan. Melihat upaya bertahan hidup seperti itu, pemerintah sebenarnya tidak memerlukan banyak dana karena yang dibutuhkan ialah lebih menekankan pada perlindungan dan kesempatan untuk menjangkau sumber-sumber daya yang ada dan memperoleh keuntungan dari proses pembangunan. Apabila ini diwujudkan dalam berbagai bentuk kebijakan dan program, peran pemerintah sebagaimana dikemukakan di bagian awal tulisan ini akan benar-benar terwujud.

Referensi

- Cederroth, S. 1995. *Survival and Profil in Rural Java*. Richmond, Surrey: Curzon Press.
- Faturochman. 1998. "Bertahan hidup di masa krisis: kasus Kalitengah," *Seminar Social Security and Social Policy*, Yogyakarta, Pusat Penelitian Kependudukan Universitas Gadjah Mada, 28-29 Desember.
- Faturochman. 1999. "Krisis dan nasib buruh di pedesaan," *Populasi* 10(1): 27-42.
- Hart, G. 1980. "Patterns of household labour allocation in a Javanese village", in H.P. Biswanger et al (eds.), *Rural Household Studies in Asia*. Singapore: Singapore University Press.
- Kortteinen, T. 1998. *Urban Peasants and Rural Workers: Making a Living in the Third World*. s.l.: The Finnish Antropological Society.
- Kustantina, Sri Widayawati. 1998. "Indepth dan Studi Kasus Penelitian Social Security di Kalitengah, Wedi, Klaten," *Pertemuan Rutin Social Security*, Pusat Penelitian Kependudukan Universitas Gadjah Mada, Yogyakarta.
- Kutanegara, Pande Made, 1998. "Dinamika Kesejahteraan Masyarakat Miskin: Sriharjo pada Masa Krisis," *Pertemuan Rutin Social Security*, Pusat Penelitian Kependudukan Universitas Gadjah Mada, Yogyakarta.
- Muntyah dan Sukamdi. 1997. "Strategi kelangsungan hidup rumah tangga miskin di pedesaan," *Populasi* 8(2): 35-58.
- Purwanto, Erwan Agus, 1999. "Dampak Krismon pada Buruh Jahit di Desa Kalitengah," *Pertemuan Rutin Social Security*, Pusat Penelitian Kependudukan Universitas Gadjah Mada, Yogyakarta.

RESISTENSI PENDUDUK PERDESAAN DALAM CERITA KESEHARIAN DI KALI LORO

Gutomo Bayu Aji*

Abstract

This analysis is revision of fieldwork journals during the exploration stages at Kali Loro collected in 1999. Data have been acquired through friendly approach, direct observation, and unstructured personal interview. Data analysis was carried out by applying the resistance concept which is defined by James C. Scott of daily narrations in Kali Loro. From the three presented narrations, they show that the kind of resistance contended by Kali Loro inhabitants is in concord with the nature of resistance proposed by Scott. While the first and the second narrations are in accordance with the hidden transcript category, the third one conforms with public transcript category. The resistance takes place in the forms of superior and subordinate structures in a meeting point process of the conflict of interest between class identity and class awareness.

Pendahuluan

Tiga ilustrasi singkat mengenai Koperasi Unit Desa (KUD), Pak Ka, dan pemuda berikut merupakan bagian kecil dari rencana jangka panjang penelitian struktur agraris di Kali Loro.** Ketiga ilustrasi ringkas itu dipilih sebagai contoh bukan karena mereka mewakili kelompok mereka, tetapi karena keadaan biasa yang terjadi sehari-hari mengenai

mereka itu merupakan bagian penting dari dinamika hubungan-hubungan kelas dalam struktur agraris di Kali Loro. Cerita-cerita biasa yang terjadi sehari-hari mengenai KUD, Pak Ka, dan pemuda itu dikumpulkan selama tahap eksplorasi tahun lalu. Data dikumpulkan melalui pendekatan bersahabat, observasi langsung, dan wawancara bebas. Tulisan ini

* Gutomo Bayu Aji, S.Sos adalah asisten peneliti Pusat Penelitian Kependudukan, Universitas Gadjah Mada, Yogyakarta.

** Penelitian ulang Kali Loro telah berlangsung sejak November 1998 hingga saat penulisan dengan berbasis pada studi Ben White dan Ann Stoler tahun 1972-1973.

merupakan revisi dari kumpulan catatan lapangan itu yang ditujukan untuk membuka ide dan mempertajam masalah yang akan diteliti secara luas dan mendalam dalam penelitian struktur agraris di Kali Loro.

Perspektif Resistensi Scottian

Cerita keseharian mengenai KUD, Pak Ka, dan pemuda itu dikumpulkan karena selama ini selain kurang mendapat perhatian, juga kurang mendapat tempat dalam hubungan kelas di perdesaan. Sebagian besar peneliti lebih tertarik untuk melihat sejarah pemberontakan besar petani yang berlangsung secara sporadis sepanjang tahun. Hal ini bukanlah tidak penting, tetapi pemberontakan besar yang terjadi di kalangan petani selama orde pemerintahan itu pun kurang mendapatkan kajian yang memuaskan, dan sebagian besar telah ditanggulangi dengan mudah. Penelitian yang barangkali akan berguna, lebih sesuai, dan memuaskan adalah mengkaji hubungan-hubungan kelas biasa yang terjadi sehari-hari.

Scott telah mengawali “upaya ketidakpuasan” ini dengan sabar, dengan cara mendengarkan dan mengumpulkan cerita-cerita biasa yang terjadi sehari-hari, yang tidak pernah menjadi kepala berita di media massa dan

mengkajinya dalam hubungan kelas perdesaan di Asia Tenggara. Pendekatan pertama yang digunakan berkaitan dengan definisi perlawanan kelas, yang tidak dimaksudkan untuk mengatur suatu pembenaran, melainkan untuk menyoroiti masalah konseptual yang dihadapi dalam pengertian perlawanan itu. Dengan demikian, definisi itu bersifat hipotetis (yang masih diuji oleh Scott sendiri) dan dalam tulisan ini digunakan sebagai teori untuk mendekati cerita biasa yang terjadi sehari-hari mengenai KUD, Pak Ka, dan pemuda di Kali Loro. Agar mudah dimengerti dan dapat diterima secara luas, Scott mendefinisikan perlawanan itu sebagai berikut.

“Perlawanan (*resistance*) penduduk desa dari kelas yang lebih rendah adalah tiap (semua) tindakan oleh (para) anggota kelas itu dengan maksud untuk *melunakkan atau menolak tuntutan-tuntutan* (misalnya sewa, pajak, penghormatan) yang dikenakan pada kelas itu oleh kelas-kelas yang lebih atas (misalnya tuan tanah, negara, pemilik mesin, pemberi pinjaman uang) atau untuk *mengajukan tuntutan-tuntutannya* sendiri (misalnya pekerjaan, lahan, kemurahan hati, penghargaan-

an) terhadap kelas-kelas atasan ini." (Scott, 1993: 302)

Menurutnya, ada tiga aspek dari definisi itu yang perlu diulas secara singkat. Pertama, tidak ada keharusan bagi perlawanan itu untuk mengambil bentuk aksi bersama. Kedua, – dan ini merupakan masalah yang pelik – tujuan-tujuan dibentuk ke dalam definisi itu. Ketiga, definisi itu mengakui apa yang dinamakan sebagai perlawanan simbolis atau ideologis (misalnya gosip, fitnah, penolakan terhadap kategori yang dipaksakan, penarikan kembali sikap hormat) sebagai bagian tak terpisahkan dari perlawanan berdasarkan kelas (Scott, 1993: 303). Ketiga aspek dari definisi perlawanan itu membawa implikasi konseptual yang sangat berbeda dengan perlawanan kelas yang "sesungguhnya" yang diajarkan oleh Leninisme dan yang dianut oleh demokrasi kapitalis.

Perlawanan yang "sesungguhnya", demikian diperdebatkan, bersifat (a) terorganisasi, sistematis, dan kooperatif, (b) berprinsip atau tanpa pamrih, (c) mempunyai akibat revolusioner, dan/ atau (d) mengandung gagasan atau tujuan yang meniadakan dasar dari dominasi itu sendiri. Sebaliknya, penggabungan perspektif perlawanan kelas Gerald Mullin dan Eugene Genovese yang diartikan oleh Scott di atas

hasilnya mirip sebuah dikotomi antara perlawanan *seungguhnya* di satu pihak dan "tanda kegiatan" yang bersifat insidental atau epifenomenal di pihak lain, yang bersifat, (a) tidak terorganisasi, tidak sistematis, dan individual, (b) bersifat 'untung-untungan' dan berpamrih (nafsu akan kemudahan), (c) tidak mempunyai akibat revolusioner, dan/ atau (d) dalam maksud dan logikanya mengandung arti penyesuaian dengan sistem dominasi yang ada (Scott, 1993: 105).

Apabila dihadapkan pada bentuk-bentuk perlawanan bergaya Brechtian seperti yang diuraikan oleh Scott ini, misalnya, bekerja seenaknya, mengelabui, menghambat, berpura-pura, pura-pura menurut, pura-pura tidak tahu, pura-pura bodoh, mencuri kecil-kecilan, mencopet, taat dibuat-buat, memfitnah, pembakaran, sabotase, dan sebagainya, mungkin akan dihadapkan pada perbedaan antara apa yang disebut sebagai tindakan-tindakan perorangan yang bercirikan pamrih dan perlawanan. Scott melihat persoalan ini dari tujuan yang lebih dominan walaupun ia segera berargumen bahwa fusi antara keduanya itu akan membentuk tenaga vital sebagai sumber yang menjiwai perlawanan petani dan proletar. Argumen-tasi yang lebih sistematis adalah

apabila aksi-aksi seperti itu telah berubah menjadi pola yang tetap (sekalipun tidak terkoordinasi, apalagi terorganisasi), kita berhadapan dengan perlawanan (Scott, 1993: 310).

Kategori Resistensi (Scott)

Dalam karyanya yang lain, *Domination and the Art of Resistance Hidden Transcript* (1990), Scott meletakkan pengertian perlawanan itu dalam konteks hubungan dominasi dan subordinasi. Perlawanan itu terjadi, sebagaimana terkandung dalam definisi di atas, dari kelompok subordinat (kelas rendahan) ke kelompok dominan (kelas atasan), yang dinilai oleh E.P. Thompson (dalam Scott, 1990), berlangsung dalam suatu proses perjuangan kelas; menemukan titik pertentangan kepentingan dalam suatu dialektika penemuan antara identitas kelas dan kesadaran kelas. Pengertian dominasi dan subordinasi itu diuraikan oleh Scott sebagai berikut.

"These forms of domination are institutionalized means of extracting labor, goods, and services from a subject population. They embody formal assumptions about superiority and inferiority, often in elaborate ideo-

logical form, and a fair degree of ritual and 'etiquette' regulates public conduct within them. In principle at least, status in this system of domination is ascribed by birth, mobility is ritual nil, and subordinated groups are granted few if any political or civil rights. Although they are highly institutionalized, these forms of domination typically contain a strong element of personal rule" (Scott, 1990: 21).

Dalam konteks ini pula (sebagaimana yang telah dikatakannya sebagai *the art of resistance* dan sebagai implikasi praktis dari definisi perlawanan itu), Scott telah membedakan bentuk dan wilayah perlawanan itu ke dalam dua kategori yaitu yang disebutnya sebagai *public transcript* dan *hidden transcript*. Kedua kategori perlawanan itu dibedakan dari artikulasi perlawanannya; bentuk, karakteristik, wilayah sosial dan budayanya. Secara singkat, *public transcript* dikarakteristikan oleh adanya interaksi terbuka antara kelas-kelas subordinat dengan kelas-kelas dominan. Sementara *hidden transcript* dikarakteristik oleh adanya interaksi tertutup, tidak langsung, dengan sifat-sifat *offstage* antara kelas-kelas

subordinat dengan kelas-kelas dominan.*

Sebagai petunjuk awal, wilayah *public transcript* dalam ilustrasi berikut lebih diperankan oleh cerita mengenai pemuda, sementara *hidden transcript* lebih banyak diperankan oleh cerita-cerita mengenai KUD dan Pak Ka. Kendatipun demikian, uraian berikut ini selanjutnya tidak bermaksud untuk menonjolkan perbedaan antara kedua kategori tersebut secara konseptual ataupun memasuki perdebatan praktis mengenai perbedaan kedua kategori itu. Sebagaimana telah disebutkan di muka bahwa maksud dari uraian ini adalah untuk menyoroti masalah konseptual yang dihadapi dalam pengertian perlawanan itu. Dalam konteks yang lebih luas, ialah antara kelas-kelas subordinat dan kelas-kelas dominan dan hubungan di antaranya dalam suatu masyarakat agraris.

Konsep Awal mengenai Struktur Agraris

Pendekatan kedua yang memberikan landasan struktural bagi pengertian perlawanan itu adalah

konsep struktur agraris. Struktur agraris merupakan konsep abstrak atau alat analitis untuk menganalisis struktur masyarakat agraris serta sumber-sumber dan dinamika perubahannya, dengan pendekatan *political economy* (multidisipliner). Struktur ini perlu dilihat sebagai sesuatu kekuatan yang mempengaruhi perilaku manusia, tetapi tidak menentukannya. Dalam catatan internnya, White (1999) menjelaskan bahwa struktur ini menyangkut satu obsesi dalam ilmu sosial, yaitu usaha untuk menerangkan hubungan antara gejala-gejala yang terdapat pada tingkat makro-mikro, global-lokal, struktur-pelaku, dan masyarakat-individu. Konsep yang digunakan secara dini untuk kepentingan penulisan tahap eksplorasi bukannya bermaksud menyederhanakan, tetapi dapat diberikan batasan pengertian sebagai berikut, 'unsur dan kesatuan serta hubungan di antara unsur dan kesatuan itu dalam suatu masyarakat agraris'.

Apabila batasan pengertian itu dimanfaatkan sebagai alat analisis awal, setidaknya-tidaknya akan dapat dibedakan konsep struktur agraris

* *Offstage* ini mengambil perumpamaan pentas di atas panggung dimana penampilan dan perilaku para pemain teater di atas panggung berbeda dengan penampilan dan perilaku mereka dalam kehidupan sehari-hari. Penampilan mereka di atas panggung adalah penampilan yang berpura-pura sedangkan kehidupan sehari-hari menampilkan kehidupan yang nyata.

itu dengan struktur lain dari dua aspek yang berbeda. Pertama, dari unsur-unsur (kesatuan atau komponen) yang terlibat di dalamnya. Unsur-unsur yang dimaksudkan ini berbeda dengan unsur 'abstrak' seperti yang dimaksudkan oleh ahli ilmu ekonomi pertanian yang disebutnya sebagai faktor produksi, yaitu tanah, tenaga kerja, dan modal (*land, labour, and capital*), melainkan unsur-unsur manusiawi dan kesatuan-kesatuan sosial seperti yang tertuang dalam ungkapan berikut.

Bukan 'tanah', tetapi mereka yang menguasai tanah

Bukan 'tenaga kerja', tetapi mereka yang bekerja di atas tanah itu, dan

Bukan 'modal', tetapi mereka yang menguasai modal (White, 1999).

Kedua, hubungan di antara unsur (manusiawi dan kesatuan-kesatuan sosial) itu akan menunjukkan bentuk dari struktur agraris. Pada disiplin ekonomi politik klasik, yang paling disoroti adalah hubungan antara mereka yang bekerja di pertanian dan mereka yang tidak bekerja, tetapi mengklaim sebagian dari hasil kerja tersebut berdasarkan atas penguasaan mereka akan faktor-faktor produksi nontenaga kerja: tanah dan atau modal (dan atau

kuasa politik). Selain ketiga kelompok sosial itu, sebenarnya terdapat banyak kelompok sosial lainnya dalam setiap masyarakat agraris. Di samping itu, dalam kenyataannya para aktor tersebut sering *overlap* (merangkap): seorang petani kecil bisa menjadi *landowner, labourer, dan capitaliust* sekaligus, seorang tuan tanah merangkap menjadi pedagang, aparat negara, pelepas uang, majikan, dsb (lihat catatan intern untuk Tim 'restudy Kali Loro', Ben White/3 vii '99).

Kedua pendekatan itu, yang pertama memberikan makna dinamis dalam konteks hubungan-hubungan dominasi dan subordinasi, dan yang kedua memberikan landasan struktural yang mempengaruhi kekuatan-kekuatan — tetapi tidak menentukan — konteks hubungan-hubungan tersebut serta perlawanan, akan digunakan secara aplikatif-terintegratif sebagai alat analisis awal untuk menganalisis cerita-cerita keseharian mengenai KUD, Pak Ka, dan pemuda berikut. Dengan demikian, tujuan dari penulisan tahap eksplorasi ini akan mengandung bias makna ganda dalam rencana penelitian selanjutnya, yaitu selain mengangkat dan mempertajam masalah, juga bersifat menguji hipotesis mengenai perlawanan itu.

Perubahan di Kali Loro

Kali Loro mempunyai posisi geografis yang strategis. Desa ini berada di sisi sebelah timur kaki bukit Pegunungan Menoreh hingga ke perbatasan Sungai Progo. Sungai ini telah menjadi sumber dari dua irigasi primer Selokan Mataram dan Selokan Kalibawang di Daerah Istimewa Yogyakarta sejak zaman Jepang dan awal Orde Baru. Sisi tengah dari desa ini yang dekat dengan areal persawahan penduduk dilalui oleh Sungai Tinalah, yang juga memberikan matapencaharian bagi penduduk pada musim kemarau menjadi penambang batu dan pasir. Dengan demikian, areal persawahan di desa ini dikelilingi oleh dusun-dusun dan diapit oleh Sungai Tinalah dan Selokan Kalibawang yang

menjadi sumber irigasi primer areal persawahan serta mata air bagi penduduk dusun di atasnya yang berdiam di kaki Bukit Menoreh.

Jarak dari kota Yogyakarta ke desa ini sekitar 26 km dengan waktu tempuh kurang dari satu jam. Jarak desa ini ke kota Yogyakarta melalui ibukota Kabupaten Kulonprogo adalah 31 km. Ibukota Kecamatan Kalibawang berjarak 7 km ke arah utara dari desa ini. Dibandingkan dengan desa-desa lain dalam satu wilayah kecamatan, desa ini tampak menonjol, baik dalam produksi pertanian tanaman pangan, terutama padi, maupun infrastruktur fisiknya. Areal produksi pertanian, tanaman padi, di desa ini mencapai 640 ha, terluas daripada desa-desa lain.

Tabel 1
Migrasi Keluar menurut Jenis Kelamin, Tahun Pindah, dan Tempat Tujuan

Pindah ke	Sebelum 1970		1970-1979		1980-1989		1990-1999		Jumlah	
	L	P	L	P	L	P	L	P	L	P
Satu Desa	30,3	48,3	24,7	31,8	36,1	32,9	20,5	18,3	26,5	26,8
Lain Desa dalam Propinsi DIY	12,1	27,6	4,9	12,1	8,9	14,1	10,0	16,5	9,0	15,8
Jateng, Jatim	12,1	6,9	21,0	15,2	12,0	15,4	15,7	16,1	15,2	15,2
Jakarta, Jabar	6,1	3,4	21,0	18,2	22,2	19,5	36,1	32,6	27,6	24,5
Sumatra	30,3	10,3	23,5	16,7	11,4	14,8	10,8	9,6	14,2	12,3
Kalimantan	3,0	3,4	3,7	3,0	6,3	1,3	2,4	3,2	3,8	2,6
Lainnya	6,1	0,0	1,2	3,0	3,2	2,0	4,4	3,7	3,6	2,8
Jumlah %	100,0	100,0	100,0	100,0	100,0	100,0	100,0	100,0	100,0	100,0
N	33	29	81	66	158	149	249	218	521	462

Sumber: Survei Rumah Tangga Kali Loro, PPK UGM 1999

Pusat pelayanan publik seperti BRI, KUD, LSM, kios telepon, pendidikan dari tingkat SD sampai SMU/SMK, pasar, dan pertokoan sebagian besar terkonsentrasi di desa ini. Di persimpangan jalan desa ini tumbuh terminal liar yang strategis, yang memberikan pelayanan tunggu bagi penduduk desa menuju ke Yogyakarta, Wates, Muntilan, dan Samigaluh.

Pertumbuhan penduduk desa ini selama 1980-1990 adalah (-)0.33. Rendahnya pertumbuhan ini antara lain disebabkan migrasi keluar (program transmigrasi) yang cukup besar ke Sumatra, Kalimantan, dan Sulawesi, yang telah dilakukan penduduk sejak awal pemerintahan Orde Baru. Di samping itu, banyak penduduk menjadi TNI yang harus bertugas ke luar desa, dan banyak pemuda yang mencari pekerjaan ke kota

menjadi buruh, terutama di kawasan Jabotabek. Sampai tahap eksplorasi ini, jumlah penduduk desa (dengan luas wilayah 11,7 km²) adalah 9.771 orang, terdiri dari 4.092 laki-laki dan 5.079 perempuan yang tergabung ke dalam 2.252 kk. Permukiman penduduk terkonsentrasi di daerah yang landai di sepanjang Sungai Progo dan Sungai Tinalah yang tidak jauh dari areal persawahan. Daerah ini telah menjadi kompleks permukiman konsentris terhadap penduduk di daerah kaki bukit. Pertumbuhan ekonomi yang pesat di daerah persimpangan jalan desa itu telah berimbas ke sepanjang jalan desa yang dilalui sarana angkutan darat.

Daerah yang berada di kaki bukit itu memiliki kepadatan penduduk yang relatif rendah. Mereka umumnya mengerjakan

Tabel 2
Rata-Rata Pertumbuhan Jumlah Penduduk
di Kabupaten Kulonprogo, Kecamatan Kalibawang, dan Kali Loro, 1961 - 1990

Tahun	Kabupaten Kulonprogo		Kecamatan Kalibawang		Kali Loro	
	Jumlah	Pertumbuhan persen/tahun	Jumlah	Pertumbuhan persen/tahun	Jumlah	Pertumbuhan persen/tahun
1961	337.154	-	27.334	-	8.483	-
1971	371.103	0,96	29.035	0,61	8.530	0,06
1980	380.685	0,28	29.143	0,04	8.537	0,01
1990	372.209	-0,22	27.214	-0,68	8.257	-0,33

Sumber: White (1999).

sawah penduduk yang tinggal di daerah inti desa itu. Selain menjadi buruh tani, mereka juga memanfaatkan tegalan yang letaknya terpencar di lereng bukit itu serta mengerjakan pekerjaan non-farm seperti menganyam *keping* dan menjual kayu bakar. Daerah di kaki bukit ini lebih mirip sebagai daerah pinggiran yang dalam struktur agraris tergantung kepada penduduk di daerah inti.

Dinamika Struktur Agraris

Hasil survai tahun 1973, yang dilaporkan oleh Stoler (1975), menunjukkan bahwa 6 persen dari 478 rumah tangga memiliki lebih dari separo luas tanah sawah yang ada, 37 persen rumah-tangga tidak memiliki tanah, dan 40 persen rumah-tangga lainnya bekerja di sektor pertanian. Dengan kata lain, 75 persen rumah tangga di Kali Loro pada waktu itu harus mencukupi kebutuhan subsistensi mereka dari sumber-sumber lain, selain kepemilikan tanah dan tanah garapan mereka yang sempit. Sumber-sumber itu, antara lain, adalah buruh upahan di sektor pertanian terutama buruh tani, berdagang seperti *bakulan*, *bakul eyek*, *mendreng*, *bakul adang-adang*, memproduksi kerajinan rumah tangga seperti menganyam *keping* dan menganyam tikar, membuat

slondok dan gula aren, dan mengolah hasil-hasil pekarangan yang dapat dijual atau dikonsumsi sendiri.

Sementara itu, survai rumah tangga yang dilakukan pada tahun 1999 memperlihatkan bahwa dari 549 rumah tangga yang disurvei, hanya 9,8 persen dari rumah tangga itu yang menguasai luas lahan garapan sawah di atas 3000 m². Sekitar 9,7 persen menguasai luas lahan garapan 2000–2999 m²; 22,1 persen menguasai luas lahan garapan 1000–1999 m²; 22,2 persen menguasai luas lahan garapan 1000 m²; dan 36,2 persen tidak menguasai luas lahan garapan sawah (*landless*). Dengan kata lain pula, 90,2 persen rumah tangga di Kali Loro menguasai luas lahan garapan sawah kurang dari 3000 m². Mereka harus mencukupi kebutuhan subsistensi mereka dari sumber-sumber lain seperti mengembangkan variasi dari jenis pekerjaan buruh tani, buruh bangunan, berdagang, membuat kerajinan, buruh jasa angkutan, dan jasa umum lainnya.

Menyempitnya kepemilikan tanah sebagai konsekuensi dari pola pewarisan yang harus dibagi kepada sejumlah kepala rumah tangga, proses jual beli tanah, terutama pekarangan untuk fungsi nonproduktif, berkembang pesatnya usaha jasa, terutama

yang terkonsentrasi di daerah pusat, munculnya usaha ekonomi Pak Ka yang berpengaruh terhadap struktur tenaga kerja pertanian ke nonpertanian di daerah itu, dan terakumulasinya tanah-tanah milik kepada segelintir orang (elit-elit baru yang muncul dari usaha nonpertanian), setidaknya-tidaknya telah mendorong adanya perubahan formasi dalam struktur agraris di Kali Loro. Formasi pekerjaan di sektor formal misalnya seperti PNS, TNI, dan pegawai swasta juga telah meningkat seiring dengan meningkatnya kualitas pendidikan penduduk desa.

Di luar pesatnya pengaruh usaha nonpertanian di desa itu, pergeseran penguasaan lahan di

sektor pertanian juga berlangsung secara internal. Faktor yang berpengaruh terhadap gejala ini adalah pola pewarisan yang masih berlangsung. Elit-elit lama yang ditandai oleh adanya karakter feodalistik dengan penguasaan tanah yang luas, kini menyusut atau boleh dikatakan telah hilang. Hilangnya elit-elit lama di dusun pinggiran telah diikuti oleh munculnya elit-elit baru di pusat sehingga semakin terpuruknya status sosial-ekonomi dusun pinggiran itu diikuti oleh menguatnya ketergantungan dusun pinggiran itu terhadap pusat.

Dalam formasi kelas rendahan, hubungan kerja itu terlihat rumit karena terjadinya tumpang-tindih

Tabel 3
Persentase Lapangan Pekerjaan Pokok menurut Jenis Kelamin

Lapangan Pekerjaan Pokok	Laki-laki		Perempuan		Jumlah	
	N	persen	N	persen	N	persen
Pertanian	273	47,7	108	21,2	381	35,2
Pekerja Keluarga Pertanian	24	4,2	34	6,1	58	5,4
Buruh Tani	76	12,5	72	14,1	148	13,7
Industri	12	1,1	89	17,5	111	9,4
Bangunan	32	5,6	8	1,6	40	3,7
Angkutan	23	4,0	-	-	20	1,8
Perdagangan	40	7,0	136	26,7	176	16,2
Jasa Umum	77	13,5	46	9,0	123	11,3
Jasa Swasta	16	2,8	17	3,3	33	3,0
Jumlah	573	100	510	100	1083	100

Sumber: Survei Rumah Tangga Kali Loro, PPK UGM 1999

Tabel 4
 Persentase Jenis Pekerjaan Sambilan ART yang Bekerja
 berdasarkan Jenis Kelamin

Lapangan Pekerjaan Sambilan	Laki-laki		Perempuan		Jumlah	
	N	persen	N	persen	N	persen
Perdagangan	26	13,0	27	13,8	53	13,4
Industri Kerajinan	12	6,0	34	17,4	46	11,6
Angkutan	5	2,5	-	-	5	1,3
Jasa Umum	9	4,5	-	-	9	2,3
Jasa Swasta	10	5,0	3	1,5	13	3,3
Petani	49	24,5	11	5,6	60	15,2
Buruh Tani	84	42,0	114	58,5	198	50,1
Petani Pekerja Keluarga	5	2,5	6	3,1	11	2,8
Jumlah	200	100,0	195	100,0	395	100,0

Sumber: Survei Rumah Tangga Kali Loro, PPK UGM 1999

di antara posisi kerja yang subordinat. Sebagai contoh, seorang petani penggarap pada musim tanam padi menggarap tanah garapannya seluas 1.000 m² (dengan sistem bagi hasil: *maro*) bersama istri dan anaknya. Pada saat yang sama pula, istrinya bekerja sebagai buruh (tanam) di sawah milik orang lain, dan menganyam *kepang* pada malam harinya, sementara suami menjadi buruh mencangkul. Ketika musim panen, rumah tangga itu menawarkan tenaga sebagai *penderep* untuk memperoleh *bawon* dari petani dan penebas. Pada musim tanam palawija, suami-istri itu mencurahkan waktu dan tenaganya untuk mengumpulkan batu

dan pasir di Sungai Tinalah untuk dijual ke Pak Ka.

KUD Simbol Perlawanan Kaum Tani

Satu pertanyaan yang diajukan adalah mengapa bukan kelas-kelas atasan yang menjadi simbol perlawanan kaum tani, tetapi justru KUD yang merupakan wadah kooperatif bagi petani? Jawabannya terletak pada penilaian E.P. Thompson (dalam Scott, 1990) mengenai identifikasi terhadap titik-titik pertentangan kepentingan kelas. Petani bukannya gagal dalam mengidentifikasi titik pertentangan kepentingan kelas, tetapi sebaliknya bahwa proses perjuangan kelas petani

telah mengidentifikasi titik persinggungan yang penting antara pengambilalihan surplus yang dilakukan oleh kepentingan pedagang dan kerja samanya dengan pengurus KUD untuk memanipulasi kekuasaan. Di satu sisi, titik persinggungan itu merepresentasikan kelas-kelas dominan yang disimbolisasikan oleh KUD. Di sisi lain, petani telah mengidentifikasi peralihan bentuk surplus dari hak petani yang diambilalih oleh pedagang melalui institusi KUD.

KUD di Kali Loro adalah KUD perintis yang diresmikan tahun 1963. Pada awalnya bernama BUD (hanya selama dua tahun), kemudian berubah menjadi Koperta (Koperasi Pertanian) yang ada di setiap desa, dan menjadi KUD tahun 1967. Pendiri sekaligus ketua KUD adalah Pak Pa sampai tahun 1994. Di bawah kepemimpinannya, KUD berkembang pesat. Beberapa koperasi lain telah dibina, dan prestasi ini telah menghantarkannya menjadi wakil daerah tingkat II untuk membentuk sekaligus menjadi pengurus PUSKUD Daerah Istimewa Yogyakarta. Di daerahnya itu pula, Pak Pa dikenal penduduk sebagai bapak perintis koperasi.

Persoalan segera muncul, khususnya di mata petani, ketika Pak Pa akan pensiun dan tidak

ada tokoh ataupun kader yang sederajat dengannya. Orang terdekatnya waktu itu, yaitu Pak Mi, adalah kandidat karena jabatannya sebagai wakil ketua KUD. Ia dipertimbangkan karena memiliki pengalaman administrasi dan disiplin yang tinggi apalagi sebagai mantan camat. Atas dasar pengalaman itu kemudian Pak Mi diangkat sebagai ketua KUD periode tahun 1994/1998 dan 1998/2002. Satu hal yang telah dilupakan adalah bahwa Pak Mi tidak memiliki pengalaman langsung dalam melayani berbagai macam kebutuhan petani dan memfungsikan KUD itu sebagai usaha bersama petani. Sebaliknya, KUD telah difungsikan menyimpang dan hanya melayani kebutuhan pengurus dan pedagang.

Pada waktu dibentuk BPPC, KUD ini mengeruk keuntungan yang besar dari pedagang Cina. Mereka harus mendapatkan SKA (Surat Keterangan Asal Cengkeh) yang hanya dikeluarkan oleh KUD untuk disetorkan ke BPPC. Begitu pula kerja sama dengan PT. PUSRI, yang mencakup 9 KUD di daerah tingkat II tersebut, telah memberikan keuntungan yang cukup besar. Kini ketika distribusi pupuk itu dihentikan, KUD menampung pupuk hanya untuk melayani para pedagang. Petani kecewa karena ketika mereka

mebutuhkan pupuk dan obat, persediaan di KUD telah habis.

Seorang mantan kadus bercerita mengenai pengalaman bekerja sama dengan KUD semasa masih menjabat. Ia menunjukkan bagaimana korupsi sudah biasa terjadi di KUD. Tiba-tiba seorang petani menyahut, kalau begitu

Pak Mantan Kadus dulu juga korupsi. Orang seperti saya ini kalau korupsi hanya sedikit, jawab mantan kadus itu. Kemudian Pak Mantan Kadus menunjukkan korupsi di KUD, seperti dana yang dialokasikan untuk pembangunan. Secara spontan, tiba-tiba seorang petani

Tabel 5
Persepsi dan Resistensi Petani terhadap KUD di Kali Loro

Persepsi Petani	Resistensi Fisik	Resistensi Simbolik
1. Tidak transparan		
a. Usulan petani tidak diperhatikan	a. Tidak ikut rapat	a. Mengkritik di belakang
b. Laporan rapat direkayasa	b. Malas berpendapat	b. Diam
c. Pemotongan dana		c. <i>Ngrasani</i> (menggospip)
2. Peran dan fungsi terbatas		
a. Tidak menampung gabah petani	a. Petani menjual padi ke penebas	a. Menggerutu
b. Pelayanan terbatas jasa penggilingan padi dan jual-beli kebutuhan rumah tangga	b. Petani membeli benih, pupuk, dan obat ke bakul dan toko pertanian di Muntilan	b. Menggerutu
c. Melayani pedagang	c. Tidak membeli ke KUD	
3. Citra buruk ketua		
a. Mantan camat yang dipecat	a. Enggan berhubungan	a. <i>Ngrasani</i> (menggospip)
b. Pandai berkelit	b. Malas berdebat	b. Diam
c. Mengabaikan suara petani	c. Mencemooh	c. Kecewa
d. Tidak ada reorganisasi	d. Mengkritik	d. <i>Ngrasani</i> (menggospip)

Sumber: Diolah dari Data Wawancara, 1999

muda berteriak, “Bakar saja KUD itu!”

Semangat luar biasa petani muda itu berlangsung di belakang, dan pada hari itu tidak terjadi pembakaran KUD. Seandainya Lenin mendengar suara ini, ia akan berkata, “tidak ada artinya bagi kemajuan partai”, tetapi itulah senjata-senjata biasa yang dimiliki petani untuk melawan kelas-kelas atasan. Mengkritik, mencemooh, membeberkan kelemahan dan kecurangan KUD bukannya tanpa makna. Petani dirugikan atas suatu ketidakadilan sehingga mereka harus membeli pupuk dan obat ke pedagang yang harganya lebih mahal daripada di KUD.

Sistem koperasi yang tujuannya untuk saling menguntungkan antara petani dan KUD itu telah dilanggar. Sebagian keuntungan beralih ke pedagang dan ketua KUD dan kemudian pedagang itu menjerat petani dengan cara menaikkan harga pupuk. Dalam kolusi ini sangat mungkin ketua KUD mengambil peran penting karena sifat kepemimpinannya yang *bapakisme*, dalam arti hubungan kerja itu seperti bapak-anak. Semakin represif ketua semakin tinggi pedagang menjerat petani sehingga senjata perlawanan mereka itu lebih diarahkan kepada ketua KUD daripada pedagang.

Sapi Perah dan Reprisivitas Simbolik

Reposisi kelas rendahan ke kelas atasan berlangsung di sektor non-farm. Kekuatan itu bersifat unik karena telah membalik posisi kelas rendahan ke kelas atasan, dengan posisi yang tetap. Reposisi kelas-kelas ini terkait dengan cerita Pak Ka yang memulai usahanya dari *mendreng* menjadi pengusaha besar. Berbagai tahapan kelas ia lalui dan melibatkan hubungan antarkelas, baik itu kelas rendahan maupun kelas atasan.

Pak Ka adalah orang yang menonjol dalam berhitung dibandingkan dengan teman semasa masih sekolah. Ia tidak menyelesaikan pendidikan sampai perguruan tinggi karena persoalan biaya. Setelah meninggalkan bangku kuliah, ia mulai usaha *mendreng*. Pekerjaan ini ditekuninya cukup lama sehingga dikenal sebagai *tukang mendreng*. Para kreditornya bukan hanya berasal dari satu desa, tetapi sampai wilayah kecamatan dan kabupaten lain. Barang dagangannya sangat laku dan dibeli dengan sistem kredit.

Penarikan kredit itu dilakukannya selama bertahun-tahun. Pada masa itu, ia juga menggali pengalaman kerja *kasaran* di kelas rendahan menjadi kuli bangunan, kuli tambang pasir, *kernet* bus, dan

mencarikan penumpang bus di perempatan jalan desa. Pekerjaan yang mengesankannya adalah menjadi kuli batu dan pasir. Pekerjaan ini yang kemudian membentuk cita-citanya menjadi pengusaha batu dan pasir.

Pada awal tahun 1980-an, Pak Ka memiliki sebuah truk yang dioperasikan untuk mengangkut batu dan pasir ke proyek bangunan. Keuntungan mulai diraihinya dengan prinsip seperempat dari keuntungan itu dikonsumsi untuk kebutuhan rumah tangga dan tiga perempat untuk mengembangkan usaha. Melalui jaringan awal usahanya dan keuntungan-keuntungan yang terus dikembangkan, truk demi truk ia miliki. Pada awal dekade 1990-an ia memiliki 45 buah truk. Kebutuhan akan tanah pun mendesak untuk parkir truk-truk itu. Tanah pekarangan di sekitar rumahnya sekarang telah menjadi miliknya untuk parkir truk.

Kebutuhan dan rotasi tenaga kerja di perusahaan Pak Ka ini cukup tinggi. Menurut penuturan Pak Ka, pada akhir tahun 1998 jumlah tenaga kerja mencapai 170 orang, termasuk orang-orang yang dahulu sering mengajaknya untuk menaikkan batu dan pasir ke atas truk dan memberikan jasa kepadanya. Mereka yang dahulu bersikap biasa dengan Pak Ka

sekarang terlihat tunduk dan patuh. Memandang wajahnya pun mereka segan dan tidak percaya diri. Sikap *angker* ini muncul di samping karena posisinya, juga karena dikenal penduduk memiliki kekuatan gaib/magis yang berfungsi memberikan kontrol ketat kepada pekerjanya untuk tidak berbuat curang.

Kontrol yang diberikan atas bentuk-bentuk perlawanan semacam itu adalah kematian yang terjadi secara magis. Kekuatan ini terkesan represif dan simbolik, bukan hanya kepada pekerjanya, tetapi juga kepada penduduk desa. Di kalangan penduduk desa, sedapat mungkin berhubungan dengan Pak Ka itu dihindari karena memasuki wilayah represivitas simbolik. Untuk mengantisipasi hal itu penduduk biasanya mendasari (memberikan dasar kekuatan magis pada dirinya) dengan kekuatan magis lain. Seorang sopir truk misalnya, pernah melakukannya sehingga ia berani melawan dengan sikap masa bodoh terhadap represivitas Pak Ka, acuh saja, tidak mengikuti aturan yang ditentukan Pak Ka, seperti membantah dan mencuri kecil-kecilan.

Di kalangan buruh pabrik penggilingan batu, bentuk dominasi itu bukan hanya

menyetuh alam pikiran simbolik, tetapi juga pemaksaan yang harus dilakukan, dan menerima apa yang diberikan Pak Ka secara minimal. Dilihat dari jam kerja yang sangat panjang (10 s.d. 12 jam per hari) dan upah yang sangat rendah, peralihan bentuk surplus dari buruh ke tangan Pak Ka sangat mungkin terjadi, dengan dalih menguasai alat produksi. Walaupun Pak Ka dijauhi penduduk desanya, banyak orang luar yang datang

untuk mencari pekerjaan. Kenyataan ini tidak membuat risau Pak Ka apabila buruhnya mogok karena buruh itu justru akan di PHK dengan mudah.

Pembangangan dan Pemalsuan Identitas Politik

Kenyataan bahwa kelompok pengacau pun memiliki peran penting dalam dinamika struktur agraris. Siapa yang dicirikan *free riders* (pembonceng) oleh Popkin (1986), misalnya? Salah satunya

Tabel 6
Persepsi dan Resistensi Pekerja dan Penduduk terhadap Pak Ka di Kali Loro

Persepsi Pekerja dan Penduduk	Resistensi Fisik	Resistensi Simbolik
Kaya karena curang, kolusi dengan aparat pemerintah desa dan kecamatan	Penduduk memasang TPR pada ruas jalan masuk ke sungai yang dilalui truk-truk Pak Ka	<i>Ngrasani</i> (menggossip)
Pelit dan mahal	Mencuri barang kecil-kecilan seperti mur dan sekrup, mencuri waktu kerja, memperlambat kerja, dsb.	Seruan peringatan, "jangan kerja di sana"; "jangan beli di sana".
Memeras, keras, dan tanpa perasaan	Tidak membeli barang ke toko Pak Ka. Malas berhubungan kerja, mencuri waktu, merusak mesin, dan keluar kerja	Menggerutu
Kontrolnya sangat ketat	Mencuri waktu dan mengelabui.	Menggerutu
Punya " <i>buto ijo</i> ", setiap kekayaannya ada yang menunggu	Mencari lambaran dan " <i>memagar</i> " rumahnya dari kekuatan magis.	Menggossip

Sumber: Hasil Wawancara, 1999

adalah pengacau. Mereka adalah orang yang mengambil keuntungan dari kerja keras orang lain, dari kerja keras kelas rendahan, menjadi *centeng* atau merongrong kewibawaan kelas atasan, dan dengan sedikit kesadaran politik, menjadi penjegal, ataupun pelampiasan emosional dari kecemburuan sosial. Sekarang sudah jelas bagaimana pengacau telah mengambil alih surplus penduduk atas suatu legitimasi kekuatan dengan cara semena-mena.

Apabila dicermati siapa yang menjadi pengacau, jawabannya terletak pada keterkaitan antara gerombolan, pemuda, dan tawuran. Keterkaitan antara ketiganya mengidentifikasi suatu kehidupan pemuda yang kelim, mabuk, berjudi, mencuri, berkelahi, dsb. Inti dari persoalan ini adalah meletakkan pembangkangan pemuda dalam suatu konstelasi penting komposisi struktur agraris. Pembangkangan terjadi dari dominasi orang-orang tua terhadap kepatuhan. Perlawanan terhadap sistem dominasi itu berupa keacuhan mereka terhadap persoalan ekonomi rumah tangga yang dihadapi oleh orang tua mereka. Apabila dalam praktek kehidupan sehari-hari orang tua mereka mengajarkan perjuangan hidup melalui bekerja sebagai: petani, petani penggarap,

buruh tani, dan kegiatan non-*farm* lainnya, pemuda mengambil posisi seenaknya, mengacuhkan ajaran hidup itu dan terbuai dalam suatu keinginan hidup enak tanpa bekerja keras. Gaya kehidupan populer semacam ini tampaknya juga berpengaruh pada kehidupan remaja Kali Loro, terutama remaja-remaja perempuan. Iklan dan sinetron, dalam acara televisi, barangkali memiliki pengaruh yang cukup besar dalam menanamkan gaya hidup populer.

Kebiasaan *nongkrong* yang dilakukan, baik malam maupun siang hari, bukanlah suatu retorika dari persoalan pengangguran di desa, tetapi lebih sebagai suatu penolakan terhadap kerja pertanian yang digeluti orang tua mereka. Apabila orang tua mereka bekerja untuk memperjuangkan hidup, pemuda ini menggantungkan hidup dari perjuangan itu yakni menolak perjuangan hidup. Dalam hubungan ini, apa bedanya pemuda itu dengan pengacau, yang juga mengambil keuntungan dari kerja keras kelas atasan dan bawahan dalam arti mengambil alih surplus dari perjuangan kelas mereka walaupun terhadap orang tua mereka sendiri.

Cerita mengenai pemuda berikut bukan ditujukan untuk menganalisis pembangkangan terhadap dominasi orang tua,

melainkan sebagai kategori kelas, mereka memiliki dunianya (subkultur) yang dalam cerita singkat berikut dijadikan basis pembangkangan sekelompok pemuda. Cerita mengenai pembangkangan ini mengambil momentum penting dari proses berlangsung pemilu tahun 1999. Momentum ini tampaknya dapat menjelaskan peran pemuda dalam perubahan sosial, kaitannya dengan wilayah perlawanan mereka yang terbuka. Dalam tradisi Scottian, wilayah perlawanan pemuda ini dicirikan dengan interaksi terbuka terhadap kelas negara yang diperankan oleh partai politik dominan.

Sebagaimana dianjurkan pemerintah pusat, pada hari pelaksanaan kampanye partai politik, massa masing-masing partai boleh berkampanye yang salah satunya ditandai dengan

pemasangan bendera partai politik. Sebagai kepanjangan tangan pemerintah pusat, kepala desa juga menganjurkan warganya untuk memasang bendera partai politik itu baik di depan rumah maupun di jalan umum. Untuk merespons anjuran pemerintah pusat ini, kepala desa mengerahkan sejumlah orang melalui kepala dusun untuk memasang bendera partai politik di jalan umum.

Pemasangan bendera ini menghadapi masalah di Dusun Se dengan sekelompok pemuda yang biasa *nongkrong* di jalan itu. Sebelum hari pemasangan bendera, sekelompok pemuda telah menolak memasang bendera partai politik apa pun di jalan tempat mereka *nongkrong*. Alasannya bersumber dari banyaknya peristiwa kekerasan dan kerusuhan yang terjadi di berbagai daerah

Tabel 7
Persepsi dan Resistensi Pemuda terhadap Partai Politik (Golkar) di Kali Loro

Persepsi Pemuda	Resistensi Fisik	Resistensi Simbolik
Tidak bertanggung jawab terhadap kerusuhan massa Golkar adalah partai kaya Golkar sangat dominan (pada masa Orde Baru)	Tidak memasang bendera. Tidak ikut kampanye. Mencuri uangnya Pura-pura memasang bendera Golkar	Pasif, diam, tidak antusias, tidak peduli. Memalsukan identitas politik Seruan moral ABG (Asal Bukan Golkar)

Sumber: Data Wawancara, Diolah, 1999.

yang berkaitan dengan kampanye: “Kalau terjadi kerusuhan di tempat ini, siapa yang akan bertanggung jawab? Paling-paling kita sendiri. Orang pusat yaitu pengurus partai politik belum tentu mau bertanggung jawab.”

Atas dasar itu mereka menolak memasang bendera partai politik, dengan segala kemungkinan risiko yang akan diambil oleh kepala desa. Mereka mengatakan kepada orang-orang suruhan kepala desa itu untuk tidak memasang bendera di daerahnya: “*Mas, mangke panjenengan aturke kalih Kepala Desa, menawi kepareng pemuda Dusun Se mriki mboten masang gendera kemawon*” (Mas, nanti tolong disampaikan ke Kepala Desa, kalau boleh pemuda Dusun Se tidak usah memasang bendera saja), demikian dikatakannya. Orang-orang itu tidak jadi memasang bendera dan menyampaikan alasan itu kepada kepala desa.

Alasan itu tidak diperhatikan oleh kepala desa, dan pada malam harinya bendera itu dipasang. Perintah ini menimbulkan konflik yang semakin buruk karena keesokan harinya bendera-bendera itu telah rusak: sobek, tumbang, dan hilang. Beberapa

yang tersisa akhirnya dicabuti kembali oleh orang-orang suruhan kepala desa dan daerah itu kembali kosong dari bendera partai politik.

Peristiwa ini membawa konsekuensi serius bagi pemuda. Kepala desa memanggil mereka ke kantor desa untuk dimintai keterangannya. Perdebatan tak terhindarkan antara mereka dengan kepala desa. Di satu sisi, kepala desa menggunakan legitimasi “milik umum” sehingga jalan bisa digunakan siapa saja. Di sisi lain, pemuda bersikeras tidak bersedia memasang bendera itu dengan alasan kalau ada kecacauan, siapa yang mau bertanggung jawab. Perdebatan itu akhirnya dimenangkan kepala desa atas legitimasi publik, dengan suatu syarat dari pemuda, bersedia memasang apabila disediakan seluruh bendera partai politik yang ada di wilayah kecamatan.

Malam harinya, kepala dusun mengadakan rapat untuk membahas masalah itu. Perdebatan kembali terjadi antara kepala dusun dengan menggunakan alasan yang sama dengan kepala desa dan pemuda dengan menyarankan, simpatik itu boleh

* Peristiwa-peristiwa itu seperti yang pernah terjadi beberapa kali di Yogyakarta antara massa pendukung PPP dan PDI Perjuangan, dan di daerah-daerah pantai utara Pulau Jawa seperti di Demak, Jepara, dan Pekalongan antara massa pendukung PPP dan PKB yang mengakibatkan: luka-luka, bahkan sampai terjadi kematian.

saja, tetapi tidak usah kelihatan seperti itu. Kalau terkena kerusuhan kita sendiri yang menanggung, pengurus partai pusat belum tentu bertanggung jawab, dan orang tua yang pasif menunggu persetujuan bersama. Perdebatan kembali dimenangkan oleh kepala dusun dan disepakati untuk memasang semua bendera partai politik.

Setelah pemasangan bendera itu, terlihat pada malam hari ada dua orang mengendarai sepeda motor dengan membawa pedang berhenti di setiap bendera Golkar. Mereka merusaknya, mengiris bendera, membacok tiangnya, dan mencabut tiang bendera itu. Orang yang melihat peristiwa itu diam seolah-olah tidak mengerti apa yang terjadi. Mereka membiarkan kedua orang itu merusak bendera Golkar. Peristiwa ini mengagetkan penduduk desa keesokan harinya. Berita mengenai perusakan bendera itu dengan cepat tersebar ke seluruh desa. Mereka membicarakan peristiwa ini secara diam-diam dan mengalihkan pembicaraan ketika orang datang.

Dalam beberapa hari bendera-bendera Golkar yang rusak itu dibiarkan tanpa ada orang yang mengurusinya. Atas inisiatif kepala desa, bendera Golkar itu dibersihkan sehingga jalan itu kembali kosong dari bendera Golkar.

Peristiwa itu mengisyaratkan untuk tidak memasang bendera Golkar. Sementara itu, bendera partai politik lain tetap berkibar sampai hari kampanye dinyatakan selesai. Siapakah pelakunya dalam insiden kecil yang menimpa Golkar ini bukan menjadi pokok bahasan utama cerita ini. Cerita ini ingin menunjukkan bahwa perlawanan sistem dominasi negara yakni pemerintah yang diperankan oleh partai politik itu telah dilakukan secara terbuka.

Interpretasi terhadap Cerita Resistensi

Ketiga cerita tersebut setidaknya tidaknya mendukung definisi resistensi yang diajukan oleh Scott. Dari ketiga cerita itu, tidak ada sifat perlawanan yang sesungguhnya yang diajarkan oleh organisasi modern Leninisme dan demokrasi kapitalis. Perlawanan mereka berada di luar kedua *mainstream* itu dengan tetap berbasis pada analisis kelas untuk melihat persoalan ketidakadilan. Bentuk-bentuk perlawanan yang ditawarkan memenuhi sifat-sifat yang diajukan oleh Scott, antara perlawanan *nyata* di satu pihak dan tanda-tanda kegiatan yang bersifat insidental atau epifenomenal di pihak lain. Demikian, dengan ketiga segi yang diajukan

Scott dalam memandang definisi mengenai resistensi itu.

Berdasarkan kategori resistensi yang telah diajukan oleh Scott, cerita KUD dan ceritera sapi perah memenuhi apa yang disebut sebagai *hidden transcript*. Perlawanan pada cerita tersebut ini diperankan oleh orang tua yang merasakan hubungan kerja itu sebagai hubungan kelas. Identifikasi terhadap persoalan ini berlangsung dalam suatu proses dialektika antara identitas kelas dan kesadaran kelas, dalam suatu perjuangan kelas antara kelas-kelas subordinat dan kelas-kelas dominan di desa itu. Secara singkat dikatakan bahwa wilayah perlawanan cerita tersebut ini berada pada tingkat, kepentingan, dan institusi desa. Sebagai kasus, dapat dikatakan bahwa setiap desa akan mengalami cerita yang berbeda karena pengalaman kelasnya yang berbeda pula.

Kategori perlawanan *public transcript* terlihat pada cerita pembangkangan dan pemalsuan yang diperankan oleh pemuda. Secara tematik, wilayah perlawanan cerita ini ada pada kekuasaan politik, bukan ekonomi seperti cerita sebelumnya. Sebagai bentuk perlawanan terhadap kekuasaan politik maka ia menembus batas administratif pemerintahan, bukan tingkat desa melainkan pusat kekuasaan. Sifat perlawan-

an ini terbuka dan terinteraksi secara langsung. Berbeda dengan cerita sebelumnya, cerita pemuda ini menimbulkan konflik yang dapat dirasakan bersama dan membawa akibat-akibat perubahan terhadap sikap dan perilaku politik. Perlawanan semacam ini mendukung definisi di atas, yaitu antara perlawanan *nyata* dan tanda-tanda kegiatan yang bersifat insidental sebagaimana disebutkan sebelumnya.

Dari ketiga cerita itu dapat ditarik benang merah bahwa perlawanan berlangsung dalam suatu hubungan- subordinasi dan dominasi. Perlawanan terjadi dari kelas rendah atau yang disubordinasi terhadap kelas atasan atau yang mendominasi. Titik pertentangan kepentingan kelas diidentifikasi sebagai suatu pengambilalihan surplus oleh kelas atasan dari "hak" kelas rendah, dengan dalih menguasai alat produksi dan kekuasaan politik. Dengan demikian, perlawanan itu berlangsung dalam suatu hubungan dominasi dan subordinasi yang timpang, yang diakibatkan oleh adanya suatu ketidakadilan dalam hubungan itu, seperti pengambilalihan surplus dan manipulasi kekuasaan, baik dalam bentuk politik, ekonomi, maupun simbol-simbol budaya.

Penutup

Kendati tidak dimaksudkan sebagai studi banding dan kajian historis terhadap studi terdahulu, dibandingkan dengan situasi seperempat abad yang lalu, dinamika struktur agraris di Kali Loro mengalami suatu perkembangan yang kompleks dewasa ini. Perkembangan kesatuan-kesatuan sosial dan hubungan-hubungan sosial berkembang secara variatif, ditandai dengan kerumitan hubungan-hubungan kelas dan perhatian terhadapnya yang semakin hati-hati. Identifikasi

terhadap kelas-kelas itu memasuki suatu subkultur-subkultur yang kiranya semakin sempit, sebagai suatu kelas-kelas yang memiliki identitas dan kesadarannya. Dapat dikatakan bahwa proses identifikasi terhadap kelas-kelas itu kini berlangsung semakin solid. Dalam arti yang lain, hal ini juga menunjukkan bahwa polarisasi sosial di perdesaan itu cenderung semakin menguat sehingga bisa mengancam kerukunan hidup di desa itu dari hubungan-hubungan kekeluargaan dan gotong-royong.

Referensi

- Popkin, Samuel L. 1986. *Petani Rasional*. Jakarta: Lembaga Penerbit Yayasan Padamu Negeri.
- Scott, James C. 1983. "Api kecil dalam pertentangan kelas," *Kajian Malaysia* I, 1 Juni.
- . 1990. *Domination and the Art of Resistance Hidden Transcripts*. New Haven and London: Yale University Press.
- . 1993. *Perlawanan Kaum Tani*. Jakarta: Yayasan Obor Indonesia.
- Stoler, Ann. 1975. "Class structure and female autonomy in Rural Java," *The Seventy-fourth Annual Meeting of the American Anthropological Association*, San Francisco, December.
- White, Ben. 1999. "Struktur Agraris", catatan intern untuk Tim Kali Loro, BW/3.vii.
- White, Ben and Irwan Abdullah. 1999. "Rural development, security and household welfare: 25 years of change in a Javanese village, 1973-1998," paper contributed to *The Workshop on The Economic Crisis and Social Security in Indonesia*, Nijmegen, The Netherlands, 7-9 January.